

Ekonomi Makro

Dr. Sabri, S.E., M.M.

Dalam buku ini, diuraikan dengan gamblang berbagai aliran pemikiran dalam ekonomi makro yang berkembang selama ini, mulai dari Klasik, Keynes dan pengikut-pengikutnya. Selain itu, juga dibahas mengenai penentuan pendapatan (*income determinatio*), baik di dalam model makro dua sektor maupun model makro tiga sektor. Sesuai dengan judulnya, di dalam buku ini juga dibahas berbagai masalah ekonomi makro seperti: inflasi; pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi, dan bahasan-bahasan penting lainnya.



Dr. Sabri, S.E., M.M. Lahir pada tanggal 04 Mei 1969 di Palopo Sulawesi Selatan, putra ke tujuh dari tiga belas bersaudara pasangan almarhum Bapak Malle dan almarhumah Ibu Hadera, berasal dari Bone Sulawesi Selatan.

Mengawali pendidikan formalnya di MIN Cimpu Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1981), kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN Suli Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1984) dan SMA PGRI Palopo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1987). Masuk kuliah strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang Sulawesi Selatan (lulus tahun 1994). Strata dua (S2) pada Pascasarjana Magister Manajemen Konsentrasi MSDM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Sumatra Barat (lulus tahun 2009). Kemudian melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) pada tahun 2014 di PPs Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Program studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) selesai September 2017.

Pengalaman organisasi yang pernah dan sedang diikuti, antara lain: pada tahun 1987-1994 aktif di himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat HMI Universitas 45 Ujung Pandang, pada tahun 1988-1989 dan 1989-1990 sebagai anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang. Pengurus APTISI Sebagai Koordinator bidang pendidikan Provinsi Kepri Periode 2014-2019.

Adapun Pengalaman Kerja yang pernah dilakukan adalah sejak tahun 2006 sampai sekarang sebagai dosen tetap pada kampus STIE Ibnu Sina Batam 2008-2016 sebagai Kaprodi Manajemen (2 Periode) pada STIE Ibnu Sina Batam dan jabatan terakhir sebagai pembantu ketua satu Bidang Akademik Periode 2016-2020.



Jl. Gunung, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone. 08 222 923 8689/ WA. 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-5747-93-9



Dr. Sabri, S.E., M.M.

Ekonomi Makro

Dr. Sabri, S.E., M.M.

Ekonomi Makro



EKONOMI MAKRO

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI MAKRO

Dr. Sabri, S.E., M.M.



Copyright © 2019, Sabri

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

EKONOMI MAKRO

Penulis:

Dr. Sabri, S.E., M.M.

Editor/ Penyunting:

Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:

Muhammad Muhlisin

Cover:

Andy Susila

Layout:

st. Navisah

Penerbit:

Trussmedia Grafika

Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18

Singosaren, Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Phone. 08 222 923 86 89/ WA: 0857 291 888 25

Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan I, Januari 2019

xii + 278; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-5747-93-9



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga buku dengan judul “Ekonomi Makro” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, defisit neraca pembayaran, konjungtur dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan bidang kajiannya itu, maka tidak disangsikan lagi bahwa ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang sangat penting untuk dipelajari oleh siapa saja.

Dalam buku ini, diuraikan dengan gamblang berbagai aliran pemikiran dalam ekonomi makro yang berkembang selama ini, mulai dari Klasik, Keynes dan pengikut-pengikutnya. Selain itu, dibahas juga mengenai penentuan pendapatan (*income determinatio*), baik di dalam model makro dua sektor maupun model makro tiga sektor. Sesuai dengan judulnya, di dalam buku ini juga dibahas berbagai masalah ekonomi makro seperti:

inflasi; pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi, dan bahasan-bahasan penting lainnya.

Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana tetapi langsung ke pokok persoalan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, penulis menyadari bahwa sebagai manusia tentu tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesempurnaan sejati hanya ada pada-Nya. Demi kesempurnaan buku ini, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak, terutama mereka yang kebetulan membaca buku ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Malle Dan Ibunda Haderah yang telah memberikan doa dan restu selama ini, istri tercinta, Robiatul Adawiyah Nasution serta Anak-anakku yang tercinta, Auda Zakiyatil Haya, Ahmad Sai'ed Muyamman, Ahsan Nai'em Murrahman dan Majda Bahiyatul Wijdani, Terima kasih atas doa dan semangat kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini, tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Haji Mustaqim Syuaib, S.E., M.M. Serta Dr. Sumardin, S.E., M.Si atas segala bantuannya dalam proses penerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di STIE Ibnu Sina Batam yang telah berkenan mambaca dan memberi masukan yang berarti terhadap draf buku ini sebelumnya serta semua rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan di sini satu persatu atas kontribusi yang tak ternilai hingga terwujudnya buku ini.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Kepada para pembaca dan mahasiswa kami sampaikan ajakan untuk terus belajar, membaca dan menulis (berkarya).

Batam, Januari 2019

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar | v

Daftar Isi | ix

BAB I

SEJARAH DAN RUANG LINGKUP EKONOMI | 1

- A. Sejarah Ilmu Ekonomi | 1
- B. Pengertian Ekonomi dan Ilmu Ekonomi | 3
- C. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Makro | 14
- D. Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro | 24

BAB II

SISTEM EKONOMI | 31

- A. Pengertian Sistem Ekonomi | 31
- B. Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli | 32
- C. Sistem Ekonomi Kapitalis | 33
- D. Sistem Ekonomi Sosialis | 36
- E. Sistem Ekonomi Campuran | 38
- F. Sistem Ekonomi Indonesia | 41

BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI | 47

- A. Pemerintah Sebagai Unit Ekonomi | 47
- B. Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi | 48
- C. Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian | 53
- D. Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi | 55

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | 63

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara | 63
- B. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara | 65
- C. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara | 65
- D. Dasar Penentuan Pengeluaran Negara | 66
- E. Komposisi Anggaran Pengeluaran Pemerintah | 71
- F. Keseimbangan Anggaran | 72
- G. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang | 75
- H. Teori Pengeluaran Pemerintah | 76
- I. Kebijakan Penerimaan Negara | 86

BAB V

PENDAPATAN NASIONAL | 103

- A. Pengertian Pendapatan Nasional | 103
- B. Konsep dan Istilah yang Terkait dengan Pendapatan Nasional | 104
- C. Perhitungan Pendapatan Nasional | 107
- D. PDB Harga Konstan dan Harga Berlaku | 110
- E. Tahun Dasar Perhitungan Produk Domestik Bruto | 112
- F. Pertumbuhan PDB | 113
- G. Distribusi Pendapatan | 116

BAB VI

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN DUA SEKTOR | 127

- A. Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan | 127
- B. Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan | 140
- C. Investasi (Penanaman Modal) | 142
- D. Investasi, Keuntungan dan Tingkat Bunga | 151
- E. Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi | 171
- F. Perubahan Keseimbangan dan Multiplier | 179

BAB VII

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR | 189

- A. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan | 189
- B. Pajak | 193
- C. Penjelasan Hubungan Pajak, Konsumsi dan Tabungan Menggunakan Contoh Angka | 206
- D. Penjelasan Tentang Pajak, Konsumsi dan Tabungan Menggunakan Analisis Aljabar dan Grafik | 214
- E. Pengeluaran Pemerintah | 219
- F. Keseimbangan dalam Perekonomian Tiga Sektor | 222
- G. Multiplier dalam Perekonomian Tiga Sektor | 230

BAB VIII

KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG | 241

- A. Kurva IS untuk Model Dua Sektor | 241
- B. Kurva IS untuk Model Tiga Sektor | 243
- C. Kurva IS untuk Model Empat Sektor | 245
- D. Pergeseran Kurva IS | 246

BAB IX

KESEIMBANGAN DI PASAR UANG | 249

- A. Teori Klasik Tentang Permintaan Uang | 249
- B. Pandangan Keyens Tentang Permintaan Uang | 251
- C. Penawaran Uang | 255
- D. Pembentukan Kurva LM | 256
- E. Pergeseran Kurva LM | 259

BAB X

KESEIMBANGAN UMUM PASAR BARANG DAN PASAR UANG | 261

- A. Keseimbangan Umum IS-LM | 262
- B. Perhitungan Keseimbangan IS-LM | 263
- C. Pergeseran Kurva IS | 264
- D. Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter | 266

Daftar Pustaka | 269

Indeks | 271

Tentang Penulis | 277



BAB I

SEJARAH DAN RUANG LINGKUP EKONOMI

A. Sejarah Ilmu Ekonomi

Masalah ekonomi sudah ada sejak manusia hidup di dunia ini. Hal ini berarti sejak dulu sudah ada orang yang memikirkan tentang tata perekonomian yang baik, seperti para negarawan, para ahli filsafat, dan sebagainya. Aristoteles misalnya, pada 350 tahun sebelum Masehi telah banyak menulis tentang harga dan nilai, pasar, keuangan negara, pajak, efisiensi tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar abad ke-16 dan ke-17, di mana negara-negara nasional mulai terbentuk dan perdagangan antar negara semakin meluas, mulailah banyak bermunculan tulisan-tulisan tentang masalah ekonomi.

Namun penelaahan ekonomi pada waktu itu baru dipelajari pada tingkat yang sangat medasar. Kemudian pada tahun 1270, penelaahan ekonomi mulai diusahakan untuk lebih dikembangkan. Thomas Aquinas misalnya, berhasil menyumbangkan beberapa tambahan pemikiran tentang masalah ekonomi yang bersumber dari buku Injil. Pada tahun 1758, Francois Quesnay mencoba untuk menjelaskan lebih jauh, meski demikian, sampai tahap

ini perkembangan penelaahan belum sampai membentuk satu disiplin ilmu sendiri. Sampai tahapan ini ekonomi sering disebut dengan *Fisiokrat*.

Pada tahun 1776 muncullah tokoh baru, yaitu Adam Smith, yang berhasil mengangkat penelaahan ekonomi menjadi suatu disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi. Sejak itu, ilmu ekonomi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dalam usaha mereka untuk meningkatkan asas hidup. Dengan demikian ilmu ekonomi berkembang melalui jalan yang panjang dan baru mendapat sebutan ilmu setelah keluarnya buku Adam Smith, yang berjudul “*An Inquiry into the Nature and Causes of the WEALTH OF NATIONS*” yang terbit pada tahun 1776.

Adam Smith dengan bukunya tersebut bisa dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah yang dengan sistematis menguraikan kehidupan ekonomi secara keseluruhan serta menunjukkan bagaimana semuanya itu berhubungan satu sama lain. Perkembangan pemikiran ekonomi kemudian menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2009, Elinor Ostrom dan Oliver E. Williamson.

Pemikiran ekonomi sebenarnya dimulai dari masa pra klasik yaitu pemikiran ekonomi zaman Yunani Kuno, Skolastik, Merkantilisme, dan Fisiokrat. Namun secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya *invisible hand* dalam mengatur pembangian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini.

Konsep *invisible hand* ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi Depresi Besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham.

Sebagai tandiangan aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya *General Theory of Employment, Interest, and Money* yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumberdaya mencapai sasarannya. Dua aliran ini kemudian saling “bertarung” dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya, seperti: *new classical*, *neo klasik*, *neo keynesian*, *monetarist*, *aliran sisi penawaran*, *aliran rational expectations* dan lain sebagainya. Namun, perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain, seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels, serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dkk dan kemudian oleh para peraih nobel Douglass C. North.

B. Pengertian Ekonomi dan Ilmu Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Pokok permasalahan ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas. Di mana permasalahan tersebut menimbulkan kelangkaan.

Kata “ekonomi” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan

sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat digolongkan dalam beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi *positif (deskriptif)* vs *normatif*, *mainstream* vs *heterodox*, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah.

Sistem ekonomi dalam masyarakat di suatu negara pada hakikatnya tercipta sebagai konsekuensi logis dalam pemenuhan kebutuhan dimensi material yang ada di dalam tiap-tiap diri individu, khususnya kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan material tiap-tiap individu, maka diciptakan sistem sosial yaitu sistem ekonomi yang berada di bawah regulasi suatu pemerintah negara. Sistem ekonomi berfungsi memanajemen barang dan jasa dengan tujuan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan primer.

Manajemen barang berhubungan dengan sumber daya alam (*natural resources*) baik yang bisa maupun tidak bisa diperbaharui. Sedangkan manajemen jasa lebih terkait dengan faktor sumber daya manusia (*human resources*) tentang sejauh mana kapabilitas dan intelektualitas manusia (*human power*) dalam memanajemen sub-sub sistem ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas ada sebuah peningkatan trend untuk mengimplementasikan ide dan metode ekonomi. Fokus ekonomi dalam konteks ini adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang, di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan.

Misalnya, bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang dan agama.

Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; meskipun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut justru merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

a. Pengertian Ilmu Ekonomi

Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh **Xenophone**, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi sebagaimana telah disinggung sebelumnya yaitu berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*” yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

Secara lebih luas pengertian ilmu ekonomi dikemukakan oleh Prof. DR. J.L Mey JR. yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia ke arah kemakmuran. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa

ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut Albert L. Mayers (Abdullah, 1992: 5) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah, *pertama*, tentang “Kebutuhan”— yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. *Kedua*, tentang “pemuas kebutuhan” yang memiliki ciri-ciri “terbatas” adanya.

Aspek yang kedua inilah menurut Lipsey (1981:5) yang menimbulkan masalah dalam ekonomi, yaitu karena adanya suatu kenyataan yang senjang, karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa jumlahnya tak terbatas, sedangkan di lain pihak barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas. Itulah sebabnya maka manusia di dalam hidupnya selalu berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Definisi ini nampaknya begitu luas sehingga kita sulit memahami secara spesifik.

Penulis sendiri lebih memilih pendapat J.L Mey sebagaimana dikemukakan di atas. Menurut penulis pendapat J.L. Mey lebih realitis, karena ditinjau dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) pada hakikatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor “liberalisme ekonomi” yaitu Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations.*”

Kemudian Samuelson dan Nordhaus (1990:5) mengemukakan:

“Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya—baik saat ini maupun di masa depan—kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.”

Menurut Samuelson bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi, dan menyalurkannya ke berbagai masyarakat untuk segera dikonsumsi. Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas meskipun kalimatnya berbeda, namun pada hakikatnya ilmu ekonomi itu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Dengan kata lain ilmu ekonomi itu merupakan disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.

Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yakni ilmu ekonomi positif dan normatif (Samuelson dan Nordhaus, 1990: 9). Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika, seperti haruskah sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin? Lebih jelasnya, Sastradipoera (2001: 4) mengemukakan, ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang hanya melibatkan diri dalam masalah “apakah yang terjadi.” Oleh karena itu ilmu ekonomi positif itu

netral terhadap nilai-nilai. Artinya ilmu ekonomi positif itu “bebas nilai” (*value free* atau *wetfrei*)—hanya menjelaskan “apakah harta itu” dan “apakah yang akan terjadi jika harga itu naik atau turun” bukan “apakah harga itu adil atau tidak.”

Sedangkan ilmu ekonomi normatif, betentangan dengan ilmu positif. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah “apakah yang seharusnya terjadi.” Esensi dasar ilmu ekonomi adalah pertimbangan nilai (*value judgment*). Seorang ekonom penganut etika puritan egalitarianisme, Gunnar Myrdal (1898-1987) lebih suka menyebutnya “ilmu ekonomi institusional.”

Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik (Abdullah, 1992: 6).

Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dan perlu diketahui, mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi tujuannya adalah berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi yaitu;

- (1) *mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun fungsional.*
- (2) *Untuk dapat mengetahui masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.* (Abdullah, 1992: 7)

Ilmu ekonomi juga memiliki keterbatasan. Meskipun kita ketahui bahwa ilmu ini telah menggunakan pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat menghilangkan keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Abdullah (1992: 8), keterbatasan-keterbatasan tersebut mencakup:

1. Objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasikan. Sebagai akibatnya kesimpulan atau generalisasi yang diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan waktu)
2. Dalam ilmu ekonomi manusia selain berkedudukan sebagai subjek yang menyelidiki, juga objek yang diselidiki. Oleh karena itu hasil penyelidikan yang berupa kesimpulan ataupun generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, di mana unsur-unsur subjeknya akan mewarnai kesimpulan tersebut.
3. Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan-percobaan. Sebagai akibatnya ramalan-ramalan ekonomi sering kurang tepat.
4. Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu apa yang direncanakan (*ex ante*) dan kenyataannya (*ex-post*) sering tidak sejalan.

Bekaitan dengan keterbatasan tersebut, maka sebagai akibatnya sifat keberlakuan generalisasi yang berupa dalil-dalil atau hukum-hukum dan teori-teorinya akan tergantung kepada konteks ruang dan waktu serta tidak mutlak. Jadi sifat keberlakuan dalil-dalil atau hukum-hukumnya bersyarat.

Yaitu bila yang lainnya tidak berubah syarat ini bisa disebut juga dengan “*Ceteris Paribus*.” Hal ini disebabkan oleh hukum-hukum ekonomi merupakan pernyataan-pernyataan tentang tendensi-tendensi ekonomi. Ia merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana tingkah laku tersebut juga dipengaruhi atau tergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku pada suatu saat. Jadi ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tetap tidak dapat melepaskan diri dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh ilmu sosial.

b. Tindakan Ekonomi

Telah kita ketahui bahwa ketebatasan alat pemuas kebutuhan merupakan masalah dari segala sumber masalah ekonomi. Untuk itu kita harus melakukan pilihan ekonomi, yaitu memilih kebutuhan mana yang harus kita dahulukan dan kebutuhan mana yang harus kita tunda. Melakukan pilihan ini merupakan salah satu contoh tindakan ekonomi.

Memilih, berarti kita berusaha mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dari kebutuhan yang hendak kita penuhi. Memilih berarti kita telah mempertimbangkan kebutuhan mana yang hendak kita korbankan dan kebutuhan mana yang hendak kita hasilkan. Orang dikatakan bertindak ekonomi, apabila ia berhasil memilih perbandingan yang sebaik mungkin antara pengorbanan dan hasilnya.

Dalam hal memilih, jelas ada barang yang dihasilkan dan ada barang yang dikorbankan. Tidak mungkin semua kebutuhan terpenuhi. Orang disebut bertindak ekonomi, apabila berhasil memilih perbandingan yang terbaik antara pengorbanan dan hasil, sehingga: (1) kebutuhan terpenuhi dengan sebaik mungkin,

dan (2) pengorbanan yang sedikit mungkin. Hal inilah yang dirumuskan dalam Prinsip Ekonomi.

c. Prinsip Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah:

1. Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan, atau
2. Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin.

Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.

d. Motif Ekonomi

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapaun motif ekonomi lainnya adalah:

1. Motif memperoleh keuntungan.

Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya.

2. Motif memperoleh penghargaan.

Motif ini merupakan motif agar terpuja dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu ia tampil dengan gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.

3. Motif memperoleh kekuasaan ekonomi.

Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Kadang-kadang motif memperoleh kekuasaan sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan.

4. Motif sosial/ membantu sesama.

Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangan pada panti asuhan, yayasan tuna netra dan lain sebagainya.

e. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. Artinya, bagaimana hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ada 2 hubungan peristiwa ekonomi, yaitu hubungan sebab akibat dan hubungan saling memengaruhi.

1. Hubungan sebab akibat (kausal)

Hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal adalah hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lain. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Contoh

hubungan ini adalah hubungan antara jumlah uang beredar dalam masyarakat dengan kenaikan harga. Apabila jumlah uang beredar bertambah, harga barang-barang akan naik. Hubungan kausal ini tidak dapat berlaku sebaliknya dimana kenaikan harga barang tidak menyebabkan bertambahnya jumlah yang beredar.

Bagaimana hubungan antara upah dan harga? Kenaikan upah biasanya menyebabkan kenaikan harga. Tapi, kenaikan harga tidak menyebabkan kenaikan upah.

2. Hubungan saling memengaruhi (fungsional)

Hubungan saling memengaruhi adalah hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling memengaruhi. Hubungan saling memengaruhi disebut juga hubungan fungsional. Contoh hubungan ini adalah hubungan antara harga dengan permintaan barang. Apakah harga suatu barang naik, permintaan atas barang berkurang. Di sini harga memengaruhi permintaan. Sebaliknya, apabila permintaan bertambah, harga akan naik. Dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik dimana harga memengaruhi permintaan dan sebaliknya permintaan juga memengaruhi harga.

Perlu diketahui bahwa hukum ekonomi itu tidak berlaku mutlak tetapi lebih tepat disebut tendensi atau kecenderungan. Hukum ekonomi berlaku dengan syarat *ceteris paribus*, yaitu jika hal-hal lain di dalam masyarakat yang di luar objek penelitian tidak berubah. Faktor-faktor *ceteris paribus* antara lain:

1. Pendapatan harus tetap.
2. Selera (*taste*) orang tetap atau tidak berubah.
3. Harga barang lain tetap.

4. Barang substitusi tidak ada.
5. Pengharapan pada masa depan tetap.

C. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi secara garis besar dibagi atas 2 cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga (mekanisme pasar, perilaku konsumen, perilaku produksi, serta berbagai bentuk pasar). Jadi yang menjadi perhatian adalah individunya.

Sedangkan dalam teori makro ekonomi, perilaku-perilaku individu tadi digabung menjadi satu, atau secara *agregat* (keseluruhan). Jadi yang menjadi perhatian tidak lagi produksi satu perusahaan dan harga suatu barang, tetapi produksi total dan tingkat harga umum (perekonomian suatu negara). Pada ekonomi makro pembahasannya mencakup konsep pendapatan nasional, mekanisme penentuan pendapatan nasional melalui interaksi antara permintaan agregat (konsumsi, investasi, belanja pemerintah, sektor luar negeri) dan penawaran agregat (fungsi produksi agregat, dan pasar tenaga kerja).

a. Masalah Pokok Ekonomi Makro

Pada dasarnya ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro.

Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut.

Ada tiga masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah yang dimaksud yaitu:

1. Masalah inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami. Setiap negara pasti pernah mengalami inflasi, dan umumnya pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena harga adalah indikator penting dari pada inflasi. Yang dimaksud inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Maka dari itu apabila dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang (dan bersifat sementara), maka kondisi semacam itu tidak dianggap sebagai inflasi. Inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus meskipun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup tetap saja merupakan masalah. Setidaknya karena tiga alasan berikut:

- Inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat.
- Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
- Inflasi dapat menyebabkan perubahan out-put dan kesempatan ke dalam masyarakat.

2. Masalah Pengangguran

Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang

tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga yang terjadi adalah pengangguran yang cukup tinggi. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) atau tidak. Secara teoritis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan.

Dalam praktiknya, tingkat kesempatan kerja penuh mengandung arti yang sedikit berbeda. Guna menentukan apakah perekonomian telah mencapai *full employment* atau belum, yang menjadi ukuran bukanlah penggunaan tenaga kerja 100%, tetapi penggunaan tenaga kerja yang sedikit lebih rendah dari itu.

Di Amerika Serikat, misalnya, *full employment* telah dianggap tercapai bila tingkat pengangguran paling banyak sekitar 4%. Di negara kita, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana (KB) adalah salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika disertai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

Berkaitan dengan masalah pengangguran, ada beberapa teori yang berkembang selama ini, yaitu:

1) Teori Klasik

Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran

dan mekanisme harga di pasar bebas untuk menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara, dan hal ini dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Jadi dalam teori klasik, jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil. (Tohar, 2000).

2) Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran, Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Selain permintaan agregat yang rendah, faktor lain yang menimbulkan pengangguran antara lain (1) menganggur karena ingin mencari kerja lain, (2) perusahaan menggunakan peralatan modern, (3) ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri yang ada.

3) Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Berawal dari analisis Marx pada awal abad ke-20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun, Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian mengemukakan bahwa konsep “kelas buruh” tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerja tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali, sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.

Dari uraian di atas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi ke arah sistem kapitalis monopolis, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang tidak mampu bersaing dan menjadi tepuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit, bahkan perusahaan kecil tersebut akan mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi, akibatnya, para pekerja tersebut menjadi pengangguran.

Itulah setidaknya beberapa teori tentang masalah pengangguran yang berkembang selama ini. Adapun menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat terbentuk sekadar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi.

Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula

permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut.

2) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi karena ada problem dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut.

3) Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- Pengangguran terbuka

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat bertambah lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja.

Efek dari keadaan ini mereka akan menganggur dalam waktu yang cukup panjang, sehingga kelompok ini dianggap sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat juga terbentuk dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan

teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

- Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

- Setengah menganggur

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

- Pengangguran bermusim

Pengangguran ini adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama di sektor peternakan dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur.

3. Ketimpangan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah neraca yang membuat ihtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa, dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi finansial seperti pembelian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri.

Bila jumlah penerimaan ke luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakeimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara merupakan masalah apabila ketidakeimbangan tersebut cukup besar. Kalau kenyataan itu terjadi, maka diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya.

Neraca pembayaran juga bisa dikatakan sebagai informasi keadaan keuangan satu negara secara umum. Jika negara tersebut memiliki kondisi yang *surplus* berarti negara itu memiliki cadangan devisa yang besar. Apa gunanya cadangan devisa itu? Cadangan ini digunakan untuk kegiatan transaksi perdagangan luar negeri. Cadangan ini digunakan untuk membiayai impor barang-barang dari luar negeri.

Semakin besar cadangan devisa suatu negara berarti semakin sehat negara itu, karena mampu membeli barang lebih banyak. Analoginya bila seseorang yang memiliki tabungan yang banyak, berarti dia memiliki kemampuan untuk membeli barang yang

lebih banyak. Bagaimana cara memperbesar cadangan devisa? Cadangan devisa dapat diperbesar dengan berbagai macam cara.

Pertama, dengan melakukan ekspor. Semakin besar ekspor, maka cadangan negara itu semakin besar. *Kedua*, adalah dengan mengundang investor asing agar mau melakukan investasi di negara kita. Cara ini ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya, masuknya investor asing ke dalam negeri, akan meningkatkan produksi dan mengurangi angka pengangguran. Apalagi kalau investasinya untuk jangka panjang.

Keburukannya, investasi asing ini tidak dapat selalu tetap di suatu negara. Sangat tergantung sesuai dengan keinginan si investor. Kalau perekonomian stabil, maka banyak investor yang datang ke negara itu, tapi sebaliknya jika negara dalam keadaan tidak menentu (*full of uncertainty*) maka investor akan segera menarik kembali uangnya yang telah di investasikan. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Indonesia adalah salah satu contohnya. Ketika terjadi peristiwa Mei 1998 misalnya, banyak investor yang lari ke luar negeri, dan investor asing yang tadinya mau investasi tidak jadi melakukan investasi di dalam negeri.

Ketiga, merupakan cara yang paling tidak disenangi yaitu dengan melakukan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri seharusnya menjadi alternatif terakhir bagi suatu negara jika negara tersebut ingin menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Dalam jangka pendek, pinjaman ini memang sangat berarti untuk memulihkan keadaan perekonomian yang hancur. Seperti Indonesia, karena pemerintah memiliki kesulitan dalam hal keuangan, agar pembangunan terus berlangsung, maka pinjaman luar negeri tidak dapat dihindarkan. Pemanfaatan utang luar negeri secara bijak sangat berarti bagi suatu negara, karena dengan demikian pembangunan dapat terus berlangsung,

angka pengangguran berkurang, aktivitas ekonomi tumbuh dan pendapatan nasional tetap tinggi, maka negara akan memperoleh penerimaannya dari ekspor maupun dari pajak. Dengan demikian pemerintah akan dapat membayar kembali utang luar negerinya.

D. Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi empat aspek, yaitu:

1. Menstabilkan kegiatan ekonomi (*price level stability*)

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkedali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.

2. Menjaga stabilitas harga

Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.

3. Meningkatkan kesempatan kerja.

Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja.

4. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Adapun kebijakan ekonomi makro dibagi menjadi dua bentuk yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Kebijakan moneter langsung adalah kebijakan di mana pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan kebijakan moneter tidak langsung adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan cara memengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Kebijakan Moneter Ekspansif/ *Monetary Expansive Policy*, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).
- b. Kebijakan Moneter Kontraktif/ *Monetary Contractive Policy*, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

Instrumen Kebijakan Moneter

Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut:

- a. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*). Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank. Dalam konteks Indonesia misalnya maka Bank Indonesia (BI) akan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
- b. Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*). Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
- c. Kebijakan Cadangan Kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (*cas ratio*). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.
- d. Kebijakan Kredit Ketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu, *Character, Capability, Collateral, Capital*, dan *Condition of Economy*. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

- e. Kebijakan Dorongan Moral (*Moral Suasion*). Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara—yang dalam konteks Indonesia sering disingkat dengan APBN—untuk mencapai kesetabilan ekonomi menjadi lebih baik dan laju ekonomi yang dikehendaki dalam rencana pembangunan dapat tercapai (Wayan Sudirman, 2001: 2)

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. (Amiruddin, 2018: 152)

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk memengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah.

Kebijakan fiskal sendiri memiliki dua instrumen. *Pertama*, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak.

Kedua, kebijakan belanja. Kedua kebijakan tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi.

Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrumen tersebut, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan lainnya akan sangat berbeda. Ketidaksamaan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam masyarakat ekonomi tetringgal misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja.



BAB II

SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental (*what, who* dan *for whom*) setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Lembaga ekonomi yang dimaksud di sini berupa pedoman, aturan atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan sebagainya. Ada juga yang bersifat tidak tertulis, seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan

ini meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya.

Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakat. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa.

Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, biasanya digunakan sudut pandang yang menyangkut:

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
2. Kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain.
3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi.

B. Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli

Penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit, karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda tentang sistem ekonomi itu. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, berikut ini adalah pengertian sistem ekonomi menurut pendapat beberapa ahli.

Pertama, Gilarso mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk

satu kesatuan yang teratur dan dinamis sehingga kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari.

Kedua, Gregory Grossman dan M. Manu, berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan memengaruhi.

Ketiga, McEachern mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (*what, how, dan for whom*).

Dari definisi-definisi tersebut, sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu, demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

C. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ini mula-mula berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-18, setelah Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku "*The Wealth of Nations*."

Adam Smith mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa. Jika setiap orang diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai

kemakmuran bagi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap individu sudah makmur, maka seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan individu.

Kebebasan yang dimaksud Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan harga, kebebasan untuk mengadakan persaingan, kebebasan mengadakan perundingan. Dengan adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk bekerja lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan.

Semboyan kaum liberal adalah “*laissez faire*” artinya biarkanlah. Semboyan ini mempunyai makna “biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah.” Tugas pemerintah adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyelenggarakan pekerjaan umum.

Sistem ekonomi kapitalis (liberal) tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin-mesin oleh pihak swasta baik perseorangan maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi.
2. Adanya kebebasan berusaha dan bersaing. Setiap orang bebas memilih lapangan pekerjaannya (mendirikan perusahaan), dan bebas bersaing dengan cara apapun. Produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.

3. Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya.
4. Harga-harga dibentuk di pasar bebas yang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran.
5. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi tidak dibenarkan.

Dalam kenyataannya kebebasan yang dikehendaki oleh kaum kapitalis, selain telah membawa kemajuan ekonomi yang pesat (industri dan perdagangan), juga telah mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sistem ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan, antara lain:

1. Konsentrasi (pemusatan) kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga muncul bentuk monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Dalam kenyataannya satu atau beberapa perusahaan raksasa menguasai pasar. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam menentukan harga, dan menentukan jumlah serta jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan maksimum.
2. Ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merugikan golongan yang lemah, sebab mereka akan kalah bersaing.

Perusahaan besar bersaing dengan perusahaan kecil, sehingga akhirnya menimbulkan semacam “kanibalisme.” Kekayaan semakin bertambah pada golongan yang kuat, sementara golongan yang lemah akan jatuh miskin, yakni para pengusaha kecil dan kaum buruh.

3. Kehidupan ekonomi sering tidak stabil, adanya gelombang konjungtur. Mekanisme pasar bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami fluktuasi yang tidak teratur. Pada suatu masa tertentu akan mengalami kemakmuran yang tinggi, tetapi pada masa berikutnya akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang banyak secara mendadak di suatu saat, dan mengalami kehancuran pada masa berikutnya. Demikian pula inflasi dapat tiba-tiba muncul, dan pengangguran yang tinggi dapat muncul pada masa berikutnya. Ketidakstabilan ekonomi seperti ini sangat merugikan masyarakat banyak.

D. Sistem Ekonomi Sosialis

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/ faktor-faktor produksi, dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berbeda dengan kapitalisme yang menitikberatkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitikberatkan pada pandangan **kolektivisme**. Kolektivisme adalah pandangan

yang mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis antara lain:

1. Semua alat-alat produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik) produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/ negara. Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
2. Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara.
3. Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah.
4. Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah.
5. Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja/ karyawan yang wajib ikut memproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi upah/ gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.

Sistem ekonomi ini dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (*commad economy*) atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat.

Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi.

Hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif.

E. Sistem Ekonomi Campuran

Dalam prakteknya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut (kapitalis maupun sosialis), tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sistem ekonomi campuran yang ditetapkan oleh banyak negara tidak selalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat, Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah sistem ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut “indeks kebebasan ekonomi” yang dikembangkan oleh Milton Friedman dkk yang tergabung dalam “*Economic Freedom Network*.”

Indeks tersebut dibangun atas 17 komponen, di antaranya menyangkut aspek operasi (campur tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala indeks bergerak dari 0 sampai 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi dari Milton Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia adalah Hongkong (9.3), disusul oleh Singapura (8.2), Selandia Baru (8.0) dan Amerika Serikat (7.6). Sementara itu ditingkat ASEAN, tercatat Thailand (7.2), Filipina (7.0), Malaysia (7.0), Indonesia (6.3).

Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1975-1995 tampak semakin liberal dengan Bergeraknya indeks kebebasan ekonomi dari 5.2 pada tahun 1975 menjadi 6.3 pada tahun 1995. Apakah negara dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam perekonomian? Secara empirik terbukti memang ada korelasi positif antara kebebasan ekonomi dengan pendapatan per-kapita dan pertumbuhan ekonomi.

Studi yang dilakukan oleh Liberal Institut pada tahun 1997 menunjukkan bahwa selama kurun 1985-1996, pendapatan per-kapita di negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas mencapai US \$14.829, sedangkan di negara yang kurang bebas mencapai US \$12.369, dan di negara yang paling kurang bebas hanya mencapai US \$2.541. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2.9% per tahun, sedangkan di negara yang perekonomiannya kurang bebas mencapai 1.8% per tahun, dan di negara yang paling kurang bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 1.0 % per tahun. Sayangnya hasil studi ini tidak melaporkan bagaimana hubungan kebebasan ekonomi dengan pemerataan tingkat kesejahteraan.

Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta. Namun, yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh pemerintah dan apakah campur tangan pemerintah tersebut harus bersifat langsung atau tidak langsung, apakah cukup dengan peraturan saja?

Secara garis besar, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibedakan dalam tiga bentuk:

1. Membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah minimum ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan yang pokok. Peraturan mengenai lokasi pengembangan dibuat, agar industri-industri yang didirikan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan berbagai polusi (pencemaran) yang dihasilkannya.
2. Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Uraian tentang kebijaksanaan ekonomi ini bisa dibaca dalam bab berikutnya.
3. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial (keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan). Kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta pada umumnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi individu yang bersangkutan (keuntungan perseorangan). Akan tetapi, masyarakat belum tentu mendapat keuntungan, bahkan mengalami kerugian, akibat tindakan individu yang bersangkutan, misalnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar. Karena itulah pemerintah ikut campur secara langsung, dengan mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk bidang-bidang yang vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ikut campur pemerintah tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan sosial.

F. Sistem Ekonomi Indonesia

Seperti dikemukakan oleh Atje Partadiredja (1983), seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah juga memengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijaksanaan harga, termasuk penetapan upah minimum.

Mengenai turut campurnya pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dilihat ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 tersebut berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ondenemer. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat terlaksana. Ketentuan itu berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketiga ayat tersebut di atas termuat baik dalam UUD 45 sebelum di amandemen maupun di UUD 45 setelah diamandemen. Dari ketiga ayat tersebut sebenarnya telah tersirat jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Namun, pada UUD 45 yang telah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem ekonomi Indonesia, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa: Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2. Sistem estatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. (GBHN 1993).

Selain dalam UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, berbagai gagasan sistem ekonomi Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia. Misalnya, pakar ekonomi senior Indonesia

mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia “...pada dasarnya merupakan ekonomi yang dijalankan oleh dunia usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara...” (Widjojo Nitisastro, “*The Socio-Economic Basis of the Indonesian State*,” 1959). Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “..lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila adalah pengembangan koperasi, penggunaan insentif sosial dan moral, komitmen pada upaya pemerataan, kebijakan ekonomi nasional, dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi..” (Mubyarto, 1981).

Sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengolah dan meningkatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi utopia, tujuan tersebut adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila. Dari segi ekonomi ada 5 ciri khas sistem ekonomi Pancasila, yaitu:

1. Peran dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan.
2. Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homoekonomikus tetapi juga *social man and religious man*, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
3. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial.

4. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Konsep perekonomian nasional berfungsi sebagai pupuk ketahanan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional, dan yang didasarkan atas solidaritas.

Dari segi kelembagaan yuridis, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. (Pasal 33 UUD 1945).
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Pasal 33).
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33).
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaha Perwakilan Rakyat pula (Pasal 23 – [5]).
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27).

6. Hal milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Penafsiran analogi Pasal 6. UU no.5 tahun 1960).
7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan kepentingan umum (Tersirat dalam pembukaan UUD 1945).
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara (Pasal 34).

Dari pembahasan di atas, nampak kita agak sulit menelaah sistem ekonomi Indonesia yang secara *de jure* mempunyai fondasi pada pasal 33. Maka dari itu wajar jika ada yang mengatakan bahwa Indonesia menganut Sistem Ekonomi Pancasila dan ada juga yang mengatakan Sistem Ekonomi Demokrasi. Kesulitan ini kemungkinan terletak pada masih belum dapat dikonkritkannya berapa istilah seperti “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” dalam pembentukan kebijakan negara.

Sementara itu, seiring berjalannya waktu suatu sistem ekonomi akan terus mengalami pembentukan dan penyesuaian sesuai dengan berbagai isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, isu dan permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia terus berkembang, paling tidak secara *de facto*, akan memengaruhi bentuk sistem ekonomi Indonesia.

Pada priode setelah proklamasi kemerdekaan misalnya, masalah yang sampai saat ini kita ingat adalah bahwa bangsa kita pernah dijajah dan persepsi pembentukan kebijakan saat itu adalah menentang keras setiap bentuk ancaman, baik nyata maupun diperkirakan, dari dominasi asing sehingga sistem ekonomi yang dibangun bergerak ke arah upaya untuk menasionalisasi

setiap usaha yang dimiliki asing, seperti dialihkan pemilikan KPM menjadi Pelni, Javase Bank menjadi Bank Indonesia. Dengan demikian bisa dikatakan pada tahap ini pemerintah lebih intervensionis.

Pada periode akhir tahun 1970 an, isu yang dipersepsikan penting saat itu adalah perlu ditingkatkannya pemerataan pembangunan. Suatu arahan kebijakan yang penting saat itu adalah konsep Trilogi Pembangunan, di mana harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan stabilitas nasional. Meskipun sejak awal tahun 1970-an arah ekonomi Indonesia mengarah pada liberalisme yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang PMA yang memberi fasilitas cukup luas pada PMA, namun saat itu pemilikan pemegang saham asing masih dibatasi sampai paling banyak 49 persen (agar mayoritas—paling sedikit 51 persen—pemilikan masih di tangan nasional).

Dengan demikian sistem ekonomi Indonesia pada periode tersebut masih di dominasi oleh intervensi pemerintah, meskipun arah ekonomi bergerak semakin liberal (ruang gerak yang lebih luas pada dunia usaha domestik maupun asing dengan ruang gerak yang lebih besar kepada pengusaha nasional). Pada priode selanjutnya, yaitu pertengahan 1980-an sampai sekarang, arah sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih liberal sesuai dengan adanya pengaruh globalisasi (khususnya dengan adanya WTO).



BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

A. Pemerintah Sebagai Unit Ekonomi

Pemerintah atau sektor negara dapat dipandang sebagai suatu unit ekonomi atau “rumah tangga” yang menghasilkan barang dan jasa tertentu untuk kepentingan umum dengan menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang “langka” dan dengan demikian ikut ambil bagian dalam arus barang/ jasa dan arus uang dalam lingkaran kegiatan ekonomi nasional.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak melibatkan peran pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki peran swasta lebih dominan dalam mengelola perekonomiannya. Peranan pemerintah dalam ekonomi merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih makmur, terutama di negara-negara berkembang atau tertinggal, masalah ekonomi tidak bisa diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar bebas.

Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian, penawaran harus seimbang dengan permintaan. Untuk mencapai keseimbangan tersebut dibutuhkan

pengawasan dan pengaturan oleh negara atau pemerintah. Pengawasan tersebut mencakup antara lain produksi, distribusi dan konsumsi komoditas.

Pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik serta langkah-langkah fiskal dan moneter yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara berkembang, mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan psikologis, ideologi, sosial, dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi.

B. Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Menurut Adam Smith, dalam perekonomian segala sesuatunya akan berjalan sendiri-sendiri menyesuaikan diri menuju pada keseimbangan menurut mekanisme pasar. Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian itu seperti dikendalikan oleh “*the invisible hand*,” sehingga dengan demikian tidak memerlukan begitu banyak campur tangan pemerintah. Maka, menurut Adam Smith peran pemerintah hanya meliputi tiga fungsi saja, yaitu:

1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, agar warga negara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman.
2. Menyelenggarakan peradilan, agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan, agar warga negara mendapat kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dewasa ini tugas negara jauh lebih luas daripada itu. Laju pertumbuhan penduduk dan makin meningkatnya tuntutan

zaman modern di bidang ekonomi, keuangan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hubungan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi menyebabkan peranan pemerintah makin. Seberapa jauh campur tangan negara dalam perekonomian nasional memang tergantung dari sistem ekonomi yang dianut, apakah segala-galanya ditentukan oleh pemerintah, atau sebagian besar kegiatan ekonomi dijalankan oleh usaha swasta dalam suasana pasar bebas. Dalam konteks Indonesia, yang menurut hemat penulis menganut sistem ekonomi “campuran,” sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka fungsi-fungsi negara menurut UUD 45 adalah sebagai berikut:

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (kalimat ke-4) disebutkan sebagai tujuan Negara Republik Indonesia:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Hal ini menyangkut tugas-tugas pemerintah antara lain:

1. Melindungi

Tugas pertama pemerintah adalah melindungi tanah air terhadap serangan dari luar maupun dari dalam negeri serta perlindungan kehidupan, hak milik, dan kegiatan setiap warga negara terhadap pelanggaran hak, pencurian, dan kejahatan lainnya (pertahanan, keamanan, ketertiban). Demi ketertiban kehidupan bersama pemerintah bertugas mengatur kehidupan sosial dan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan undang-undang dan peraturan. Jika dalam masyarakat muncul pertentangan kepentingan, pemerintahlah instansi yang wajib turun tangan untuk membantu mengatasinya.

2. Memajukan Kesejahteraan Umum

Dalam rangka tugas ini, pemerintah harus berusaha menjaga kesetabilan harga barang-barang kebutuhan pokok, antara lain dengan mengawasi jumlah uang dalam peredaran dan kegiatan dunia perbankan, juga ekspor dan impor, dan melindungi produsen dalam negeri terhadap saingan dari luar. Pemerintah dapat melengkapi produksi nasional di bidang-bidang yang tidak/ belum (atau belum cukup) dapat dikerjakan oleh usaha swasta; bila perlu menguasai sendiri beberapa cabang produksi yang penting.

Dalam rangka yang sama pemerintah membantu dunia usaha untuk bisa bekerja secara efisien, dengan menyediakan prasarana-prasarana produksi; jaringan jalan raya dan jembatan untuk transportasi, lalu lintas, pos dan komunikasi; perbankan dan keuangan; listrik dan air minum; kereta api dan perhubungan; radio dan TV, Pendidikan Dasar (SD), perguruan tinggi, puskesmas, dan rumah sakit.

Pemerintah jugalah yang wajib melindungi pihak yang lemah, misalnya melindungi kaum buruh dan petani terhadap pemerasan oleh golongan lain, menentukan upah minimum, mengawasi ditaatinya peraturan tentang keselamatan kerja, membantu mengatasi kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran. Selain itu, pemerintah membantu usaha-usaha swasta yang penting bagi masyarakat seperti koperasi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan atau rekreasi, perumahan rakyat, pelestarian lingkungan alam, dan sejuta hal lain lagi, sayangnya bahwa masih terdapat jurang menganga antara teori dan praktek.

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ini menyangkut pendidikan dan kebudayaan, pemberantasan buta huruf, peranan media massa, juga kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

4. Hubungan Internasional

Indonesia juga ikut memainkan peranan dalam dunia internasional, baik atas inisiatif sendiri maupun dalam rangka lembaga-lembaga kerja sama internasional, seperti: ASEAN, Negara-negara Nonblok, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan.

Selain beberapa hal di atas, peran pemerintah terutama dalam bidang ekonomi, yaitu sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kesetabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerapan dan sebagainya.
3. Fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan dan distribusi pendapatan masyarakat.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain karena, *pertama*, pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

Kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Ketiga, kegagalan pasar (*market failure*) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

Pertama, yang dimaksud dengan barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.

Kedua, yang dimaksud dengan barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh; pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing individu.

Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antara lembaga ekonomi.

Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian yang lain.

C. Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian

Untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekauan harga, monopoli dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peran ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung.

a. Intervensi Pemerintah Secara Langsung

1. Penetapan Harga Minimum (*floor price*)

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan agar tidak ada tengkulak (orang/ pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.

2. Penetapan Harga Maksimum (*ceilling price*)

Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus, tarif kereta api dan tarif taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.

b. Intervensi Pemerintah Secara Tidak Langsung

1. Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya, untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif murah.

2. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

D. Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro, seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Di negara-negara sedang berkembang, pada umumnya terdapat tiga masalah besar pembangunan

ekonomi. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran yang terus meningkat. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro.

1. Masalah Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian kredit untuk para petani dan pengusaha kecil berupa Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program Bapak Angkat, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), dan program wajib belajar. Khusus pada PJPT II, pemerintah berusaha mengentaskan kemiskinan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejauh ini dana desa terus mengalami kenaikan, bahkan pemerintah saat ini bertekad mengalokasikan anggaran dana desa dengan total Rp 400 triliun selama lima tahun ke depan hingga 2024. Sejauh ini pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019, dengan rincian : Rp. 20,67 triliun (2015), Rp 46, 98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018) dan 70 triliun (2019).

Selama hampir empat tahun sejak dana desa disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan juga untuk membantu kegiatan ekonomi di desa. Hasil terbaiknya selama empat tahun tersebut, yakni terbangunnya sarana dan

prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Contohnya, terbangunnya 1.140.378 meter jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa sebanyak 8.983 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 37.830 unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi sebanyak 58.931 unit.

Dana desa yang digelontorkan pemerintah tersebut tentu sangat membantu masyarakat miskin yang ada di desa, dan tentunya sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka dapat memiliki usaha tetap dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

2. Masalah Keterbelakangan

Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, Indonesia masih dikategorikan negara berkembang. Ciri lain negara berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendahnya tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju.

Masalah keterbelakangan merupakan masalah yang harus kita atasi bersama. Karena kita merupakan subjek atau objek dari permasalahan ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan memiliki semangat ingin maju sehingga kita memiliki hasrat untuk belajar dan belajar terus. Negara kita belum dikategorikan sebagai negara maju. Kita masyarakatnya haruslah membantu

pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari segala bidang dengan negara lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan IPTEK karena merupakan kunci untuk mengatasi masalah keterbelakangan.

3. Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja

Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan keterbatasan kesempatan kerja merupakan suatu keadaan kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan karena tidak dapat masuk dalam kuota atau pekerjaan yang tersedia.

Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, melakukan program padat karya, serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan.

4. Kekurangan Modal

Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah banyak melakukan program-

program bantuan modal salah satunya yakni PNPM MANDIRI. Selain pemerintah, badan usaha juga membantu dalam masalah kekurangan modal seperti bank, koperasi, BUMN seperti PLN dan lain sebagainya.

5. Pemerataan Pendapatan

Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama. Pemerataan pendapatan agar keadaan masyarakat semakin membaik bukan semakin memburuk. Pemerataan pendapatan merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang ekonominya rendah agar tidak jauh terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Artinya untuk menghindari dari adanya *gap* atau batas antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam konteks Indonesia, ketidakmerataan pendapatan terjadi karena sebagian besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar saja, seperti di pulau Jawa. Maka dari itu, agar pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah yang didukung masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan kualitas publik, meningkatkan kualitas SDM dan SDA agar dapat mengatasi ketidakmerataan pendapatan.

Pada hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dengan keberhasilan di bidang pertumbuhan ekonomi (secara materi). Keberhasilan ditentukan pula oleh faktor mental spiritual.

6. Inflasi dan Tingkat Pengangguran yang Terus Meningkat

Inflasi atau kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus bagi sebuah negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Inflasi dianggap

berbahaya jika telah melewati dua digit (di atas 30 persen) dan memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dalam jangka panjang. Inflasi ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif, seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi.

Seperti halnya inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pembangunan ekonomi. Pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional.

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, tingkat inflasi dan angka pengangguran terbuka terus meningkat. Sebagai gambaran, menurut laporan Bank Dunia, inflasi di tahun 1998 sudah mencapai tahap hiperinflasi sebesar 58,5 persen. Adapun untuk angka pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen per tahun, pada 1997 Indonesia memiliki jumlah pengangguran 4,8 persen dari jumlah angkatan kerja. Pada 1999, persentase ini meningkat hampir 4 kali lipat, yaitu 19,1 persen.

7. Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri

Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri merupakan satu masalah serius pemerintah. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri.

Total utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun kurang, besarnya tidak seberapa. Misalnya, pada 1998, jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US\$150.886.000, dan pada tahun 2003 utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi US\$135.401.000. Dan pada Juli 2019, Bank Indonesia merilis data Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar US\$395,3 miliar. Utang ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US\$197,5 miliar, serta utang swasta yang termasuk BUMN sebesar US\$197,8 miliar.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Pada dasarnya suatu pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berusaha untuk dapat mengelola dengan sebaik-baiknya atas dasar prinsip tata kelola yang baik dan sehat (*good governance principles*). Prinsip tata kelola yang baik dan sehat dalam pemerintahan dijalankan dengan mengutamakan ketaatan setiap kegiatan, langkah, dan kebijakan yang diterapkan pada aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, termasuk dalam bidang keuangan negara.

Sudah barang tentu setiap negara dengan sistem pemerintahan tentu mempunyai seperangkat ketentuan atau undang-undang yang menyangkut keuangan negara, termasuk Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam rangka mengelola dan mengatur berbagai hal yang terkait dengan keuangan negara, Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan berupa: Undang-Undang Dasar pasal 23 yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pajak, dan Pemeriksaan

Kuangan Negara; Undang-Undang no/17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara; dan Undang-Undang no. 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Atas dasar kewenangan pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan sebagaimana yang telah ditetapkan di Indonesia, yang juga dilakukan negara lain, maka pemerintah dapat menjalankan proses perencanaan anggaran pengeluaran atau belanja guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan.

Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara berdasarkan objek, subjek, proses dan tujuan keuangan negara. Objek dalam keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Subjek dalam keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Proses dalam keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

B. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Keuangan negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan ke dalam asas umum, meliputi asas tahunan, universalitas, serta kesatuan dan pesialitas sebagaimana pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan dengan menerapkan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri.

Asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip pemerintahan daerah dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan umum dan kewenangan khusus. Untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, sebagian dari kekuasaan

yang dimiliki presiden dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pemimpin lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu di pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembangian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah negara sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku pengelola keuangan daerah. Sedangkan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dilakukan oleh bank sentral.

D. Dasar Penentuan Pengeluaran Negara

Pemerintah di dalam mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan negara dan rakyat atau masyarakat senantiasa berlandaskan pada kewenangan yang melekat pada pemerintah

secara legal formal dan konstitusional. Di antara kewenangan itu adalah merencanakan, menyusun, dan menentukan pengeluaran pemerintah yang diperlukan dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam proses penentuan pengeluaran pemerintah atau negara ini pemerintah memerhatikan atau mempertimbangkan segala aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang perlu diakomodasi oleh pemerintah. Selain kebutuhan hidup, maka pemerintah juga perlu memerhatikan kebutuhan masyarakat akan segala macam fasilitas dan utilitas yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

Demikian pula yang terkait dengan tersedianya berbagai macam lapangan pekerjaan baik secara sektoral maupun regional, serta terhubungnya berbagai macam infrastruktur yang lengkap dan komprehensif dengan jaringan yang luas. Selanjutnya, masyarakat juga memerlukan suatu situasi keamanan dan ketertiban umum serta sistem pertahanan yang handal, oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistem keamanan dan ketertiban umum serta sistem pertahanan nasional yang dapat diandalkan secara efektif dan optimal.

Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat termasuk keinginan untuk memperoleh jasa pendidikan dan kesehatan secara luas baik yang menyangkut sistem penyelenggaraan, pengelolaan maupun tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan memenuhi kualitas yang baik. Demikian juga yang berkaitan dengan tersedianya perumahan rakyat atau masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan perumahan dari segala tipe dan kualitas mulai dari yang sederhana dan murah sampai dengan yang sangat baik dan mahal, serta kebutuhan pengembangan nilai-nilainya.

Pada akhirnya perlu dikemukakan bahwa berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dan dikembangkan oleh pemerintah itu tidak hanya menyangkut kegiatan dan kebijakan ekonomi saja, tetapi juga meliputi kegiatan dan kebijakan di bidang sosial, politik, dan budaya. Maka dalam penentuan pengeluaran pemerintah atau negara semuanya masuk sebagai faktor-faktor yang perlu mendapat pertimbangan pemerintah dalam rangka merencanakan, menyusun dan menentukan pengeluaran pemerintah atau negara.

Keseluruhan dari kegiatan dan kebijakan tersebut memerlukan dana guna merealisasikannya yang besar kecilnya berbeda-beda bila diukur atas dasar berbagai macam kepentingan masyarakat dan waktu perencanaan, penyusunan, dan penentuan atau penetapan pengeluaran pemerintah atau negara.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa dari berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya itu sebagian dilaksanakan dan dikelola secara langsung oleh pemerintah melalui lembaga, badan usaha, organ dan unit-unit kegiatan di bawah rentang kendali pemerintah, dan sebagian lagi diserahkan pada partisipasi pihak swasta atau non pemerintah. Konsekuensi dari hal ini maka dana pembiayaan itu sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya dan sebagian lagi diserahkan pada partisipasi pihak swasta. Dengan demikian dana pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu menentukan jumlah atau besar pengeluaran yang perlu disediakan negara atau pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhinya terutama faktor makro-ekonomi, antara lain menyangkut:

1. Pertumbuhan ekonomi.
2. Pendapatan per kapita.
3. Tingkat investasi.

4. Tingkat inflasi.
5. Produk atau *lifting* minyak dan gas bumi.
6. Harga minyak bumi.
7. Tingkat pengangguran.
8. Tingkat suku bunga umum.
9. Nilai tukar mata uang dalam negeri.
10. Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan.
11. Jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya.

Semua itu akan memengaruhi keputusan dan penetapan kebijakan pemerintah dalam rangka menentukan berbagai alokasi dan besar pengeluaran negara atau pemerintah. Selain itu juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain di luar faktor makro-ekonomi, antara lain yang menyangkut:

1. Stabilitas kondisi sosial politik yang kondusif.
2. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam negeri maupun luar negeri.
3. Pertahanan dan ketahanan nasional yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan ancaman secara maksimal.
4. Penegakan hukum yang berlandaskan atas asas keadilan dan kebenaran secara hakiki.
5. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mampu menyaring atau menangkal masuknya budaya asing yang kurang baik atau negatif secara maksimal.
6. Pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem.

7. Pengembangan kreativitas dan proses inovasi yang berdaya guna optimal bagi kepentingan masyarakat atau bangsa.
8. Penciptaan sarana dan prasarana deteksi dini akan kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam yang canggih dan efektif sehingga dapat diandalkan secara maksimal.
9. Pengembangan sistem pencegahan dan penangkalan terhadap bahaya pengedaran dan penggunaan narkoba, serta sistem rehabilitasi akibat penggunaan narkoba secara efektif.
10. Pengembangan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih bagi kepentingan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) nasional sehingga dapat dioperasikan secara efektif dan optimal.
11. Penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif bagi kepentingan kerukunan kehidupan umat beragama secara serasi dan selaras, dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan juga akan memengaruhi keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka penetapan berbagai alokasi pengeluaran negara atau pemerintah. Secara teoritik alokasi pengeluaran pemerintah ini terkalsifikasikan pada kelompok besar anggaran pengeluaran atas dasar:

1. Komposisi anggaran pengeluaran pemerintah.
2. Keseimbangan anggaran.
3. Persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Pengeluaran per kapita.
5. Tingkat pemerintahan.

E. Komposisi Anggaran Pengeluaran Pemerintah

Berbagai pengeluaran yang dialokasi atau dianggarkan untuk membiayai keperluan bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah atau negara diatur dalam susunan alokasi pengeluaran yang menjadi unsur-unsur atau komponen-komponen dari anggaran pengeluaran pemerintah atau negara. Secara garis besar komponen anggaran pengeluaran pemerintah atau negara itu terdiri dari:

1. Pembayaran gaji pegawai negeri, militer, dan kepolisian.
2. Pekerjaan umum.
3. Pendidikan dan kesehatan.
4. Pertahanan dan keamanan.
5. Pembangunan nasional dan ekonomi.
6. Jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pembayaran hutang negara atau pemerintah.
8. Pembelian atau belanja barang-barang keperluan pemerintahan.
9. Pembelian barang modal atau belanja modal.
10. Hubungan luar negeri.
11. Administrasi penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pengeluarn tidak terduga.

Keseluruhan dari pengeluaran pemerintah itu dikategorikan sebagai belanja pemerintah pusat karena selain dari alokasi pengeluaran tersebut terdapat pula alokasi pengeluaran pemerintah yang ditransfer ke tingkat pemerintah daerah. Pada berbagai negara yang berbentuk negara federal, maka transfer ini merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada negara bagian.

Bila seluruh belanja pemerintah pusat tersebut ditinjau dari fungsi pengeluaran pemerintah maka komposisi pengeluaran itu berubah menjadi alokasi pengeluaran pemerintah untuk menjalankan fungsi yang melekat pada pemerintah, yaitu:

1. Pelayanan umum.
2. Pertahanan.
3. Ketertiban dan keamanan.
4. Ekonomi.
5. Lingkungan hidup.
6. Perumahan, fasilitas dan utilitas umum.
7. Kesehatan.
8. Pariwisata.
9. Agama.
10. Pendidikan, dan
11. Perlindungan sosial.

Anggaran pemerintah pusat ini dan ditambah dengan dana transfer ke pemerintah daerah setiap tahun kemudian direncanakan, disusun dan diusulkan kepada lembaga legislatif (di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat) beberapa bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disetujui oleh lembaga legislatif, maka belanja pemerintah pusat dan dana transfer ke pemerintah daerah dapat dilaksanakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah yang secara operasional dijalankan oleh kementerian dan lembaga negara.

F. Keseimbangan Anggaran

Dalam uraian tentang pengeluaran pemerintah yang terdiri dari bermacam-macam jenis pengeluaran di antaranya terdapat

pembayaran hutang pemerintah atau negara baik yang merupakan cicilan bunga maupun pokok hutang tersebut. Keseluruhan dari pengeluaran pemerintah termasuk pembayaran cicilan bunga dan atau sebagian pokok hutang dibiayai oleh pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara.

Secara ideal bahwa seluruh pendapatan negara yang berhasil digali dan dihimpun oleh pemerintah atau negara dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran dan belanja negara termasuk pembayaran cicilan bunga dan atau sebagian pokok hutang yang diklasifikasikan sebagai belanja rutin. Belanja rutin ini bersama dengan Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah (bila di luar negeri merupakan alokasi dana pemerintah bagian atau federal) dan belanja lain-lain termasuk Dana Otonomi Khusus menjadi belanja dalam negeri. Kemudian bila pendapatan negara setelah dikurangi belanja dalam negeri tersebut masih diperoleh saldo positif maka saldo positif ini merupakan Surplus Anggaran.

Total pendapatan negara bila dikurangi dengan belanja dalam negeri maka saldonya dapat berupa saldo positif, nol, dan saldo negatif. Saldo positif dari keseimbangan anggaran ini disebut sebagai **Surplus Anggaran** dan saldo nol disebut **Berimbang**, sedangkan saldo negatif disebut sebagai **Defisit Anggaran**.

Bila keseimbangan anggaran ini menghasilkan surplus anggaran, maka pemerintah memiliki dana untuk membiayai seluruh belanja dalam negeri serta masih diperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan pemerintah.

Dalam pembiayaan pembangunan ini dapat menutup seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan dari hanya sebagian dari kebutuhan pembiayaan pembangunan tergantung dari besar kecilnya surplus anggaran dan besar kecilnya kebutuhan

pembiayaan program-program pembangunan pemerintah. Bilamana surplus anggaran itu hanya dapat menutup sebagian dari pembiayaan program-program pembangunan atau hanya menutup sebagian belanja pembangunan maka kekurangan belanja pembangunan itu akan diusahakan untuk ditutupi dengan pinjaman atau hutang baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan (dari sektor migas, nonmigas, dan pajak) dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Indonesia selama Pembangunan Jangka Panjang tahap I/PJP (1969/1970-1994/1995) menerapkan anggaran berimbang dinamis.

Berimbang berarti jumlah keseluruhan pengeluaran negara selalu sama dengan penerimaan negara. Dengan kata lain, keadaan berimbang berarti besarnya penerimaan (A+B) tetap diusahakan sama dengan pengeluaran (C+D). Jika terjadi perubahan pada salah satu dari empat komponen APBN, komponen lainnya harus ikut disesuaikan agar (A+B) selalu sama dengan (C+D). Lihat struktur dasar APBN berikut:

Sisi Penerimaan	Sisi Pengeluaran
A, Penerimaan dalam negeri	C, Pengeluaran rutin
B, Penerimaan pembangunan	D, Pengeluaran pembangunan

Dalam kebijakan anggaran berimbang dinamis, biasanya disertai dengan peningkatan nilai APBN dalam setiap perubahan tahun anggaran. Dinamis berarti bahwa dalam penerimaan lebih mudah dari yang direncanakan semula, pemerintah akan menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan.

Demikian pula dalam hal penerimaan negara melebihi dari yang direncanakan, masih memungkinkan dibentuknya cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan.

G. Kebijakan Anggaran Tidak Berimbang

Anggaran tidak berimbang dibedakan atas anggaran defisit (*deficit budget*) dan anggaran surplus (*surplus budget*). Pada tahun tertentu pemerintah pada umumnya mengalami surplus atau defisit dalam anggarannya. Defisit anggaran terjadi jika pengeluaran melebihi penerimaan dari pajak dan migas. Kebijakan anggaran defisit ditempuh jika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan jika perekonomian dalam keadaan resesi. Defisit anggaran bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Pengoperasian anggaran defisit merupakan alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah memengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja suatu perekonomian.

Kebalikan dari anggaran defisit adalah anggaran surplus. Surplus anggaran terjadi jika seluruh penerimaan pajak dan penerimaan-penerimaan lainnya melebihi pengeluaran pemerintah. Kebijakan anggaran surplus dilakukan jika perekonomian sedang berada dalam tahap ekspansi dan terus memanaskan (*overheating*) sehingga inflasi menaik. Melalui anggaran surplus, pemerintah menghemat pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli masyarakat dengan cara menaikkan pajak.

Melalui kebijakan anggaran berimbangnya, APBN Indonesia disusun sedemikian rupa sehingga secara akuntabilitas besarnya pengeluaran negara selalu sama dengan penerimaan negara. Padahal, secara ekonomi anggaran belanja Indonesia selalu defisit,

dalam arti besarnya pengeluaran negara selalu lebih besar daripada penerimaan negara. Sejak tahun 2000, prinsip anggaran berimbang Indonesia diubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam format APBN sekarang ini, terjadi perubahan dalam priode APBN dari April-Maret menjadi Januari-Desember yang akan memudahkan para pengamat ekonomi untuk melihat dan mengevaluasi dampak APBN terhadap perekonomian. Format APBN baru yang terjadi atas satu lajur ini juga akan memberikan informasi yang lebih transparan tentang kebijakan anggaran yang ditempuh pemerintah. Selain itu, format APBN yang ada pada saat ini menyiratkan bahwa pemerintah semakin memerhatikan aspek demokrasi dan desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk memberikan wewenang keuangan kepada pemerintah daerah dengan memerhatikan kepentingan daerah dan nasional yang terlihat dari adanya pos dana perimbangan.

H. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Namun, dalam pembahasan ini, penulis hanya akan mengulas teori makro saja. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 1987).

Boediono (1999) mengungkapkan bahwa dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan memengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda (Boediono, 1999).

Setidaknya ada beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah yang telah dikemukakan oleh para ahli, antara lain, *pertama*, teori **Rostow dan Musgrave**, dalam hal ini keduanya menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar

dapat lepas landas. Namun, pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Selain itu, pada tahap menengah ini, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antara sektor yang semakin rumit. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri, 2005).

Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap *Gross National Product* (GNP) semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyedia prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan (Mangkoesebroto, 1994).

Kedua, Teori Adolf Wagner. Pengamatan empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB (Dumairy, 1997).

Wagnert menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per-kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1994). Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan Hukum Pengeluaran Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Growing Public Expenditure*). Sedangkan Wagner sendiri menamakannya sebagai Hukum Wagner yaitu Hukum Aktivitas Pemerintah yang selalu Meningkat (*The Law of Ever Increasing State Activity*) (Dumairy, 19970).

Menurut Mangkoesoebroto (1994), hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt - 1}{YpCt - 1} > \frac{GpCt - 2}{YpCt - 2} > \dots > \frac{GpCt - n}{YpCt - n}$$

Di mana:

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

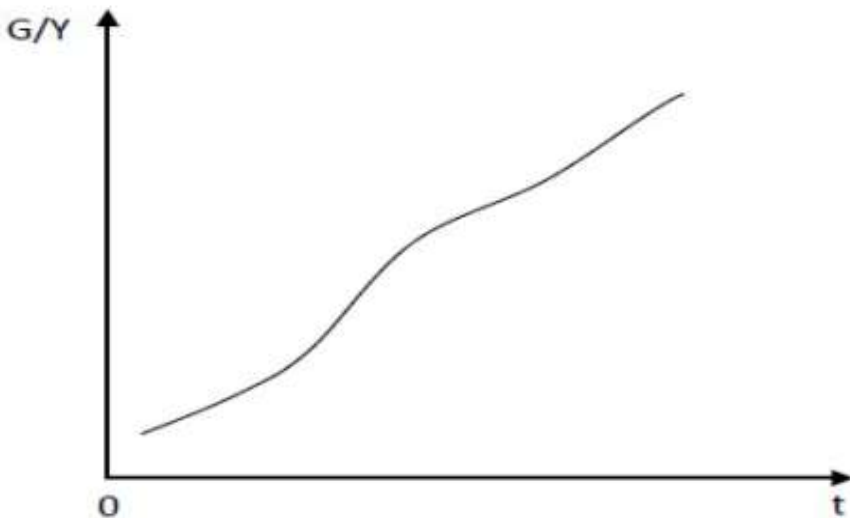
YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar (Mangkoesoebroto, 1994).

Secara grafik rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (G_pC/Y_pC) atau (G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva eksponensial sebagai berikut:

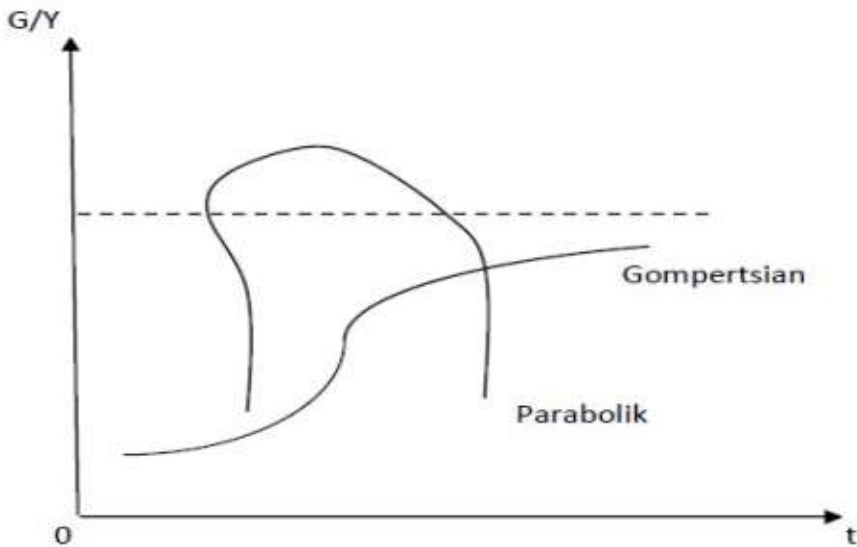
Gambar 1:
Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (I)



Persoalan yang belum terpecahkan ialah apakah dalam jangka panjang kurva tersebut akan berpola gompertsian (berarti sampai dengan suatu titik tertentu rasio G/Y akan kembali menurun)

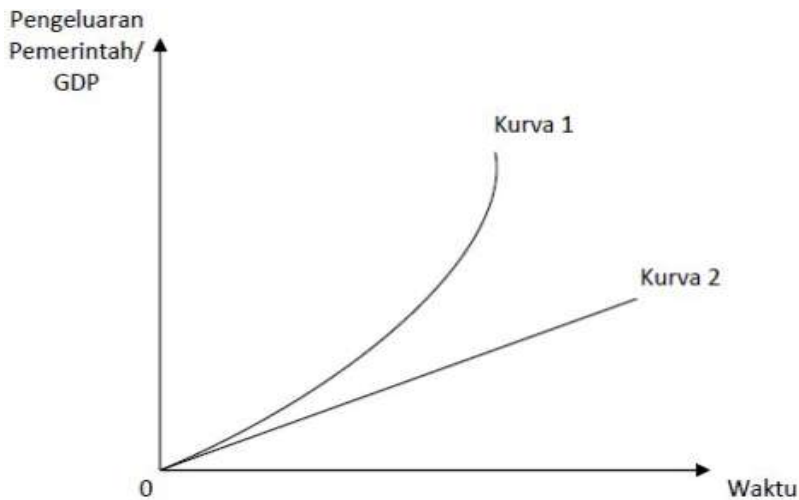
sebagaimana yang diperlihatkan oleh gambar kurva Gompertsian di bawah ini (Dumairy, 1997).

Gambar 2:
Kurva Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Nasional berdasarkan Hukum Wagner (II)



Hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasarkan pada suatu teori pemeliharaan barang publik. Tetapi Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat (Mangkoesoebroto, 1994).

Gambar 3:
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner



Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan (Dumairy, 1997).

Ketiga, Teori Peacock Wiseman. Peacock dan Wiseman merupakan dua orang terbaik yang mengemukakan teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal, masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar (Mangkoesoebroto, 1994).

Dalam Basri (2005), Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

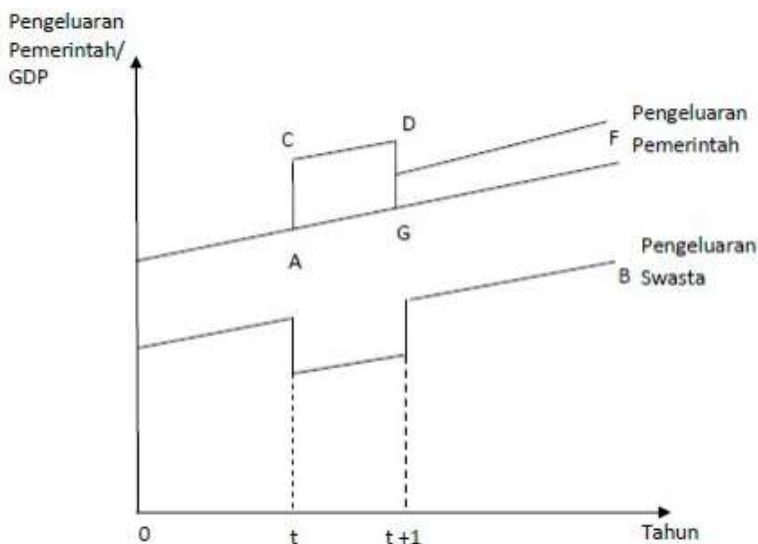
Jadi, dalam keadaan normal, kenaikan *Produk Domestic Bruto* (PDB) menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah (Basri, 2005).

Dalam Mangkoesoebroto (1994), pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin

bertambah bukan hanya karena *Gross National Product* (GNP) bertambah, tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah tidak menurun kembali ke tingkat semua meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk satu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

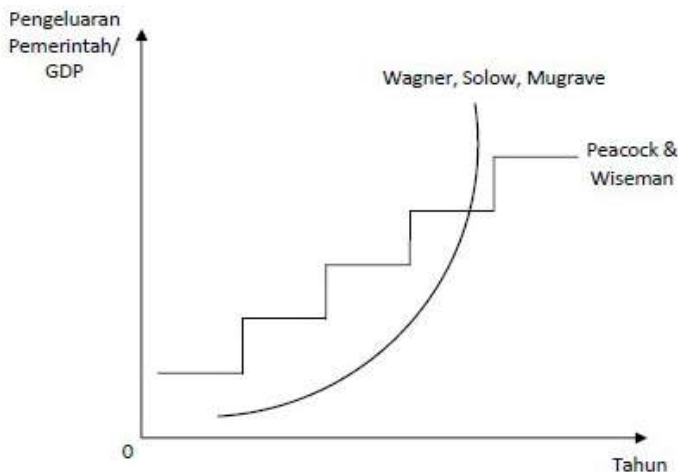
Gambar 4:
Kurva Teori Peacock dan Wiseman



Dalam keadaan norma, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat.

Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapatan Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 5:
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan
Pendapat Rostow Musgrave dan Peacock Wiseman



Dalam Mangkoesoebroto (1994), Bird mengkritik hipotesis yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi, setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi, menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

I. Kebijakan Penerimaan Negara

Penerimaan sumber-sumber pendapatan negara merupakan sebuah keharusan. Perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat yang kian meningkat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kini menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup. Berkaitan dengan hal itu, optimalisasi pendapatan negara menjadi salah satu opsi yang patut untuk dilakukan dengan segera. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah dan strategi optimalisasi, baik dalam hal kebijakan (*policy measures*) maupun administratif (*administrative measures*) terkait pendapatan negara, utamanya di bidang perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, terdapat penerimaan negara yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta bermacam-macam penerimaan negara yang berasal dari kegiatan Badan Layanan Umum (BLU). Dan yang terakhir adalah sumber-sumber penerimaan negara yang diterima pada saat penerimaan negara lebih kecil dibanding belanja negara berupa utang atau pinjaman negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Penerimaan negara yang bersumber dari bermacam Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selanjutnya akan diuraikan lebih rinci dalam uraian di bawah.

a. Penerimaan Negara Pajak (PNP)

Pajak adalah pembayaran yang bersifat wajib dan memaksa sehingga dengan demikian harus dibayar kepada negara oleh semua warga negara atau penduduk suatu negara yang dipandang atau diklasifikasikan mampu membayar pajak dan badan-badan usaha serta kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang atau keuntungan yang beroperasi di suatu negara dan memenuhi syarat penghasilan kena pajak tanpa memperoleh imbalan yang langsung dapat ditunjukkan atau dirasakan.

Imbalan yang langsung dapat ditunjuk ini biasanya merupakan manfaat yang dapat dirasakan pada saat melakukan pembayaran, baik yang merupakan pembayaran di depan maupun di belakang atas manfaat yang diperoleh seseorang atau masyarakat. Manfaat itu berupa perolehan barang esensial bagi kehidupan antara lain air, listrik dan gas. Demikian juga fasilitas yang langsung dapat digunakan atau dikonsumsi antara lain taman-taman, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, gelanggang olahraga, dan lain sebagainya, yang disediakan oleh pemerintah dengan pembayaran tertentu. Selanjutnya, bisa juga disebut jasa-jasa yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh setiap warga negara atau penduduk dan badan usaha serta kegiatan lainnya, antara lain jasa parkir dan jasa penyimpanan barang di tempat-tempat tertentu.

Pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh para wajib bayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara dipungut oleh negara atau pemerintah

dan masuk ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Pajak (PNP).

Pada wajib bayar pajak itu meliputi berbagai pihak yang diperkirakan atau dianggap dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan dan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan atau kebutuhan melalui pembayaran pada pihak lainnya. Berbagai pihak yang memperoleh penghasilan atau pendapatan itu terdiri dari:

1. Orang perorangan atau pribadi yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, militer, dan kepolisian dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah pangkat dan jabatannya.
2. Pegawai swasta baik yang merupakan tenaga kerja atau karyawan dan staf, yang menduduki jabatan dan kepangkatan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam perusahaan atau badan usaha.
3. Anggota militer dan kepolisian, dari pangkat dan jabatan yang tertinggi sampai dengan terendah baik yang berada di markas besar (mabes) dan satuan organisasi teritorial maupun yang berada pada satuan organisasi fungsional militer dan kepolisian.
4. Badan usaha atau perusahaan, baik milik pemerintah atau negara maupun milik swasta yang melakukan usaha atau kegiatan produksi dan memperoleh penghasilan atau pendapatan dan keuntungan.
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang melakukan berbagai macam usaha atau kegiatan dan dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan dan keuntungan.
6. Para pengusaha atau pedagang baik skala kecil maupun

besar yang melakukan fungsi distribusi berbagai barang atau produk dari produsen kepada konsumen. Peran distribusi ini dapat merupakan pengecer (*retailer*), pedagang perantara (*agent* atau *middlemen*), pedagang besar (*wholesaler*) atau grosir (*grocer*) dan pemegang merk untuk produksi hasil produksi pengusaha lain (*jobber*). Fungsi distribusi itu dilakukan oleh mereka di pasar barang konsumen (*market for consumer goods*).

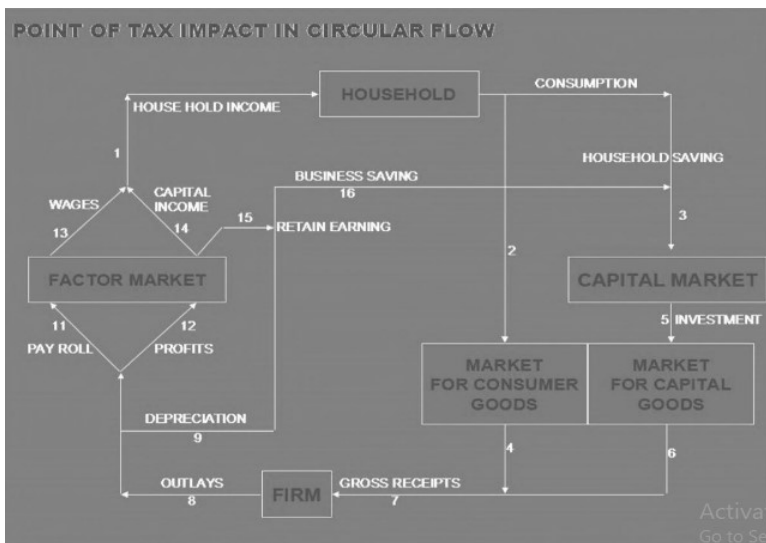
7. Pengusaha atau pebisnis yang melakukan kegiatan operasional di pasar modal (*capital market*) yang menerima penyaluran dana simpanan (*saving*) untuk diubah menjadi investasi dan digunakan pada kegiatan yang ada di pasar barang-barang modal (*market for capital goods*).
8. Pengusaha atau pebisnis yang melakukan fungsi distribusi barang-barang modal (*capital goods*) guna didayagunakan untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh para produsen dan menghasilkan berbagai macam barang atau produk (*firm*).
9. Para pemimpin perusahaan yang melakukan proses produksi yang terdiri dari para direksi dan manajer yang dikoordinasi dan/atau dikendalikan oleh para dewan komisarisnya. Kegiatan produksi itu memberdayakan faktor-faktor produksi, yaitu: lahan atau tanah (*land*), tenaga kerja atau buruh (*labor*), modal yang dimanfaatkan dalam proses produksi (*capital*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang dimiliki oleh para direksi dan manajer.
10. Para pemilik hak atas kekayaan intelektual (haki) berupa hak paten, pemilik lisensi, pemilik jenis usaha waralaba.

Identifikasi Aliran Dana dan Pajak yang Dibayar

Keseluruhan dari para pihak yang merupakan para wajib bayar pajak sebagaimana telah dikemukakan pada butir 1 sampai 10 dari sub bab di atas terklasifikasi dalam aliran dana berupa penghasilan atau pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi berbagai keperluan termasuk pembayaran pajak. Aliran dana yang diterima oleh berbagai pihak berupa pendapatan atau penghasilan dapat dipandang sebagai sumber penerimaan pajak apabila pendapatan memenuhi syarat untuk dikenakan pembayaran pajak.

Gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan antara dana yang mengalir pada berbagai pihak sebagai pendapatan atau penghasilan dan pajak yang dapat dikenakan pada para pihak itu dapat diilustrasikan dalam gambar Sirkulasi Aliran Dana dan Pajak sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6:
Sirkulasi Aliran Dana dan Pengenaan Pajak
(Sumber: Harvey Rosen, 1999)



Aliran dana berupa penghasilan atau pendapatan itu diterima oleh penerimanya pada saat terjadi kegiatan:

1. Proses produksi yang mendayagunakan faktor-faktor produksi dan perusahaan yang melakukan proses produksi itu membayar: sewa tanah (*rent*), upah atau gaji (*wages and payroll*), bunga (*capital income*), dan keuntungan (*profits*) bagi para pemilik faktor produksi tersebut akan menjadi penghasilan atau pendapatan orang perorangan atau pribadi yang ada dalam suatu rumah tangga (*household income*).

Pada saat para pemilik faktor produksi ini menerima pendapatan atau penghasilan maka mereka dikenakan pajak penghasilan (PPh) perorangan atau pribadi yang harus dibayar bila memenuhi syarat pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku di suatu negara.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah upah atau gaji dan tunjangan-tunjangan serta honorarium dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diterima oleh orang atau pribadi yang menjalankan pekerjaan, jabatan, kegiatan jasa dan kegiatan lainnya. Mereka semua itu merupakan tenaga kerja atau karyawan atau pegawai dari perusahaan swasta dan pegawai negeri secara luas.

2. Penempatan penghasilan atau pendapatan dari perorangan atau pribadi dan/atau perusahaan pada tabungan atau deposito (*household and business saving*) sehingga diperoleh bunga tabungan atau deposito (*capital income*) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Pembelian saham yang dilakukan perorangan atau pribadi dan atau perusahaan (*investment*). Atas pembelian ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN = vat). Pada saat memperoleh penghasilan akibat peningkatan nilai saham (*retain earning*) dikenakan pajak penghasilan.
4. Pedagang baik skala kecil maupun besar yang melakukan penjualan barang konsumen (*market for consumer goods*) dan barang kapital (*market for capital goods*) sehingga memperoleh penghasilan kotor (*gross receipts*) dari hasil usaha perdagangan itu dikenakan pajak penghasilan (baik perorangan maupun badan usaha) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Para pebisnis yang melakukan kegiatan operasional di pasar uang dan menerima penghasilan atau pendapatan kotor (*gross receipts*) dari kegiatan tersebut dan memperoleh keuntungan dari kegiatan penyaluran dana dan pembayaran atas berbagai kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah dikenakan pajak penghasilan baik yang merupakan perorangan maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Para pebisnis yang melakukan kegiatan operasional di pasar modal dan menerima penghasilan atau pendapatan dari kegiatan tersebut dan memperoleh keuntungan karena terjadi kenaikan nilai surat berharga atau saham juga dikenakan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Para pengusaha yang melakukan distribusi barang-barang modal atau barang industri yang sangat diperlukan bagi kegiatan produsen yang menghasilkan berbagai barang

atau produk (*firm*) dan memperoleh penghasilan kotor dan keuntungan dari hasil usaha itu akan terkena bayar pajak penghasilan baik perorangan maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedang produsen yang melakukan pengeluaran (*outlays*) untuk membeli barang-barang tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai.

Selain dikenakan pajak atas dasar penghasilan atau pendapatan dan keuntungan yang diperoleh seseorang dan atau perusahaan atau badan usaha maka pengenaan pajak itu dilakukan juga pada saat seseorang atau perusahaan melakukan pengeluaran atau pembayaran atas pembelian berbagai macam barang dan jasa yang dapat diperkirakan mencerminkan suatu penghasilan atau pendapatan bagi pihak yang melakukan pembelian atau pembayaran itu. Atas dasar hal ini maka pengenaan pajak dilakukan pada saat terjadi:

1. Konsumsi yang dilakukan oleh konsumen baik perorangan maupun perusahaan atau badan usaha atas pembelian berbagai macam barang konsumen (*consumer goods*) di pasar barang-barang konsumsi (*market for consumer goods*) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri termasuk barang mewah. Pada saat terjadi pembayaran atas pembelian itu dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN = vat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembelian berbagai macam barang modal dan peralatan industri lainnya yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi baik yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk barang mewah. Pada saat terjadi pembayaran atas pembelian barang modal

itu dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), sedangkan atas pembelian barang mewah dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Perbuatan atau pekerjaan yang menggunakan atau memakai berkas atau dokumen untuk berbagai keperluan kepentingan yang dapat berimplikasi hukum antara lain menyangkut persetujuan, perjanjian, kerja sama, faktur pembayaran pada jumlah minimal tertentu, ijazah, dan lain sebagainya yang akan dinyatakan absah atau valid bila dalam dokumen itu diletakkan materai dan pembayaran atas materai itu merupakan Bea Materai (BM).

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi bagian penting dalam membiayai pembangunan nasional, terutama sejak beberapa tahun terakhir penerimaan negara tidak mencapai target. PNBP sangat membantu negara dalam mengatasi defisit negara. Optimalisasi penerimaan negara menjadi sangat penting mengingat PNBP terutama yang dihasilkan oleh kementerian/ lembaga dapat mengurangi ketergantungan instansi Pemerintah terhadap Rupiah Murni. Optimalisasi PNBP dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pencarian potensi penerimaan negara dan mengevaluasi tarif PNBP yang ada.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran

dalam APBN, meskipun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal.

PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA, khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah dan tingkat lifting minyak.

Dalam pasa 2 UU No. 20 tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri:
 - ✓ Penerimaan jasa giro,
 - ✓ Penerimaan sisa anggaran pembangunan (SIAP) dan sisa anggaran rutin (SIAR)
2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA terdiri:
 - ✓ Royalti bidang perikanan,
 - ✓ Royalti bidang kehutanan,
 - ✓ Royalti bidang pertambangan, kecuali Migas.

Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh negara sehubungan dengan pemberian izin atau fasilitas tertentu dari negara kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau mengolah kekayaan negara.
3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri:
 - ✓ Bagian laba pemerintah,
 - ✓ Hasil penjualan saham pemerintah,

- ✓ Deviden: pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan.
- 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah terdiri:
 - ✓ Pelayanan pendidikan,
 - ✓ Pelayanan kesehatan,
 - ✓ Pemberian hak paten, hak cipta, dan merk.
- 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri:
 - ✓ Lelang barang,
 - ✓ Denda,
 - ✓ Hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan.
- 6. Penerimaan berupa hibah

1) Penetapan Tarif PNBP

Tarif sering kali diartikan sebagai harga satuan jasa, aturan pungutan, daftar bea masuk. Ibrahim Pranoto K (1995) mendefinisikan tarif sebagai berikut, “tarif disebut juga bea atau *duty* yaitu jenis pajak yang dipungut atas barang-barang yang melewati batas negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tafir, import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transitu atau *transit duty*.” Menurut Hamdy Hady (2004), tafir adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai/dikonsumsi habis di dalam negeri.

Dari beberapa pengertian di atas dan dikaitkan dengan penerimaan negara bukan pajak, tarif bisa diartikan sebagai jumlah

mata uang yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu jenis layanan jasa atau barang dalam satuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan tarif dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai dasar hukum dalam pemungutan PNBPNP.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menyatakan bahwa tarif atas jenis ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perundangan, tarif PNBPNP yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dimaksud harus memerhatikan beberapa aspek penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU PNBPNP, yaitu:

1. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPNP yang bersangkutan, dan
3. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Adapun jenis-jenis tarif antara lain sebagai berikut:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah (nominal) tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya objek maupun subjek yang dikenakan tagihan. Adanya tarif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua pihak dikenakan dalam jumlah yang sama.

b. Tarif Proporsional (Sebanding/ Sepadan)

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek tagihan berapapun nilainya. Jumlah tagihan akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan tagihan. Adanya tarif proporsional dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua dikenakan tagihan dalam jumlah yang sama karena antara orang yang satu dengan yang lain mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan masing-masing.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif dengan persentase semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase. Dengan adanya tarif seperti itu, semakin tinggi objek tagihan akan semakin besar tagihan yang dikenakan. Tarif ini, menurut Rochmat Soemitro, sebetulnya didasarkan pada teori ekonomi hukum Gossen yang mengatakan bahwa lebih banyak kita memiliki barang maka manfaat marginal satuan berikutnya lebih kecil. Oleh karena itu, lebih mudah dikenakan pajak/pungutan.

d. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase yang semakin kecil bila objek tagihannya semakin besar. Tarif ini tidak diterapkan di dalam praktik karena

mengandung ketidakadilan. Bila tarif ini diterapkan, maka yang memiliki obyek tagihan (kemampuan) lebih rendah akan dikenakan beban yang lebih berat. Sementara mereka yang memiliki obyek tagihan lebih besar mendapat beban yang lebih ringan.

Besarnya tagihan pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan (*base*) dan tarif yang dikenakan terhadapnya (*rate*). Salah satu syarat pungutan kepada rakyat adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pungutan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

Berkenaan dengan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pengaturannya ditetapkan dalam undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 1997 yang telah disebutkan di atas. Di mana dalam UU tersebut digariskan agar memerhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

2) Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran

Pemungutan, pembayaran dan penyetoran PNBPN tidak didefinisikan secara tegas di dalam peraturan perundangan tentang PNBPN. Pemungutan dapat diartikan sebagai aktivitas pejabat instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengambil

sejumlah uang PNPB yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundangan (termasuk kontrak) sebagai hak negara atas pemberian pelayanan jasa atau barang dari masyarakat pengguna (wajib bayar).

Untuk pembayaran dapat didefinisikan sebagai pemberian sejumlah uang yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan oleh masyarakat yang meminta layanan jasa atau barang baik diberikan di awal (sebelum pelayanan) maupun di akhir (setelah pelayanan). Sedangkan penyetoran merupakan kegiatan menyampaikan sejumlah uang sebagai penerimaan PNPB oleh bendahara penerima maupun secara langsung oleh masyarakat pengguna (wajib bayar) ke rekening kas umum negara di bank sentral maupun melalui sub rekening kas umum negara melalui bank persepsi.

Mekanisme penerimaan dan penyetoran PNPB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB, yaitu:

1. Pasal 4: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.”
2. Pasal 5: “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”
3. Pasal 6
 - 1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang.
 - 2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- 3) Tidak dipenuhinya kewajiban instansi pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh PNBP yang diterima oleh setiap Instansi Pemerintah harus disetor secepatnya ke Kas Negara.

3) Pelaporan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mewajibkan pejabat instansi pemerintah untuk melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan (Pasal 2).

Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pemimpin Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini oleh instansi yang bersangkutan kepada menteri (Menteri Keuangan).

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan realisasi PNBP triwulan disampaikan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

4) Penggunaan

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan

besaran anggaran yang dialokasikan kepada penghasil PNBP untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihasilkan tersebut. Penggunaan PNBP didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian PNBP (tidak seluruh PNBP yang dihasilkan) dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP oleh instansi (Kementerian/Lembaga) yang bersangkutan.

Penggunaan sebagian PNBP sebagaimana tersebut di atas tidak digunakan untuk sembarang kegiatan, tetapi terbatas untuk kegiatan tertentu. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 73 Tahun 1999, penggunaan sebagian dana PNBP terbatas pada 6 (enam) kegiatan atau bidang tertentu, yaitu:

1. Penelitian dan pengembangan teknologi.
2. Pelayanan kesehatan.
3. Pendidikan dan pelatihan.
4. Penegakan hukum.
5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu.
6. Pelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan PNBP tersebut, setiap Kementerian/ Lembaga yang akan menggunakan PNBP harus memiliki izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang berasal dari PNBP Kementerian/ Lembaga tersebut.



BAB

V

PENDAPATAN NASIONAL

A. Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional negara dapat mengetahui tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produk barang dan jasa. Menurut Sadono Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

Secara fiktif pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu, prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP).

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu.

PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB dan PNB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

B. Konsep dan Istilah yang Terkait dengan Pendapatan Nasional

Istilah-istilah yang harus dipelajari berkaitan dengan pendapatan nasional yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Di negara berkembang Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Di mana di dalamnya termasuk *output* barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara yang bersangkutan maupun milik warga negara asing yang berdomisili di negara yang bersangkutan.

Di dalam perekonomian negara maju maupun berkembang barang dan jasa diproduksi bukan dari perusahaan milik penduduk negara tersebut, namun juga berasal dari perusahaan milik negara

lain atau perusahaan asing. Adanya perusahaan multinasional dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut.

Perusahaan multinasional menyediakan modal, teknologi serta tenaga kerja di mana perusahaan tersebut beroperasi. Opsinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta menambah ekspor. Operasi perusahaan multinasional merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara dan nilai produksi yang disumbangkan dalam perhitungan pendapatan nasional.

2. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun. Di mana yang dihitung dalam kategori PNB adalah produksi barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi/ input yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan, baik yang secara geografi berdomisili di dalam negeri maupun yang secara geografis berada di negara lain atau luar negeri.

Pengelompokan PDB dan PNB terdapat dua kategori yaitu PDB atau PNB nominal dan PDB atau PNB riil. PDB atau PNB nominal adalah pengukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara menurut harga yang berlaku ketika barang dan jasa tersebut diproduksi. Sedangkan PDB atau PNB riil, merupakan pengukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi pada kurun waktu tertentu menurut harga konstan pada tahun tertentu (sebagai tahun dasar) dan seterusnya digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional pada tahun berikutnya.

3. Produk Nasional Neto (*Net National Product*)

Investasi dalam sektor perusahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya investasi dapat menggantikan barang modal yang sudah susah dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimaksud adalah total pengeluaran investasi bruto. Namun, yang lebih relevan adalah investasi neto (investasi bruto-depresiasi). Untuk menghasilkan output yang lebih akurat, maka PNB dikurangi depresiasi yang menghasilkan NNP.

4. Pendapatan Nasional (*National Income*)

Dalam perhitungan output nasional dengan metode pendapatan dijelaskan bahwa Pendapatan Nasional (PN) adalah balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN ke PNN harus mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung dan menambah angka subsidi.

5. Pendapatan Personal (*Personal Income*)

Pendapatan Personal (PP) adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh angka PP dari PN maka laba perusahaan yang tidak dibagikan harus dikurangkan. Selain itu pembayaran asuransi sosial juga harus dikurangkan. Perhitungan PP juga menambahkan pendapatan bunga yang diterima dari pemerintah dan konsumen serta pendapatan non balas jasa.

6. Pendapatan Personal Disposabel (*Disposable Personal Income*)

PPD merupakan pendapatan personal yang dapat dipakai

oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal.

C. Perhitungan Pendapatan Nasional

Secara teoritis, perhitungan GNP dilakukan dengan tiga cara, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan produksi (*Production Approach*)

Menurut pendekatan produksi pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi. Cara ini menghasilkan *gross national product* atau GNP. Perhitungan dalam pendapatan nasional hanyalah nilai tambah (*value added*) dari masing-masing lapangan usaha/sektor-sektor ekonomi yang dihasilkan pada berbagai tahapan proses produksi. Di mana nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

Berdasarkan *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC) yang dikeluarkan oleh PBB terdapat 9 klasifikasi lapangan usaha/sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian (peternakan, kehutanan, dan perikanan/ *agricultural*).
2. Pertambangan dan penggalian/ *minning and quarrying*.
3. Industri pengolahan/ *manufacturing industries*.
4. Listrik, gas & air/ *electric, gas and water supply*.
5. Kontruksi/ *contruction*.
6. Perdagangan, hotel & restoran/ *trade, restaurant and hotel*.

7. Pengangkutan dan komunikasi/ *transformation and communication*.
8. Keuangan, real estate, & jasa perusahaan/ *finace, rent of building and business servise*.
9. Jasa-jasa/ *servive*.

Secara matematis metode produksi dapat dituliskan dalam suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = \sum P_{qn} \cdot Q_{in}$$

$$Y = P_{q1} \cdot Q_1 + P_{q2} \cdot Q_2 + P_{q3} \cdot Q_3 \dots + P_{q9} \cdot Q_9$$

Di mana :

P_{qn} = Harga dari produk sektor n

Q_1, Q_2, Q_3 = Jumlah produk dari masing-masing sektor

Untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda dalam metode ini maka yang dilakukan adalah hanya menjumlahkan nilai tambah dari masing-masing sektor produksi tersebut/ menjumlahkan nilai akhir dari hasil produksi tersebut sehingga dapat ditulis:

$$Y = \sum NTB_{1-9} = NTB_1 + NTB_2 + NTB_3 + \dots NTB_9$$

Contoh menghitung nilai tambah bruto adalah sebagai berikut (harga bersih):

- ✓ Tebu/2,5Kg dijual Rp 2500
- ✓ 2,5Kg diolah menjadi gula/Kg dijual Rp 4000
- ✓ Gula/Kg diolah menjadi gulali dijual Rp 6000

Berdasarkan informasi tersebut, maka besarnya nilai tambah bruto dari kegiatan menjual sejak tebu menjadi gulali adalah:

$$\text{Rp } 2500 + (\text{Rp } 4000 - \text{Rp } 2500) + (\text{Rp } 6000 - \text{Rp } 4000) = \text{Rp } 2500 + \text{Rp } 1500 + \text{Rp } 2000 = \text{Rp } 6000$$

Perhatikan bahwa nilai ini sama dengan nilai gulali. Inilah yang dimaksud dengan nilai tambah bruto dari suatu produk.

Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan produksi sering dinamakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) (*Gross Domestic Product (GDP)*)

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi/ perekonomian atau dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berupa upah/gaji, laba usaha, tingkat suku bunga dan sewa. Cara ini menghasilkan *gross national income* atau GNI. Adapun penjelasannya adalah, apabila tenaga kerja menghasilkan upah (*wages* = *W*), Modal menghasilkan bunga (*Interest* = *I*), tanah menghasilkan Sewa (*Rent* = *R*) dan skill atau *entrepreneurship* menghasilkan profit (*profite* = *P*), maka secara matematis dapat ditulis:

$$Y = Y_W + Y_I + Y_R + Y_P$$

Metode ini jika tidak hati-hati dan telitik juga bisa menyebabkan perhitungan ganda, maksudnya bisa saja pendapatan sewa tanah adalah juga merupakan pendapatan pribadi dari pemilik tanah, dan pendapatan bunga berasal dari pendapatan atas sewa dan upah/gaji pemilik tanah dan seterusnya.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Metode ini mencoba menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen (C), rumah tangga swasta/produsen (I), rumah tangga pemerintah (G) dan export netto ($X-M$). Secara matematis persamaan indentitasnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = AE = C + I + G + (X - M), \rightarrow_{AE = \text{Aggregate Expenditure}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode atau pendekatan pengeluaran sering juga dinamakan sebagai Produk Nasional Bruto (PNB) (*Gross National Product (GNP)*). Pada dasarnya metode pengeluaran ini juga memiliki beberapa kelemahan di antaranya adalah adanya faktor pengeluaran ganda yang tidak dinilai. Misalnya tidak semua pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan untuk menghabiskan kegunaan nilai akan tetapi banyak juga yang bertujuan untuk investasi. Misalnya, menggunakan pendapatannya untuk membangun rumah kontrakan (kos-kosan istilahnya), membeli tanah dan lain sebagainya. Namun demikian, perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran relatif lebih mudah terutama dalam pendapatan dan pencacahannya.

D. PDB Harga Konstan dan Harga Berlaku

Dalam analisis menggunakan data PDB, harga berlaku (P_i) dan harga konstan (P_o) biasanya digunakan untuk keperluan yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana kita tahu, menjadi indikator utama dalam ekonomi suatu negara yang menggunakan PDB harga konstan atau $P_o \times Q_i$, dengan Q_i adalah output

sektor/lapangan usaha. Sementara itu, untuk analisis kontribusi komponen PDB, digunakan harga berlaku atau $P_i \times Q_i$.

Penggunaan harga konstan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh kenaikan harga dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mencerminkan pertumbuhan output yang sebenarnya. PDB harga konstan dilakukan dengan menggunakan harga tahun tertentu sebagai harga konstan (P_0) untuk keseluruhan kuantitas produksi (Q_i). Sementara itu, analisis kontribusi sektoral/pengeluaran/pendapatan adalah dengan membagi komponen harga berlaku dengan PDB harga berlaku. Perhitungan ini akan sangat berguna dalam melihat transformasi perekonomian.

Sebagai ilustrasi, PDB harga konstan dengan P_0 tahun 1995 untuk PDB tahun 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 adalah:

$$P_{1995} \times Q_{1995}, P_{1995} \times Q_{1996}, P_{1995} \times Q_{1997}, P_{1995} \times Q_{1998}, P_{1995} \times Q_{1999}, P_{1995} \times Q_{2000}$$

Perlu dipahami bahwa dalam penggunaan harga konstan, menghitung pertumbuhan ditujukan untuk gabungan berbagai barang dan jasa. Penyebabnya, gabungan barang dan jasa tidak memungkinkan menambahkan volumenya akibat harga masing-masing barang dan jasa berbeda. Namun, jika hanya satu barang atau jasa saja, kita bisa langsung menghitung pertumbuhan volume (Q) dari menambahkan volumenya sebagai pertumbuhan riil. Misalnya, produksi satu barang berupa buku sejenis selama dua tahun dapat langsung dihitung pertumbuhan volumenya, tapi jika ada dua barang, yaitu buku dan apel, maka tidak mungkin melakukan penjumlahan volume buku dan apel untuk menghitung pertumbuhan produksi.

Selain itu, teknik yang sering digunakan dalam mengatasi perubahan harga dalam menghitung pertumbuhan adalah dengan melakukan deflasi atau nilai nominal produksi dibagi dengan indeks tertentu yang sesuai. Misalnya, untuk nilai nominal PDB dideflasikan (dibagi) dengan IHK (Indek Harga Konsumen) atau untuk nilai nominal ekspor dideflasikan (dibagi) dengan IHPB (Indek Harga Perdagangan Besar) yang intinya semakin mendekati agregasi barang/jasa tersebut lebih baik. Secara matematis, misalnya, sebagai berikut $(P_{1995X}Q_{1995})/ "P_{1995}"$ dan $(P_{1996X}Q_{1996})/ "P_{1996}"$ dimana $"P_{1995}"$ dan $"P_{1996}"$ adalah indeks harga masing-masing untuk tahun 1995 dan 1996 sementara $P_{1995X}Q_{1995}$ dan $P_{1996X}Q_{1996}$ adalah nilai produksi tahun 1995 dan 1996.

E. Tahun Dasar Perhitungan Produk Domestik Bruto

Angka PDB yang biasa disajikan oleh BPS biasanya berdasarkan tahun dasar atau harga pada tahun tertentu, misalnya, tahun 1976, 1983, 1993, 2000, dan tahun 2010 tahun dasar paling terbaru. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tentu saja kita memerlukan langkah untuk menyamakan tahun dasar. Berikut ini ilustrasi bagaimana kita meyamakan tahun dasar. Umpunya, kita memiliki data PDB dari tahun 2008 hingga tahun 2010 dengan harga konstan tahun 2008. Tujuan kita adalah mengubah harga konstan 2008 menjadi tahun 2010. Secara matematis PDB sekarang adalah $P_{2008} \times Q_{2008}$, $P_{2008} \times Q_{2010}$. Dengan demikian, langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PDB harga konstan tahun 2008 untuk semua tahun/waktu yang diamati dibagi dengan PDB harga konstan 2008 untuk tahun 2010. Secara matematis, akan terlihat seperti berikut ini:

$$\frac{P_{2008} \times Q_{2008}}{P_{2008} \times Q_{2010}}, \frac{P_{2008} \times Q_{2009}}{P_{2008} \times Q_{2010}}, \frac{P_{2008} \times Q_{2010}}{P_{2008} \times Q_{2010}}$$

- Hasil pembagian tersebut dikalikan dengan PDB harga berlaku tahun 2010 untuk semua tahun yang sedang diamati. Secara matematis, akan terlihat seperti berikut ini:

$$\left(\frac{Q_{2008}}{Q_{2010}}\right) \times (P_{2010} \times Q_{2010}), \left(\frac{Q_{2009}}{Q_{2010}}\right) \times (P_{2010} \times Q_{2010}), 1 \times (P_{2010} \times Q_{2010})$$

- Hasil perkalian tersebut akan menjadi PDB dengan harga konstan tahun 2010, dan PDB harga berlaku tahun 2010 akan sama nilainya. Secara matematis, akan terlihat sebagai berikut:

$$P_{2010} \times Q_{2008}, P_{2010} \times Q_{2009}, P_{2010} \times Q_{2010}$$

Dengan demikian, kita telah mendapatkan PDB harga konstan 2010 untuk tahun 2008, 2009, dan 2010.

F. Pertumbuhan PDB

Perhitungan PDB (pertumbuhan ekonomi) tentunya menggunakan data PDB harga konstan. Ada beberapa cara penghitungan yang sering dilakukan, yaitu dengan penghitungan sederhana dan regresi. Penghitungan pertumbuhan ekonomi sederhana biasanya dilakukan dengan istilah pertumbuhan triwulan *year on year (quarterly y.o.y growth)*, pertumbuhan triwulan *quarter on quarter (quarterly q.o.q growth)*, dan pertumbuhan tahunan (*annually y.o.y growth*). Sementara itu, regresi memerlukan data series dari PDB harga konstan tetapi tidak menjadi bahasan dalam buku ini karena memerlukan tambahan pengetahuan mengenai metode regresi.

Metode sederhana ini biasanya membandingkan perubahan PDB antara dua waktu tertentu, bisa juga secara rata-rata dari suatu rentang waktu (*average*), atau perubahan akhir dari awal dari suatu rentang waktu (*end to end*). Perumusan untuk penghitungan pertumbuhan sederhana yang umum digunakan adalah mengurangi nilai PDB harga konstan di waktu t dengan nilai PDB harga konstan waktu sebelumnya ($t-1$) dibagi dengan nilai PDB harga konstan tahun $t-1$, lalu dikalikan dengan 100 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun t (%) =

$$\frac{PDB \text{ Harga Konstan } t - PDB \text{ Harga Konstan } t-1}{PDB \text{ Harga Konstan } t-1} \times 100$$

Pertumbuhan triwulan berbasis *y.o.y* artinya menghitung pertumbuhan ekonomi triwulan tertentu tahun t dengan triwulan sama tahun $t-1$. Pertumbuhan triwulan berbasis *qoq* (*quarter on quarter*) artinya menghitung pertumbuhan ekonomi triwulan t tertentu dengan triwulan sebelumnya ($t-1$) dimana bisa saja tahunnya sama atau berbeda. Pertumbuhan tahunan (*annual y.o.y growth*) adalah menghitung pertumbuhan ekonomi tahun t tertentu dengan tahun $t-1$.

Kadang-kadang juga dilakukan pertumbuhan akumulasi, yaitu menghitung dari triwulan ke triwulan secara kumulatif, tetapi jarang dilakukan. Perumusan penghitungan pertumbuhan regresi memerlukan data serial. PDB harga konstan yang lebih panjang. Sebagai ilustrasi, diketahui bahwa PDB tahun t merupakan PDB tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 ditambah pertumbuhan ekonomi (g). Atau, dapat dirumuskan $PDB_{t1} = PDB_{t0}(1+g)$. Selanjutnya dapat pula dirumuskan dalam logaritma natural sebagai berikut: $\ln PDB_{t1} = \ln PDB_{t0} + t \times \ln(1+g)$. Atau, disederhanakan menjadi $Y = c + dt$, dengan $Y = \ln PDB_{t1}$ dan

$d = 1 + g$. Misalnya, hasil regresi menunjukkan $d = 1.057$, maka pertumbuhan ekonomi (g) adalah 5,7% sepanjang observasi yang dimiliki.

Supaya lebih fokus, mari kita menggunakan data yang didapat dari BPS (Biro Pusat Statistik) untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Urutan penggunaan penghitungan adalah: *pertama*, menghitung pertumbuhan ekonomi tahunan dengan menggunakan data dari PDB menurut lapangan usaha. *Kedua*, adalah menghitung pertumbuhan ekonomi triwulan dengan menggunakan PDB menurut penggunaan baik yang bersifat *y.o.y* maupun *q.o.q*. *Ketiga*, adalah menghitung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan regresi.

Pertumbuhan ekonomi tahunan. Pertumbuhan ekonomi tahunan pada tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat untuk 2012, 2013, dan 2014 masing-masing adalah 6,85%, 6,20% dan 5,44%. Secara umum, sektor primer dan industri cenderung bertumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor jasa-jasa. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 1

**Produk Domestik Bruto Indonesia Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha dan Pertumbuhannya**

Lapangan Usaha	Nilai Tambah dalam harga konstan 2000 (Miliar Rp)				Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	2011	2012	2013*	2014**	2012	2013	2014
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	315036.8	328279.7	339560.8	350722.2	4.20	3.44	3.29
2. Pertambangan dan Penggalian	190143.2	193139.2	195853.2	195425.0	1.58	1.41	-0.22
3. Industri Pengolahan	633781.9	670190.6	707481.7	741835.7	5.74	5.56	4.86
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	18899.7	20094.0	21254.8	22423.5	6.32	5.78	5.50
5. Konstruksi	159122.9	170884.8	182117.9	194093.4	7.39	6.57	6.58
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	437472.9	473152.6	501040.6	524309.5	8.16	5.89	4.64
7. Transportasi dan Komunikasi	241303.0	265383.7	291404.0	318527.9	9.98	9.80	9.31

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	236146.6	253000.4	272141.6	288351.0	7.14	7.57	5.96
9. Jasa - Jasa	232659.1	244807.0	258198.4	273493.3	5.22	5.47	5.92
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2464566.1	2618932.0	2769053.0	2909181.5	6.26	5.73	5.06
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	2322653.1	2481790.3	2635612.6	2779064.0	6.85	6.20	5.44
Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, diolah							

Pertumbuhan ekonomi triwulan. Pertumbuhan ekonomi triwulan baik *y.o.y* maupun *q.o.q* dapat dilihat pada tabel 1. Terlihat bahwa pertumbuhan PDB triwulan IV *y.o.y* tahun 2013 dan 2014 adalah 5,03%. Selama 2014, pertumbuhan PDB *q.o.q* meingkat dari triwulan I, II, III cukup tinggi, yang kemudian melemah pada triwulan IV. Sebenarnya dari perhitungan pada tabel tersebut juga masih banyak yang bisa dikemukakan, tetapi dibatasi karena bukan tujuan dari bagian ini.

Pertumbuhan ekonomi tahunan dengan rata-rata dan *end to end*. Sebagai perbandingan, kita lihat cara penghitungan sederhana lainnya. *Pertama*, secara rata-rata tanpa regresi selama periode 1985-2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,60%. *Kedua*, jika menggunakan metode *end to end* berupa menggunakan PDB 2008 sebagai PDBt dan PDB 1985 sebagai PDBo, hasilnya 11,6% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut.

Contoh hasil perhitungan di atas, dengan berbagai metode sederhana, akan mengingatkan kita bahwa jika ada yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi, maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pertumbuhan yang sedang dibiarkan, supaya kita dapat memiliki pemahaman yang sama.

G. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting

untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan Kurva Lorenz, artinya kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Sedangkan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini. Semakin tinggi atau besar Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan semakin kecil Indeks Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk tujuan analisis (Todaro dan Smith, 2006). Dua ukuran yang pada umumnya digunakan dalam menganalisis distribusi pendapatan tersebut adalah *size distribution of income* (distribusi ukuran pendapatan) dan *functional of factor share distribution of income* (distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi).

Size distribution of income secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Berdasarkan ukuran ini, cara mendapatkan penghasilan tidak

dipermasalahan, apa yang lebih diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya. Selain itu, lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan.

Sedangkan *functional or factor share distribution of income* berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha, atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dan analisis pendekatan fungsional ini.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan di antara penduduk, ukuran yang digunakan berdasarkan pada ukuran *size distribution of income*. Namun, karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan atau distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat empat ukuran yang merefleksikan ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Adapun rumus umum koefisien Gini diperlihatkan pada Persamaan di bawah, sedangkan arahnya perhitungannya diilustrasikan pada tabel.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n [Fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})]$$

Dimana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

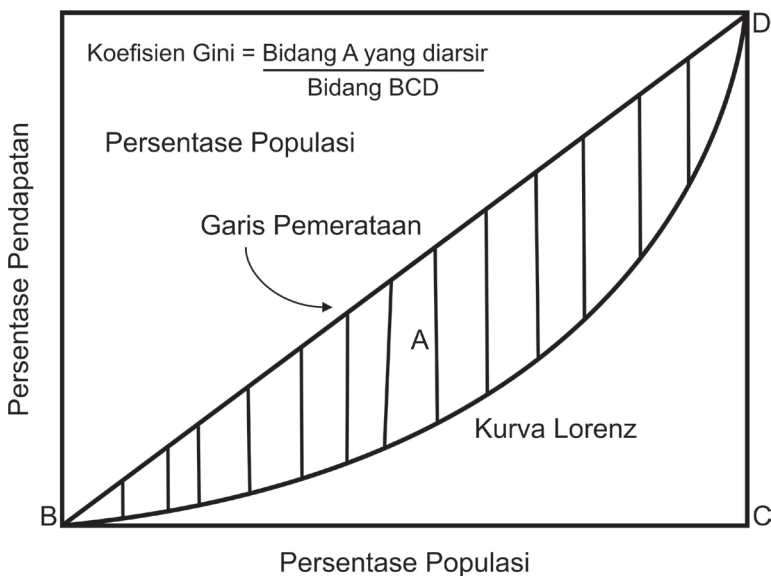
Tabel 2
Contoh Perhitungan Koefisien Gini

Kel Kons	Tot Pddk	Tot Pndptn	%Pddk (Fi)	% Pndptn	K% Pndptn (Yi)	(Yi+ Yi-1)	Fi* (Yi+Yi-1)
<2000	14286	2236	0.1019	0.0029	0.0029	0.0029	0.0003
2000-2999	27141	68151	0.1936	0.0896	0.0926	0.0955	0.0185
3000-3999	25052	87182	0.1787	0.1147	0.2072	0.2998	0.0536
4000-4999	19108	85566	0.1363	0.1125	0.3198	0.5270	0.0718
5000-5999	13809	75507	0.0985	0.0993	0.4191	0.7388	0.0728
7000-7999	17482	120380	0.1247	0.1583	0.5774	0.9964	0.1243
8000-9999	8986	79762	0.0641	0.1049	0.6823	1.2597	0.087
10000-15000	8874	106223	0.0633	0.1397	0.8220	1.5043	0.0952
>15000	5453	135360	0.0389	0.1780	1.0000	1.8220	0.0709
	140191	760367	1.0000	1.0000	Koefisien Gini: 1-.5881 =.4119		

Sumber: Moeis, 2009

Ide dasar perhitungan koefisien Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Kurva tersebut dinamakan kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal. Lihat gambar di bawah ini:

Gambar 7:
Kurva Lorenz



Sumber: Todaro dan Smith (2006)

Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. Sedangkan Koefisien Gini atau *Gini*

Ratio adalah rasio (perbandingan) antara luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian angka koefisiennya sama dengan nol. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga Koefisien Gini bernilai satu.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et.al. 2007) adalah sebagai berikut:

- ✓ Lebih kecil dari 0.4 : tingkat ketimpangan rendah
- ✓ Antara 0.4-0.5 : tingkat ketimpangan moderat
- ✓ Lebih tinggi dari 0.5 : tingkat ketimpangan tinggi

Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria (Todaro dan Smith, 2006) yaitu:

1. Prinsip anonimitas (*anonymity principle*) : ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

2. Prinsip independensi skala (*scale independence principle*) : Ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak tergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupee atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin.
3. Prinsip independensi populasi (*population independence principle*) : prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya, perekonomian Cina tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk Cina lebih banyak.
4. Prinsip transfer (*transfer principle*) : prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip Pigou-Dalton. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

b. Ukuran Bank Dunia

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu:

- ✓ 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
- ✓ 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan
- ✓ 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Selain dari sisi pendapatan, pengukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran. Karena data pengeluaran lebih mudah diperoleh, maka pengukuran ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia ini lebih sering menggunakan data pengeluaran. Namun, pengukuran ketimpangan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran memiliki kelemahan antara lain data yang disajikan akan *under estimate* dibandingkan bila data yang dipergunakan adalah data yang berdasarkan pendapatan.

Hal itu disebabkan adanya sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan sebagai tabungan (*saving*). Penyebab lainnya adalah adanya transfer pendapatan. Dalam masyarakat adalah hal yang lumrah bila seseorang memberikan sebagian pendapatannya sebagai sokongan kepada orang tua atau saudara yang tidak mampu. Dengan demikian, tingkat pengeluaran tidak mencerminkan pendapatan yang diperoleh. Masalah lainnya adalah sering tidak tercatatnya pengeluaran-pengeluaran terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan

seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.

- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12%-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.
- ✓ Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks-L

Ukuran ketimpangan pendapatan lain yang banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famili ukuran ketimpangan “*generalized enthropy*.” Adapun rumus “*generalized enthropy*” umum dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(a) = \frac{1}{a(a-1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{y} \right)^a - 1 \right]$$

Dimana:

Y adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran)

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok GE mewakili penimbangan yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap

perubahan yang berakibat pada ekor atas dari distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- ✓ GE (1) disebut sebagai indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{y} \right) \ln \left(\frac{y_i}{y} \right)$$

- ✓ GE (0), juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari $\log(y)$:

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{y_i}{y} \right)$$



BAB

VI

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN DUA SEKTOR

A. Hubungan Antara Konsumsi dan Pendapatan

Konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan, apabila pendapatan meningkat maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun maka konsumsi akan turun (Partadireja, 1990).

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan di antaranya tingkat pendapatan rumah tangga (Sayuti, 1989).

Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai (*disposable income*). Dengan kata lain, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara

tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (Prasetyo, 2011).

Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disamping dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut (Nanga, 2001).

$$Y = a + b Y_d \quad (a > 0, 0 < b < 1)$$

C dan Y_d merupakan pengubah yang masing-masing menunjukkan konsumsi dan pendapatan riil. Parameter a menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi otonom yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pendapatan, seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit dan standar hidup yang diharapkan. Sementara parameter b menggambarkan kecenderungan mengkonsumsi marjinal, yang merupakan perbandingan antara perubahan dalam konsumsi dengan perubahan dalam pendapatan atau $b = MPC = \Delta C / \Delta Y_d$, serta memiliki nilai antara 0 dan 1.

Persamaan di atas menyiratkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan yang tinggi, konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Hal ini sejalan dengan hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi dari Keynes yang mengatakan bahwa apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik tapi dengan jumlah yang kecil.

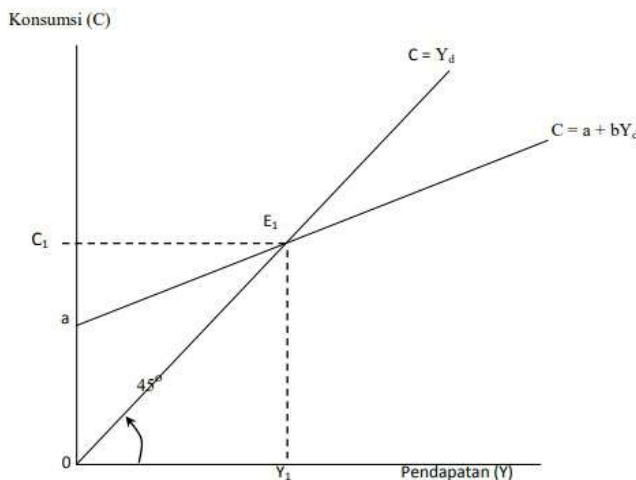
Fungsi konsumsi yang berbentuk linier seperti ditunjukkan oleh persamaan di atas dan memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) adalah konstan selama rentan tingkat pendapatan relevan.
2. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) adalah lebih besar daripada kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC).
3. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (APC) akan semakin kecil kalau tingkat pendapatan mengalami kenaikan.

Fungsi konsumsi dikenal sebagai kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume* atau APC) yaitu perbandingan antara besarnya konsumsi total dengan pendapatan (C/Y_d), atau dari persamaan sebelumnya besarnya $APC = C/Y_d = a/Y_d + b$ atau $Apc = a/Y_d + MPC$.

Fungsi konsumsi pada persamaan di atas dapat dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 8:
Fungsi Konsumsi



Sumber: Nanga. 2001

Pada gambar di atas, keseimbangan terjadi pada saat fungsi C memotong garis 45° yaitu di titik E_0 . Dengan kata lain, titik E_1 tersebut sebesar $C = Y$ ($C_1 = Y_1$).

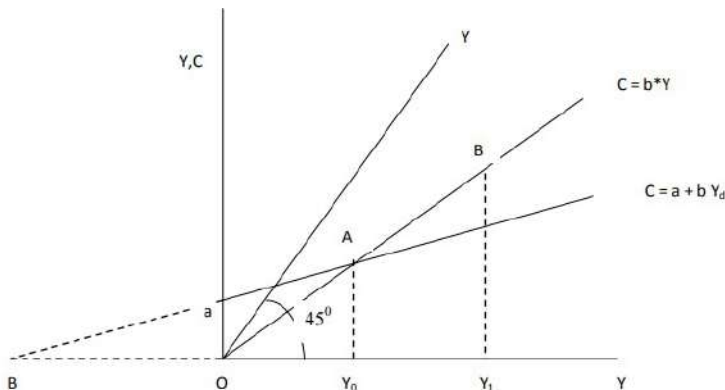
a. Teori Konsumsi

Teori yang dikemukakan oleh Keynes mengenai konsumsi dengan pendapatan banyak dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Teori-teori konsumsi tersebut meliputi (Suparmoko, 1991):

1. Hipotesis Pendapatan Absolut

Hipotesis ini menentukan konsumsi dengan tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Oleh karena itu, kurvanya selalu memotong sumbu vertikal. Berdasarkan pengalaman fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke atas sepanjang waktu sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang.

Gambar 9
Fungsi Konsumsi Jangka Pendek dan Jangka Panjang



Sumber: Suparmoko, 1991

Pada gambar di atas fungsi konsumsi jangka pendek $C = a + bY_d$ dan fungsi jangka panjang $C = bY$ dimana fungsi jangka panjang selalu melalui titik (titik O). Kurva jangka pendek yang linier APC semakin kecil apabila pendapatan naik dan MPCnya konstan. Kurva yang melalui titik O yaitu kurva konsumsi jangka panjang, lerengnya lebih tajam atau lebih tegak dari pada lereng konsumsi jangka pendek. MPC dan APC fungsi konsumsi jangka panjang selalu sama besar dan konstan, misalnya pada pendapatan nasional OY_0 , maka $APC = AY_0/OY_0$ dan juga $MPC = AY_0/OY_0$ pada pendapatan nasional OY_1 , maka $APC = BY_1/OY_1$ dan $MP = BY_1/OY_1$. Jadi APC konstan bila fungsi konsumsi melalui titik asal. Oleh karena itu, fungsi konsumsi jangka panjang APC dan MPC konstan dan $MPC = APC$.

Pergeseran fungsi konsumsi dari jangka pendek ke jangka panjang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, dan penduduk mengetahui bahwa penduduk kota konsumsinya lebih tinggi dari pada konsumsi desa. Jadi migrasi cenderung untuk meningkatkan konsumsi meskipun tidak ada peningkatan pendapatan.
- 2) Adanya barang produksi baru dalam perekonomian. Pendapatan konsumen tetap, namun bila ada barang baru maka konsumen akan terangsang untuk meningkatkan konsumsinya.
- 3) Adanya peningkatan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari tersedianya aktiva lancar terutama dalam bentuk uang tunai, deposito di bank serta tabungan.

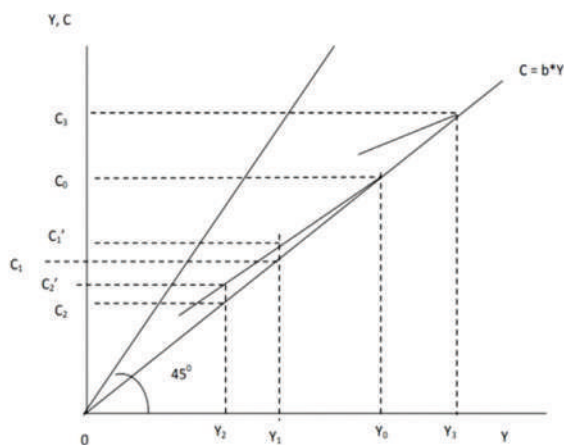
Hipotesis pendapatan absolut fungsi konsumsi yang menjadi dasar adalah fungsi konsumsi jangka pendek, kemudian fungsi jangka panjang dapat ditemukan karena adanya pergeseran ke atas dari fungsi konsumsi jangka pendek.

2. Hipotesis Pendapatan Relatif

Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan saat ini relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Konsumsi tetangga sekitarnya juga akan memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Akibatnya, apabila tingkat pendapatan individu itu bertambah tinggi maka konsumsi akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut. Sedangkan apabila tingkat pendapatan turun, konsumsi tidak akan turun secara proporsional mengikuti konsumsi jangka panjang, melainkan mengikuti fungsi jangka pendek. Jadi fungsi hipotesis dasar dari hipotesis pendapatan relatif adalah fungsi konsumsi jangka panjang. Pada konsumsi jangka pendek diperoleh dengan gerakan atau perubahan pendapatan dalam jangka pendek.

Gambar 10

Hipotesis Pendapatan Relatif dan Fungsi Konsumsi



Sumber : Suparmoko, 1991.

Pendapatan mula-mula adalah Y_0 , sehingga konsumsi setinggi C_0 menjadi C_1 tetapi turun dalam perbandingan yang lebih kecil yaitu menjadi C_1' . Hal ini terjadi karena orang biasanya ingin mempertahankan tingkat konsumsi semula. Jadi apabila pendapatan seseorang turun maka orang itu tidak akan menurunkan konsumsinya secara drastis, tetapi selalu berusaha mempertahankan tingkat konsumsi yang lama sehingga turunnya tidak langsung dari C_0 ke C_1 , tetapi C_0 ke C_1' yang ditunjukkan oleh kurva konsumsi jangka pendek.

Pada jangka panjang, akhirnya tingkat konsumsi kembali ke C_1 , jadi mula-mula pindah dari C_0 ke C_1' baru kemudian C_1 . Apabila pendapatannya turun lagi dari Y_1 ke Y_2 akan ada kurva jangka pendek lagi dan konsumsi turun dari C_1 ke C_2' mengikuti kurva konsumsi jangka pendek itu, baru kemudian ke C_2 yang terletak pada fungsi konsumsi jangka panjang.

3. Hipotesis Pendapatan Permanen

Hipotesis pendapatan permanen mengemukakan bahwa konsumsi saat ini tergantung pada pendapatan saat ini dan pendapatan yang dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Alasannya ialah bahwa sesungguhnya pendapatan aktual itu dapat diperinci menjadi pendapatan permanen dan pendapatan sementara, demikian juga dengan konsumsi yaitu konsumsi permanen dan konsumsi sementara dan dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = Y_p + Y_t$$

$$C = C_p + C_t$$

Keterangan:

Y = Pendapatan aktual

Y_p = Pendapatan Permanen

Y_t = Pendapatan Sementara

C = Konsumsi Aktual

C_p = Konsumsi Permanen

C_t = Konsumsi Sementara

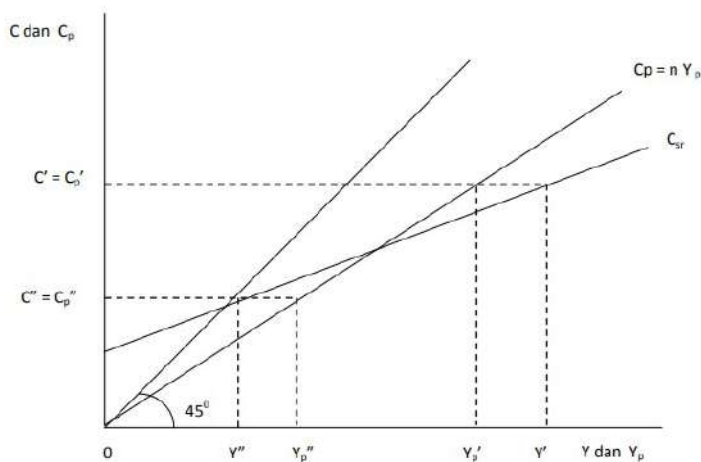
Pendapatan permanen adalah pendapatan rumah tangga yang dapat dikonsumsi jika tingkat kekayaan tetap. Pendapatan ini merupakan suatu rata-rata tertimbang dari pendapatan saat ini, dan pendapatan sementara merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan, yang nilainya dapat positif atau negatif.

Friedman menganggap bahwa konsumsi permanen (C_p) merupakan proporsi yang konstan dari pendapatan permanen (Y_p), atau dalam persamaan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C_p = nY_p \quad (0 < n < 1)$$

Friedman juga menganggap bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dan pendapatan permanen, serta antara konsumsi sementara dan konsumsi permanen, maupun konsumsi sementara dan pendapatan permanen. MPC dari pendapatan sementara sama dengan nol yang berarti bila konsumen menerima pendapatan sementara yang positif maka tidak akan memengaruhi konsumsi. Demikian juga yang negatif maka tidak akan mengurangi konsumsi.

Gambar 11:
Hipotesis Pendapatan Permanen dan Fungsi Konsumsi



Sumber: Suparmoko, 1991

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa puncak gelombang konjungtur pendapatan aktual (Y) lebih tinggi daripada pendapatan permanen (Y_p). Konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, maka konsumsi aktual C akan sama dengan konsumsi permanen C_p karena pada saat itu pendapatan permanen sebesar Y_p . Sepanjang fungsi konsumsi jangka pendek didasarkan pada pendapatan aktual dan konsumsi aktual, maka (Y, C) merupakan titik dalam fungsi konsumsi jangka pendek.

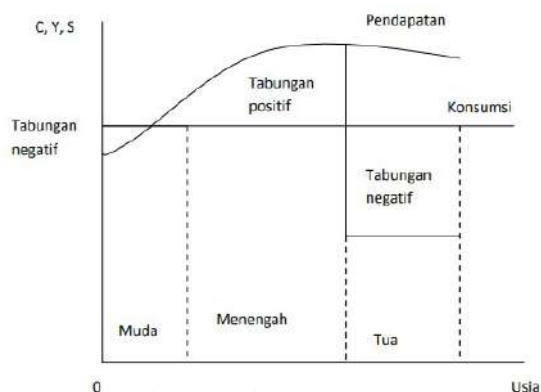
Pada saat di lembah konjungtur, maka konsumsi C sama dengan konsumsi permanen C_p yaitu konsumsi pada saat pendapatan permanen sama dengan Y_p , dan (Y, C) merupakan titik lain dalam fungsi konsumsi jangka pendek.

4. Hipotesis Siklus Hidup

Frano Modigliani dan teman-teman dari MIT dengan cara berbeda berusaha mengkompromikan hubungan positif antara tabungan dan pendapatan serta rasio tabungan tetap dalam jangka panjang. Modigliani memulai dengan menyatakan bahwa setiap individu akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan pola konsumsi yang stabil daripada harus mengalami kenaikan dan penurunan dalam konsumsi mereka. Modigliani melanjutkan dengan menyatakan bahwa orang akan berusaha untuk menstabilkan tingkat konsumsi mereka sepanjang masa hidupnya.

Seseorang cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah lagi pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif, orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan megambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah.

Gambar 12:
Hipotesis Siklus Kehidupan dan Konsumsi



Sumber: Suparmoko, 1991

Modigliani menganggap penting peranan kekayaan sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau peningkatan jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan keofisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan seperti perubahan dalam investasi, ekspor maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.

b. Faktor yang Memengaruhi Konsumsi

Pengeluaran konsumsi masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi ada faktor yang memengaruhi konsumsi antara lain (Sobri, 1982):

1. Distribusi penghasilan

Dalam pembagian pendapatan nasional, orang-orang dapat dibagi dalam dua golongan. *Pertama*, orang yang berpendapatan tinggi. *Kedua*, orang yang berpendapatan rendah. Apabila tambahan pendapatan diterima oleh mereka yang berpendapatan tinggi, bisa dikatakan tidak akan memengaruhi MPC, sebab sebagian pendapatan mereka akan ditabung.

Apabila tambahan pendapatan itu diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah, maka tambahan

pendapatan itu akan digunakan untuk memperbesar konsumsi. Dengan demikian, maka MPC pun akan bertambah.

2. Tingkat penghasilan tinggi

Pengeluaran konsumsi suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Dalam artian, bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat tidak mudah berkurang meskipun pendapatan masyarakat itu berkurang. Akibatnya masyarakat akan mengurangi saving.

Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi pun akan bertambah dengan lebih cepat. Kenyataan demikian akan terus berlangsung sampai pada tingkat pertambahan pendapatan itu setinggi pendapatan tertinggi yang telah dicapai semua. Selanjutnya apabila pendapatan terus bertambah, maka konsumsi dan saving akan bertambah.

3. Penghasilan yang mungkin akan diterima

Besarnya penghasilan yang mungkin atau penghasilan yang diperkirakan akan diterima di masa-masa mendatang seberapa besarpun akan berpengaruh pada besarnya konsumsi masa sekarang. Makin besar *income* seseorang, makin besar pula pengeluaran konsumsinya.

4. Jumlah penduduk

Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, maka pengeluaran konsumsi akan lebih besar daripada perekonomian yang penduduknya sedikit, meskipun jumlah pendapatan nasional masyarakat itu sama besarnya.

5. Barang-barang yang tahan lama di masyarakat

Pengaruh barang tahan lama di masyarakat bisa menambah pengeluaran konsumsi dan juga mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, seperti untuk nonton bioskop akan berkurang karena sudah mempunyai televisi, dan sebagainya.

6. Kebijakan finansial dan marketing dari perusahaan

Pembelian saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pada galibnya didorong oleh harapan-harapan bahwa pemegang saham itu akan menerima deviden. Besar deviden yang diterima oleh seseorang pemegang saham, bergantung pada kebijaksanaan finansial tiap-tiap perusahaan. *Financial policy* ini ada yang lebih mengarah pada penyamarataan deviden tiap-tiap tahun, ada yang mengarah pada besarnya deviden yang diberikan, tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan.

7. Sikap masyarakat terhadap kehematan

Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri terhadap sifat hemat. Makin hemat suatu masyarakat makin rendah MPCnya.

Asuransi jiwa, tabungan-tabungan dalam perusahaan, mengakibatkan menurunnya fungsi konsumsi. Tingkah laku seseorang terhadap kehematan dipengaruhi oleh pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting, antara konsumsi waktu sekarang dengan konsumsi waktu kemudian.

B. Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan

Konsumsi adalah permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa barang-barang konsumsi. Menurut Keynes, konsumsi didorong motif yang berasal dari diri manusia itu sendiri yang bersifat subyektif, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi seseorang dipengaruhi pendapatan yang diterima.

Adapun hubungan antara tabungan dan pendapatan menggambarkan fungsi tabungan. Secara matematis fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat ditulis sebagai berikut:

$$C = f(Y)$$

$$S = f(Y)$$

Besarnya konsumsi pada saat pendapatan sama dengan nol ($Y = 0$) disebut konsumsi otonom. Dengan demikian, secara matematis fungsi konsumsi tersebut dapat ditulis:

$$C = a + bY$$

Keterangan:

C = pengeluaran untuk konsumsi

a = besarnya konsumsi pada saat pendapatan tidak ada (sama dengan nol) dan disebut konsumsi otonom

b = hasrat berkonsumsi marginal (*marginal propensity consume* = MPC), yaitu $\frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$

Y_d = pendapatan disposebel

Average Propensity of consume (APC) atau hasrat berkonsumsi rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$a = (APC - MPC) Y_d$$

Adapun b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$APC = \frac{C}{Yd}$$

Jika fungsi konsumsi diketahui, fungsi tabungan dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Yd}$$

Jika

$$C = a + bY$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (a + bY)$$

$$= Y - a - bY$$

$$= -a + (1 - b)Y$$

Dengan demikian secara matematis fungsi tabungan dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = -a + (1 - b)Y$$

Hubungan antara MPC dan MPS atau *Marginal Propensity to Invest* (MPI) sebagai berikut:

$$MPC + MPS = 1 \text{ atau } MPC + MPI = 1 \text{ dan } MPI =$$

Tingkat pendapatan *Break Even Point* (BEP) atau *Break Even Income* (BEY) atau titik impas adalah tingkat pendapatan yang habis digunakan untuk konsumsi.

$$Y = C$$

Keterangan:

Y = tingkat pendapatan

C = konsumsi

Angka pengganda adalah angka yang menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Rumus angka pengganda (k), yaitu sebagai berikut:

$$k = \frac{1}{1-MPC} \text{ atau } k = \frac{1}{MPS}$$

Keseimbangan ekonomi atau pendapatan keseimbangan adalah tingkat pendapatan pada saat besarnya tabungan habis digunakan untuk investasi.

S-1

Keterangan:

S = fungsi tabungan

I = investasi

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan yang telah terkumpul
2. Tingkat bunga
3. Sikap berhemat
4. Keadaan perekonomian
5. Distribusi pendapatan
6. Ketersediaan dana pensiun

C. Investasi (Penanaman Modal)

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001:284). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai

penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bemanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supriyono, 1987: 424). Investasi dapat juga didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003: 2).

Umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Halim. 2003: 2):

1. Investasi pada *financial assets*

Investasi pada *financial assets* dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya.
- 2) Investasi pada *financial assets* yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lain sebagainya.

2. Investasi pada *real asset*

Investasi pada *real asset* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan petambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Investasi pada *real asset* termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun. Dengan demikian *capital budgeting* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena (Riyanto, 1995: 121):

- 1) Daya yang dikeluarkan akan terkait untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
- 2) Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.
- 3) Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.
- 4) Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

a. Jenis-Jenis Investasi

Investasi dapat dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut (Mulyadi, 2001):

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (*non-profit investment*)

Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya, karena air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi jika dilarikan keluar pabrik akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah, sebelum air limbah dibuang ke luar pabrik.

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (*non-measurable profit investment*)

Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh adalah pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan.

3. Investasi dalam penggantian ekuipmen (*replaement investment*)

Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Penggantian mesin biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya (biaya diferensial) yang akan diperoleh atau adanya kenaikan

produktivitas (pendapatan diferensial) dengan adanya penggantian tersebut.

4. Investasi dalam perluasan usaha (*expansion investment*)
Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aktiva diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial (yang merupakan selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial) yang jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah taksiran laba masa yang akan datang (yang merupakan selisih pendapatan dengan biaya) dan kembalian investasi (*return on investment*) yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut.

b. Tujuan investasi

Tujuan perusahaan mengadakan investasi pada umumnya adalah:

1. Untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan atau kegiatan perusahaan lain.
2. Untuk memperoleh pendapatan yang tepat secara terus menerus.
3. Untuk membentuk suatu dana guna tujuan tertentu.
4. Untuk membina hubungan baik dengan perusahaan lain.
5. Untuk tujuan-tujuan lainnya.

Tentu saja investasi juga perlu diatur agar tidak terjadi *over investment* atau *under investment*. Pengaturan investasi modal

yang efektif perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini (Husnan, 1985: 195):

1. Adanya usul-usul investasi.
2. Penaksiran aliran kas dari usul-usul investasi tersebut.
3. Evaluasi aliran kas tersebut.
4. Memilih aliran kas tersebut.
5. Memilih proyek-proyek sesuai dengan ukuran tertentu, dan
6. Penilaian terus menerus terhadap proyek investasi setelah proyek tersebut diterima.

c. Aspek Penting Perencanaan dalam Investasi Pengeluaran Modal

Ada beberapa aspek penting perencanaan dalam investasi pengeluaran modal, yaitu (Gunawan Adisaputri dan Yunita Anggraini, 2007: 323):

1. Investasi pada aktiva tetap akan mengikat perusahaan untuk jangka waktu lama, sehingga keputusan yang keliru akan memberikan dampak beban tetap jangka panjang dalam bentuk:
 - 1) Biaya depresiasi yang berat
 - 2) Beban bunga modal pinjaman bila pembelanjaan aktiva itu sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman bank yang memiliki pengaruh besar terhadap arus kas.
2. Apabila kapasitas mesin yang dipilih terlalu besar dan tidak dapat dimanfaatkan secara memadai, maka akibatnya biaya tetap per unit produk akan meningkat. Hal ini jelas berpengaruh terhadap kemampuan bersaing produk

perusahaan itu di pasar. Sehingga secara luas pula pengaruhnya terhadap prospek perusahaan selama bertahun-tahun.

3. Adanya kesulitan untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar aktiva tetap bekas pakai.
4. Investasi aktiva tetap umumnya membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga memengaruhi kebutuhan dana secara keseluruhan. Oleh karenanya akan memengaruhi risiko usaha maupun risiko keuangan yang dihadapi perusahaan.
5. Oleh karena investasi membutuhkan tambahan modal yang besar, kerap kali tidak dapat dipenuhi oleh sumber internal (modal sendiri).
6. Kekeliruan pemilihan kapasitas yang tepat akan membawa akibat yang lama dan panjang terhadap biaya (*cost*) per unit produk, harga jual, keuntungan dan daya saing perusahaan.

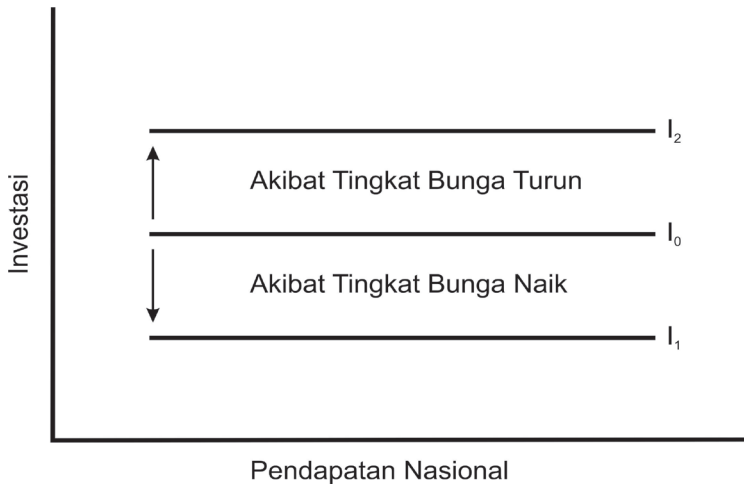
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diperlukan perencanaan yang teliti dan cermat sebelum keputusan investasi akan diambil.

d. Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan **fungsi investasi**. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, ia sejajar dengan sumbu datar. *Kedua*, bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan (yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi investasi). Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan **investasi otonomi**. Sedangkan investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan **investasi terpengaruh**. Dalam analisis ekonomi makro biasanya diumpamakan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonom.

Mengapa dalam analisis makro ekonomi yang diperhatikan adalah investasi otonom? Untuk memperoleh jawabannya terlebih dahulu perlu didefinisikan apa itu investasi otonom. Investasi otonom berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan pada pandangan ini maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti yang digambarkan oleh kurva I_0 , I_1 dan I_2 , sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 13:
Fungsi Investasi dan Tingkat Bunga



Analisis ekonomi makro tidaklah mengabaikan pengaruh tingkat pendapatan nasional terhadap investasi. Tetapi, ahli-ahli ekonomi menganggap bahwa faktor itu bukanlah faktor paling penting yang menentukan tingkat investasi. Menurut mereka, investasi paling banyak ditentukan oleh tingkat bunga. Apabila tingkat bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang, sebaliknya

tingkat bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Akibat tingkat bunga terhadap investasi ini digambarkan dalam kurva I_1 dan I_2 . Contoh, apabila tingkat bunga adalah r_0 jumlah investasi adalah I_0 . Selanjutnya, misal, jika tingkat bunga turun ke r_2 , maka akan menyebabkan bertambahnya investasi, misalnya menjadi I_2 . Sebaliknya, apabila tingkat bunga naik menjadi r_1 akan terjadi penurunan investasi, yaitu menjadi I_1 .

e. Penentu-Penentu Tingkat Investasi

Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga), yang membelanjakan sebagian besar dari pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, penanaman-penanaman modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh sangat besar perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha.

Di samping harapan bahwa pada suatu saat akan memperoleh keuntungan, terdapat beberapa faktor lain yang akan menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah:

- 1) Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
- 2) Tingkat bunga.
- 3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
- 4) Kemajuan teknologi.
- 5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
- 6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Bagaimana berbagai faktor di atas akan memengaruhi kegiatan investasi akan diuraikan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

D. Investasi, Keuntungan dan Tingkat Bunga

Meskipun faktor-faktor penting yang menentukan jumlah investasi para pengusaha terdiri dari enam faktor di atas, dua diantaranya mempunyai kesanggupan untuk menerangkan mengenai sebab-sebabnya perubahan tingkat investasi yang lebih penting dari faktor-faktor lainnya. Faktor tersebut adalah tingkat keuntungan yang diramalkan dan tingkat bunga.

Peramalan adalah suatu cara untuk mengukur atau menafsir kondisi bisnis di masa mendatang (Adisaputro, 1990). Peramalan ini biasanya dilakukan semaksimal mungkin agar bisa meminimalisir kesalahan dalam memperkirakan keadaan di masa yang akan datang. Perlu diingat di sini, bahwa peramalan ini bukan mengukur suatu di masa yang akan datang dengan hasil yang pasti, melainkan sekadar usaha mengurangi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam melakukan peramalan, terdapat kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknik peramalan. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Waktu yang hendak diliputi, yakni rentang waktu masa datang dari jangkauan peramalan. Pada umumnya peramalan kualitatif memiliki rentang waktu yang lebih panjang dibanding dengan peramalan kuantitatif.
2. Tingkah laku data, meliputi jumlah, ketepatan dan tingkah laku data masa lalu yang tersedia. Apakah tingkah laku data menunjukkan hubungan persamaan linear, kuadrat

ataukah logaritma dan atau yang lain akan memengaruhi teknik peramalan yang digunakan.

3. Tipe model, yakni apakah model yang digunakan merupakan model *time series*, kausalitas ataukah model lain yang lebih kompleks dan canggih akan memengaruhi pemilihan teknik peramalan.
4. Biaya yang tersedia untuk maksud peramalan ini dan lebih luas biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek.
5. Tingkat ketepatan yang diinginkan, hal ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian peramalan yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat ketelitian yang diharapkan mungkin memerlukan penggunaan teknik peramalan yang lebih kompleks, demikian pula biaya yang perlu disediakan.
6. Kemudian penerapan, dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen, data, dan biaya yang tersedia.

Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang kelihatannya mempunyai prospek yang baik dan dapat dilaksanakan, serta besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan.

Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari penanaman modal itu, yaitu persentase keuntungan neto (tetapi sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar) modal yang diperoleh

lebih besar dari tingkat bunga. Oleh sebab itu, ditekankan kepada menunjukkan peranan tingkat bunga dalam menentukan tingkat investasi dan akibat perubahan tingkat bunga terhadap investasi dan pendapatan nasional.

Meskipun seorang pengusaha memiliki tabungan yang cukup dan oleh karenanya tidak perlu meminjam dari suatu lembaga keuangan untuk membiayai investasi yang ingin dilaksanakan, hal itu belum menjadi syarat yang cukup bagi terciptanya kegiatan investasi. Pengusaha tersebut mempunyai dua pilihan dalam menggunakan tabungannya, meminjamkan/membungakan uang tersebut atau menggunakannya untuk investasi.

Dalam keadaan di mana pendapatan yang akan diperolehnya lebih kecil dari tingkat bunga, maka pengusaha tersebut akan memilih membungakan uangnya dan membatalkan maksud untuk melakukan investasi. Jika ia harus meminjam uang dari sebuah lembaga keuangan, pengusaha itu harus bertindak dengan lebih berhati-hati lagi. Investasi yang direncanakannya akan dilaksanakan hanya apabila tingkat keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar. Hanya dalam keadaan seperti itu pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan dari usahanya.

1. Tingkat Pengembalian Modal

Ada beberapa landasan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk investasi. Menurut Mangkoesebroto (1998: 82), pertimbangan pertama dalam memilih suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku, tingkat pengembalian (*rate of return*) dari barang modal, dan prospek harapan berkembangnya proyek investasi.

Pembelian barang modal tidak selamanya berarti investasi. Investasi adalah penambahan barang modal secara neto positif. Kriteria pengambilan keputusan untuk pembelian barang modal adalah dengan melihat tingkat pengembalian (*rate of return*) dari barang modal tersebut. Apabila tingkat pengembalian suatu barang modal A lebih besar dari tingkat pengembalian dari barang B jenis lain, maka barang modal pertama (A) yang dibeli. Arsyad (1999: 258) menyatakan bahwa pemahaman tentang penilaian suatu proyek pembangunan menurut pemahaman juga pada kriteria investasi. Kriteria investasi ini menyangkut prinsip-prinsip yang mendasari proses pengalokasian investasi dengan cara rasional agar pendapatan nasional dan daerah dapat dimaksimumkan. Pengambilan keputusan investasi mempunyai 2 (dua) orientasi, yaitu sisi pemerintah (*public sector*) dan sisi swasta (*private sector*).

Kriteria investasi swasta didasari orientasi maksimasi laba sementara kriteria investasi pemerintah orientasi utamanya adalah maksimalisasi kesejahteraan masyarakat (publik). Namun demikian, ada juga kesamaan prinsip antara keduanya, yaitu bagaimana memilih proyek yang memberikan manfaat (*benefit*) terbesar dengan biaya yang tertentu di antara berbagai rencana proyek yang ada.

Seperti diungkapkan di atas pada umumnya perusahaan swasta memproduksi semata-mata didorong oleh maksimasi laba. Seringkali pilihan investasi swasta ditanamkan pada proyek-proyek yang kurang menunjang pembangunan ekonomi makro secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan alokasi investasi tersebut dan memengaruhi arah investasi swasta ke arah proyek yang berorientasi pada pembangunan ekonomi makro nasional dan daerah secara langsung. Untuk ini, pilihan yang tersedia bagi

pemerintah adalah antara teknologi padat modal dan teknologi padat karya.

Pada dasarnya kriteria investasi merupakan alat analisis untuk menentukan apakah suatu proyek layak (*feasible*) untuk dilaksanakan atau harus ditunda. Proyek dapat dilaksanakan jika dalam analisis investasi diketahui manfaat bersih (*benefit netto*) lebih besar dari manfaat bersih marginal (*marginal benefit netto*) dari proyek tersebut, demikian juga sebaliknya.

Dalam kaitan ini, Arsyad (1999:258-283) menyatakan para ekonom dan ahli keuangan telah mengemukakan sejumlah kriteia investasi seperti, *pertama*, kaidah nilai sekarang bersih (*Net Present Value/NPV*). *Kedua*, kaidah *Internal Rate of Return* (IRR). *Ketiga*, *capital rationing*. *Keempat*, kriteria perputaran modal juga sering disebut kriteria maksimalisasi output per unit modal atau kriteria rasio output terhadap modal. Menurut Chenery kriteria ini bermanfaat untuk memilih antara beberapa proyek dalam sektor tertentu. *Kelima*, kriteria produktivitas marginal sosial dari Kahn dan Chenery. *Keenam*, kriteria reinvestasi dari Galenson dan Leibenstein (1955) yang sempat dikritik Amartya Sen (1967). *Ketujuh*, kriteria deret waktu (*Time Series*).

Berbagai kriteria investasi yang dikemukakan di atas tidak ada yang berbeda dalam tujuan akhirnya, yaitu maksimalisasi output nasional. Hanya cara pendekatannya yang berbeda. Untuk maksimalisasi output total para ahli ekonomi menggunakan berbagai komponen pendapatan nasional: konsumsi, tabungan, dan investasi. Ada yang memberi tekanan lebih banyak pada salah satu komponen. Beberapa kriteria investasi bertujuan memaksimalkan output total satu titik waktu, sedang yang lain mencakup periode waktu.

Masih menurut Arsyad (1999: 287) semua kriteria itu tidaklah lengkap karena semua kriteria tersebut telah mengabaikan pengaruh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk, selera, kemajuan teknis, kondisi pasar, distribusi pendapatan, perubahan harga, keadaan neraca pembayaran, dan kondisi sosial budaya pada tingkat investasi. Sebaliknya, kriteria-kriteria tersebut di atas juga tidak membahas dampak investasi pada faktor-faktor ini.

Bahkan, penggunaan teknik input-output dan konsep harga dan biaya bayangan pun tidak berhasil memecahkan masalah ini secara memuaskan. Namun, di samping keterbatasan teoritis dan praktis yang nampak ini, berbagai kriteria investasi tersebut semakin banyak digunakan di dalam menyusun program alokasi sumber daya di hampir semua negara sedang berkembang di dunia termasuk Indonesia. Tetapi, yang penting adalah bahwa kriteria-kriteria tersebut harus sesuai tujuan sosial ekonomi negara bersangkutan.

Landasan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dapat digunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan nilai sekarang (*Net Present Value*). *Kedua*, pendekatan tingkat pengembalian modal (Sukirno, 2007: 370-373). Nilai sekarang dapat diartikan sebagai nilai sejumlah uang tertentu di masa depan yang dinyatakan sebagai nilai di masa kini. Sedangkan tingkat pengembalian modal dinyatakan dalam persen, dan ia menggambarkan tingkat keuntungan per tahun dari modal yang diinvestasikan. Persamaan nilai sekarang dan persamaan tingkat pengembalian modal sebagai berikut:

Persamaan Nilai Sekarang (*Net Present Value*)

$$PV = \frac{Y_1}{(1+r)^1} + \frac{Y_2}{(1+r)^2} + \frac{Y_3}{(1+r)^3} + \frac{Y_n}{(1+r)^n}$$

Keterangan:

PV = adalah nilai sekarang pendapatan yang diperoleh di antara tahun 1 hingga tahun n, apabila dimisalkan investasi tersebut didepresiasi pada tahun n.

$Y_1, Y_2 \dots Y_n$ = adalah pendapatan netto (keuntungan) yang diperoleh perusahaan antara tahun 1 hingga tahun n. R adalah tingkat bunga (Sukirno, 2007: 370-373)

Jika nilai sekarang modal yang diinvestasikan adalah M, penanaman modal tersebut dikatakan menguntungkan apabila nilai sekarang (PV) lebih besar dari M.

Persamaan Tingkat Pengembalian Modal

$$M = \frac{Y_1}{(1+R)^1} + \frac{Y_2}{(1+R)^2} + \frac{Y_3}{(1+R)^3} \dots + \frac{Y_n}{(1+R)^n}$$

Keterangan:

PV = adalah nilai modal yang diinvestasikan

$Y_1, Y_2 \dots Y_n$ = adalah pendapatan netto (keuntungan) diperoleh dari tahun 1 hingga tahun ke n

R = Adalah tingkat pengembalian modal

Dalam persamaan nilai modal, nilai yang akan dihitung adalah tingkat pengembalian modal (R), karena M dan Y_1 hingga Y_n sudah diketahui nilainya. Suatu investasi dipandang menguntungkan apabila nilai R lebih besar daripada tingkat bunga.

Kedua pendekatan tersebut bersifat komplementer artinya yang satu melengkapi yang lainnya. Dalam pendekatan nilai

sekarang seorang pengusaha (investor) dapat dengan cepat mengetahui perbedaan nilai di antara investasi yang dilakukan dengan nilai sekarang dari aliran pendapatan netto yang akan diterima di masa datang.

Adapun pendekatan tingkat pengembalian modal dapat menunjukkan besarnya perbedaan di antara suku bunga yang berlaku dengan tingkat pengembalian modal dari proyek yang direncanakan. Dalam teori ekonomi, kedua pendekatan ini penting, karena ia dapat membantu menerangkan hubungan di antara suku bunga dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu.

Ada dua faktor utama yang memengaruhi volume investasi yaitu suku bunga (*the rate of interest*) dan *marginal efficiency of capital* (MEC), seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Suku bunga adalah tingkat harga dari uang, seberapa persenkah akan dikembalikan/dibayarkan karena dipakainya uang. Dua kekuatan ini akan terjadi tarik menarik serta saling berpengaruh dalam menentukan volume investasi (Rosyidi, 2004: 176).

Tingkat pengembalian suatu barang modal disebut *Marginal Efficiency of Capital* (MEC atau r). Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian suatu barang modal ($MEC = r$) dapat dilakukan dengan jalan mencari diskonto yang menyamakan antara harga barang modal dengan pendapatan-pendapatan yang diharapkan dari pengoperasian barang modal tersebut ditambah nilai sisanya.

Keputusan untuk membeli barang modal (*investasi riil*) menurut Keynes dalam Rosyidi (2004: 177) menyatakan bahwa investasi tergantung dari tingkat bunga yang dibandingkan MEC

(*Marginal Efficiency of Capital*) yang menunjukkan keuntungan pembelian suatu barang modal. Tingkat bunga menunjukkan biaya modal yang dipinjam, atau menunjukkan biaya oportunitas bagi pemilik modal. Adapun kriteria pengambilan keputusan dilaksanakan atau tidaknya suatu jenis investasi riil dapat berpatokan pada kriteria di bawah ini:

- Apabila $r > i$: proyek investasi tersebut layak dilaksanakan karena menguntungkan.
- Apabila $r = i$: proyek investasi boleh dilaksanakan atau tidak, tergantung prospek di masa mendatang dari investasi tersebut.
- Apabila $r < i$: investasi tidak layak untuk dilaksanakan karena merugi.

Di mana r dalam keuntungan (*revenue*) yang diperoleh selama periode investasi dilaksanakan atau disebut MEC (*Marginal Efficiency of capital*). Adapun i adalah suku bunga (*interest*). Semakin tinggi MEC dari suatu proyek investasi, makin besar pula kemungkinan proyek investasi tersebut memberikan keuntungan bagi investor. Keputusan untuk membeli barang modal tidak hanya tergantung pada MEC (atau nilai r) akan tetapi juga tergantung dari tingkat bunga ($i = \text{external rate of return}$) yang besar kecilnya ditentukan oleh faktor luar, yaitu sektor perbankan.

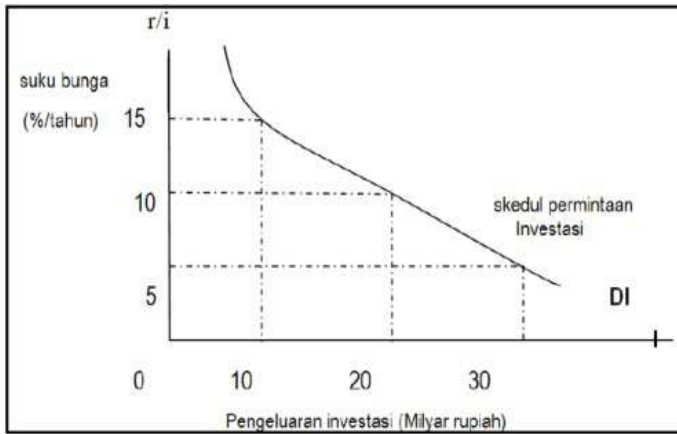
Menurut Samuelson (2004: 140), kekuatan yang berada di balik keputusan investasi sebagai berikut. Bisnis investasi untuk memperoleh laba. Karena barang dan modal dapat bertahan bertahun-tahun. Keputusan investasi bergantung, *pertama*, permintaan untuk output yang dihasilkan oleh investasi baru. *Kedua*, suku bunga dan pajak yang memengaruhi biaya investasi. *Ketiga*, ekspektasi bisnis mengenai keadaan perekonomian.

Bahwa komponen investasi itu bisa berupa investasi sosial, investasi pemerintah, dan investasi tidak berwujud dalam bentuk investasi modal manusia dan peningkatan pengetahuan. Mengapa seseorang atau pemerintah berinvestasi, tentu berharap bahwa keputusan investasi itu akan memberikan laba (profit), yaitu membawa hasil lebih besar daripada biaya investasi (*cost*).

Samuelson (2004: 141) menyatakan ada tiga elemen penting penentu dalam berinvestasi. *Pertama*, hasil (*revenue*). *Kedua*, biaya (*cost*) dan *ketiga*, ekspektasi (*expectation*). Penentu pertama investasi akan memberikan seseorang atau pemerintah hasil tambah jika investasi dapat membantu menghasilkan lebih banyak produk. Penentu kedua dari investasi itu adalah biaya berinvestasi. Para investor seringkali mengumpulkan dana untuk membeli barang-barang modal dengan cara meminjam. Biaya pinjaman ini biasanya berupa suku bunga. Suku bunga merupakan harga yang dibayar untuk meminjam uang untuk suatu periode waktu tertentu.

Pajak juga berpengaruh penting terhadap investasi. Jika suku bunga pinjaman dan tarif pajak diturunkan, respon para investor akan ramai-ramai meningkatkan investasinya di berbagai sektor sesuai yang diinginkan. Sebaliknya, jika tarif pajak dan suku bunga meningkat, para investor akan mengurangi di sektor riil yang selanjutnya mungkin akan mengalihkan dananya ke sektor finansial. Kurva permintaan investasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 14: Kurva Permintaan Investasi



Sumber: Samuelson (2004: 142)

Elemen ketiga penentu investasi adalah ekspektasi laba dan kepercayaan bisnis. Investasi merupakan spekulasi atas masa depan. Dengan harapan bahwa revenue dari suatu investasi akan melebihi biayanya. Investor akan terdorong berinvestasi di daerah tersebut jika ada kepercayaan bisnis, karena pada prinsipnya bagaimana para investor memperkecil risiko dan ketidakpastian.

Kepercayaan bisnis tersebut misalnya adanya kepastian hukum, adanya regulasi kepada para investor untuk mengembangkan bisnisnya di daerah. Misalnya perizinan yang tidak berbelit-belit memperpanjang jalur birokrasi, sehingga kesannya mempersulit datangnya para investor di daerah.

2. Efisiensi Modal Marginal

Marginal Efficiency of capital (MEC) dapat didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan *present value* dari penghasilan dengan harga barang modal. Menurut pendekatan ini, suatu

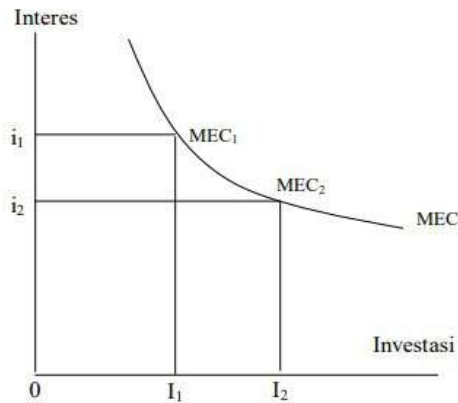
proyek investasi akan dilaksanakan apabila MEC lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku dipasar. Dari MEC dapat diperoleh efisiensi marjinal investasi (MEI) yang memperlihatkan hubungan antara investasi dengan tingkat bunga. Berdasarkan konsep MEI ini, dengan stok kapital tertentu, investasi bersih (*net investment*) berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah investasi dan sebaliknya.

Ahli-ahli ekonomi klasik menetapkan penerapan tingkat suku bunga sebagai pertimbangan untuk mengadakan investasi. Jika tingkat suku bunga lebih besar dari hasil pendapatan investasi (tingkat pengembalian modal), maka investasi tidak menguntungkan untuk dilakukan. Keynes mengatakan, masalah investasi baik ditinjau dari penentuan jumlahnya maupun kesempatan untuk mengadakan investasi itu sendiri, didasarkan pada konsep *marginal efficiency of capital* (MEC).

Investasi akan dilakukan oleh investor bila MEC yang diharapkan masih lebih besar atau tinggi dari tingkat bunga yang berlaku. Jadi jelas pertimbangan Keynes untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisiensi marjinal (MEC) dari investasi itu sendiri. Efisiensi marjinal dari modal atau investasi sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan pertimbangan investor terhadap perkembangan situasi perekonomian pada masa yang akan datang.

Hubungan antara MEC, investasi dan tingkat bunga dapat dilihat dari MEC yang menurun, dimana garis ini memperlihatkan jumlah investasi yang terlaksana pada tingkat bunga yang berlaku.

Gambar 15
Hubungan Tingkat Bunga dengan Investasi



Dari gambar di atas dapat dilihat, pada tingkat bunga i_1 tingkat investasi yang terjadi I_1 begitu juga posisi MEC_1 , pada tingkat bunga i_2 posisi investasi adalah I_2 , sedangkan MEC akan menurun pada posisi MEC_2 . Adapun penurunan garis MEC disebabkan oleh:

1. Semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana, makin rendahnya *marginal efficiency of capital* perusahaan investasi pada sektor-sektor ekonomi akan menyebabkan penurunan MEC sektor-sektor ekonomi tersebut.
2. Semakin banyak investasi yang terlaksana, maka biaya dari barang modal akan menjadi lebih tinggi dibebankan pada produksi. Sehingga pengusaha akan berusaha merebut pasar dengan menurunkan harga, ini menyebabkan terjadinya penurunan MEC di setiap sektor ekonomi.

3. Tingkat Suku bunga

Hubungan antara investasi dan suku bunga bersifat kebalikan, yaitu apabila suku bunga tinggi maka gairah perusahaan untuk

melakukan investasi turun dan sebaliknya apabila suku bunga rendah maka gairah untuk melakukan investasi meningkat. Hubungan antara investasi dan suku bunga bersifat demikian oleh karena alasan penting dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Sehingga tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh dan mengurangi gairah pada pengusaha untuk melakukan penanaman modal. Semakin rendah suku bunga semakin tinggi prospek untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini akan meningkatkan gairah para pengusaha untuk melakukan investasi.

Tingkat suku bunga terbentuk di pasar sebagai akibat interaksi kekuatan pasar uang dan modal. Sunariyah (2004) menguraikan fungsi-fungsi tingkat bunga pada suatu perekonomian negara, yaitu:

1. Sebagai daya tarik bagi penabung baik individu, institusi atau lembaga yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.
4. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat bunga untuk meningkatkan produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi.

a) Jenis-Jenis Suku Bunga

Dalam realitas sehari-hari terdapat berbagai jenis suku bunga.

Jenis-jenis suku bunga ini dapat dikelompokkan menjadi empat jenis suku bunga, yaitu:

- 1) Suku Bunga Dasar (*Bank Rate*), yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral atau kredit yang diberikan oleh perbankan dan tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral untuk mendiskontokan surat-surat berharga yang ditarik atau diambil oleh bank sentral. Dengan perhitungan tingkat suku bunga ini juga dipakai oleh bank komersial untuk menghitung suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabahnya.
- 2) Suku Bunga Efektif (*Effective Rate*), yaitu tingkat suku bunga yang atas harga beli suatu obligasi. Semakin rendah harga pembelian suatu obligasi dengan tingkat bunga nasional tertentu, maka semakin tinggi tingkat bunga efektifnya dan sebaliknya. Jadi, ada hubungan terbalik antara harga yang dibayarkan untuk obligasi dengan tingkat bunga efektifnya.
- 3) Suku Bunga Nominal (*Nominal Rate*), yaitu tingkat suku bunga yang dibiarkan tanpa dilakukan penyesuaian terhadap akibat-akibat inflasi.
- 4) Suku Bunga Pedoman (*Equivalent Rate*), yaitu tingkat suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (harga harian), setiap minggu (harga mingguan), setiap tahun (harga tahunan), untuk sejumlah pinjaman atau investasi secara jangka waktu tertentu, yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga) akan menawarkan penghasilan bunga dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat (dalam hubungan dengan

nasabah), maka suku bunga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank yang merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh: Giro, bunga tabungan dan bunga deposito.
- 2) Bunga Pinjaman, yaitu bunga atau harga yang diberikan oleh nasabah (pinjaman) kepada bank atas dana pinjaman yang diberikan kepadanya.

b) Teori Suku Bunga

Mengenai suku bunga ada beberapa teori yang mengemukakan hal tersebut, antara lain:

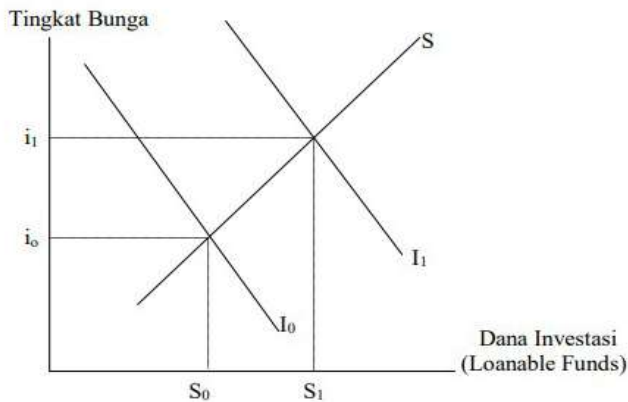
1) Teori Klasik

Bunga adalah “harga” dari penggunaan *loanable funds*, terjemahan langsung dari istilah ini adalah dana yang tersedia untuk “dipinjamkan,” atau disebut “dana investasi” sebab menurut teori klasik bunga adalah harga-harga yang terjadi di “pasar” dana investasi.

Dalam suatu periode ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk konsumsi selama periode tersebut. Mereka ini adalah kelompok “penabung.” Bersama-sama jumlah seluruh tabungan mereka membentuk suplai/penawaran akan *loanable funds*. Dilain pihak, dalam periode yang sama ada anggota masyarakat yang membutuhkan dana, mungkin mereka ingin mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diterima selama periode tertentu. Dengan kata lain, mereka digolongkan

pengusaha yang membutuhkan dana untuk operasi perluasan usahanya. Mereka ini adalah investor. Jumlah dari seluruh kebutuhan mereka akan dana membentuk permintaan akan *loanable funds* selanjutnya para penabung dana para investor ini akan bertemu di pasar *loanable funds*, dan dari proses tawar-menawar antara mereka akhirnya akan dihasilkan kesepakatan/keseimbangan. Terjadinya tingkat bunga keseimbangan dipasar dan investasi *loanable funds* dalam suatu periode dapat dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 16
Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga



Keseimbangan tingkat bunga ada pada titik I_0 , dimana jumlah tabungan sama dengan investasi. Apabila tingkat bunga I_0 , jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para penabung akan saling bersaing untuk meminjam dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun balik ke posisi I_0 . Sebaliknya, apabila tingkat bunga i_0 , para pengusaha akan bersaing memperoleh dana yang relatif lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke i_0 .

2) Teori Keynes

Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter yang artinya tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan memengaruhi kegiatan ekonomi (GNP) sepanjang uang itu memengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan memengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, dengan demikian akan memengaruhi GNP (*gross national product*). Sedangkan menurut kaum klasik, uang hanyalah memengaruhi harga barang (teori kuantitas uang).

Dalam hal ini ada tiga motif mengapa orang menghendaki memegang uang tunai, yaitu meliputi:

- Motif Transaksi

Keynes tetap menerima pendapat golongan cambridgo bahwa orang memegang uang tunai guna memenuhi dan melancarkan transaksi yang dilakukan dan permintaan masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional, semakin besar volume transaksi, maka semakin besar pula kebutuhan uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi.

- Motif Berjaga-jaga

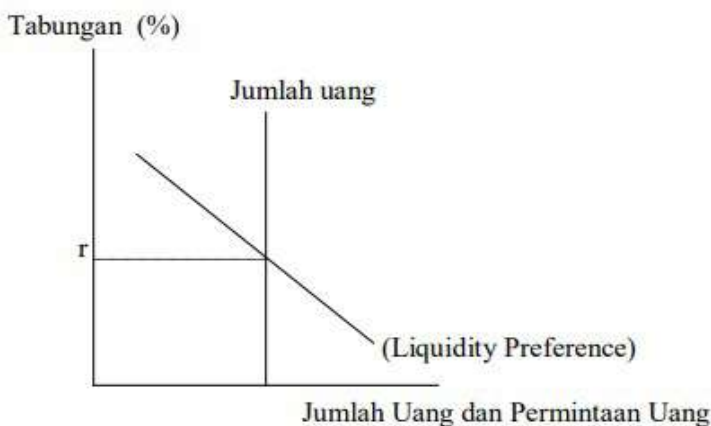
Keynes membedakan permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran-pembayaran tidak reguler, atau yang di luar rencana transaksi normal. Misalnya, untuk pembayaran keadaan-keadaan darurat seperti kecelakaan, sakit dan pembayaran yang tidak terduga tersebut, karena sifat uang yang likuid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang lain.

- Motif Spekulasi

Sesuai dengan namanya, motif dari memegang uang ini adalah terutama untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya pemegang uang tersebut meramal apa yang terjadi di waktu yang akan datang dengan betul. Teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan untuk tujuan spekulasi. Permintaan besar apabila tingkat bunga rendah, dan apabila tingkat bunga tinggi permintaan kecil, orang perlu memegang uang tunai dan karena kegiatan spekulasi tersebut mendapat keuntungan, maka orang akan bersedia membayar harga tertentu untuk memegang uang tunai.

Permintaan akan uang menurut Keynes disebut dengan “*Liquidity Preference*.” Harga tergantung dari tingkat bunga. Sumbu horizontal dalam gambar di bawah mengukur jumlah dan permintaan uang dengan sumbu vertikal untuk tingkat bunga.

Gambar 17
Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga



Permintaan akan uang memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Keynes mengatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun di bawah tingkat bunga normal, makin banyak orang yakin bahwa tingkat bunga akan naik di waktu yang akan datang.

Jika mereka memegang surat berharga di waktu suku bunga naik, maka harganya akan turun dan mereka akan menderita kerugian (*capital loss*). Mereka akan menghindari kerugian ini dengan mengurangi surat berharga yang dipegangnya dengan sendirinya menambah uang kas yang dipegangnya pada waktu tingkat bunga naik. Hubungan permintaan negatif dengan tingkat bunga juga berkaitan dengan ongkos memegang uang kas (*opportunity cost holding money*). Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula ongkos memegang uang kas (dalam bentuk tingkat bunga yang tidak diperoleh karena kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas). Sehingga keinginan memegang uang kas juga menurun, sebaliknya jika tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas juga makin rendah sehingga permintaan uang kas juga naik.

c) Suku Bunga dan Tingkat Investasi

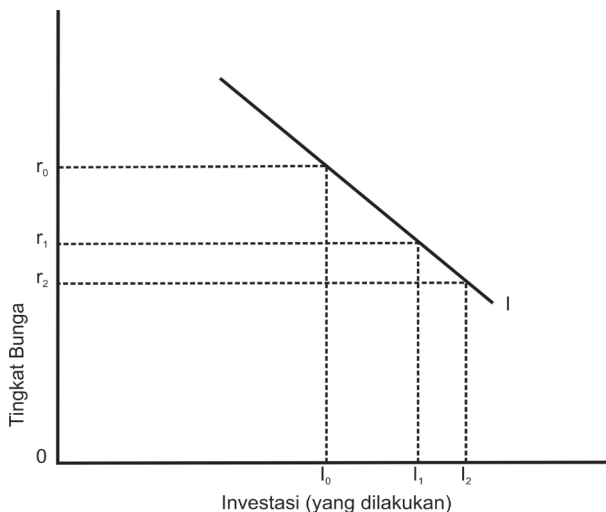
Untuk menjawab pertanyaan berapa tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian? Maka mengetahui MEI saja tidak cukup. Dalam hal ini, para pengusaha harus mempertimbangkan suku bunga. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan, oleh sebab itu rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan.

Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga.

Dengan demikian, untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilakukan kita perlu menghubungkan kurva MEI dengan suku bunga, yaitu seperti yang terdapat dalam gambar di bawah.

Pada suku bunga sebesar r_0 terdapat investasi I_0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak r_0 atau lebih. Maka pada suku bunga sebanyak r_0 , investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah I_0 . Apabila suku bunga adalah r_1 diperlukan modal sebanyak I_1 untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal r_1 atau lebih. Dengan demikian pada suku bunga sebanyak r_1 investasi yang akan dilakukan adalah sebanyak I_1 .

Gambar 18
Tingkat Bunga dan Tingkat Investasi



E. Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi

Setelah menunjukkan ciri-ciri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, sekarang telah dapat dijelaskan, (1) mengenai arti dari konsep tingkat kegiatan ekonomi negara

atau keseimbangan perekonomian negara, dan (2) mengenai proses penentu tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional, dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan tiga cara, yaitu:

1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat.
2. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan (i) kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan (ii) kesamaan di antara investasi dan tabungan.
3. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar

a. Contoh dengan menggunakan angka

Kolom 1 dari tabel 2 menggambarkan berbagai tingkat pendapatan nasional dari suatu perekonomian. Data ini menggambarkan keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak, oleh karenanya pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan dispersebel. Pada tiap-tiap pendapatan nasional seperti yang ditunjukkan dalam kolom (1), pengeluaran konsumsi dan tabungan dari seluruh rumah tangga dalam perekonomian itu berturut-turut ditunjukkan dalam kolom (2) dan (3).

Dalam membuat Tabel 2 dimisalkan kecondongan mengkonsumsi marjinal adalah 0,75. Dengan demikian, apabila pendapatan nasional bertambah sebanyak Rp 120 triliun, sebanyak Rp 90 triliun digunakan untuk menambah pengeluaran konsumsi dan Rp 30 triliun lainnya untuk menambah tabungan. Sebagai contoh perhatikan kenaikan pendapatan nasional dari Rp 600 triliun menjadi Rp 720 triliun. Kenaikan pendapatan nasional itu

menyebabkan konsumsi rumah tangga bertambah dari Rp 540 triliun menjadi Rp 630 triliun, dan tabungan dari Rp 60 triliun menjadi Rp 90 triliun.

Dalam contoh tersebut dimisalkan pada setiap tingkat pendapatan nasional, investasi perusahaan berjumlah Rp 120 triliun, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam kolom (4). Dengan diketahuinya nilai konsumsi dan investasi pada berbagai tingkat pendapatan nasional tersebut, sekarang dapatlah ditentukan besarnya pengeluaran agregat pada berbagai tingkat pendapatan nasional dan hal itu ditunjukkan dalam kolom (5). Sektor perusahaan memproduksi barang-barang dengan tujuan untuk memperoleh untung dari penjualannya. Oleh sebab itu, para pengusaha akan selalu berusaha untuk menghasilkan barang-barang yang sama besarnya dengan pengeluaran agregat yang akan wujud dalam perekonomian.

Dalam tabel 2 dapat dilihat bahwa waktu pendapatan nasional lebih rendah dari Rp 840 triliun, pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional. Keadaan ini dapat dilihat dengan membandingkan angka di kolom (1) dan (5). Keadaan ini akan mendorong para pengusaha untuk menambah produksi mereka. Kelebihan permintaan agregat ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami ekspansi (meningkat). Sebaliknya, pada waktu pendapatan nasional lebih besar dari Rp 840 triliun, pengeluaran agregat telah menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional. Ini berarti banyak di antara barang-barang yang diproduksi perusahaan-perusahaan tidak terjual. Keadaan ini akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kegiatan mereka dan sebagai akibatnya tingkat kegiatan ekonomi menurun.

Tabel 2
Contoh Angka Keseimbangan Pendapatan Nasional
(dalam triliun rupiah)

Pendapatan Nasional (Y)	Konsumsi (C)	Tabungan (S)	Investasi (I)	Pengeluaran Agregat (AE)	Keadaan Perekonomian
1	2	3	4	5	6
0	90	-90	120	210	} Ekspansi
120	180	-80	120	300	
240	270	-30	120	390	
360	360	0	120	480	
480	450	30	120	570	
600	540	60	120	660	
720	630	90	120	750	
840	720	120	120	840	Seimbang
960	810	150	120	930	} Kontraksi
1080	900	180	120	1020	
1200	900	210	120	1110	

Keadaan yang berbeda dengan yang baru saja dijelaskan akan berlaku apabila pendapatan nasional adalah Rp 840 triliun. Pada tingkat pendapatan nasional ini pengeluaran agregat juga berjumlah Rp 840 triliun. Dalam keadaan seperti itu para produsen tidak akan terdorong untuk menambah atau mengurangi tingkat produksi. Maka tingkat keseimbangan perekonomian negara telah tercapai. Dengan demikian dalam contoh tersebut nilai pendapatan nasional adalah Rp 840 triliun. Patut dicatat bahwa pada tingkat keseimbangan tersebut tingkat tabungan adalah sama dengan pengeluaran investasi, yaitu bernilai Rp 120 triliun. Ini dapat dilihat kolom (3) dan (4) dari tabel 2.

Kesimpulan: Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila: (1) $Y = C + I$, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Pada kesamaan ini pengeluaran agregat ($C + I$) sama dengan penawaran agregat (Y), dan (2) $I = S$, yaitu investasi sama dengan tabungan.

b. Grafik Keseimbangan Perekonomian Negara

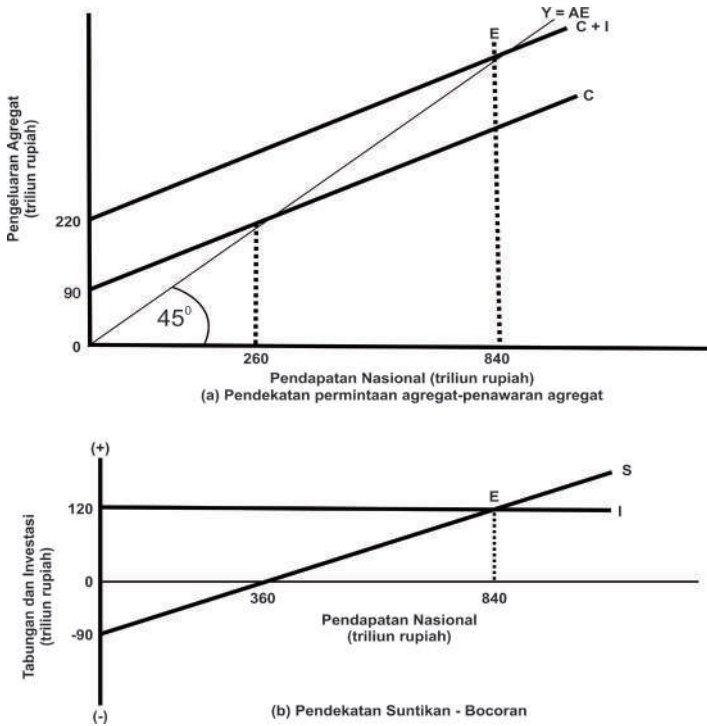
Berdasarkan angka-angka yang terdapat dalam Tabel 2, dalam Gambar 19, secara grafik dilukiskan penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara. Fungsi $C + I$ dalam grafik (a) menggambarkan pengeluaran agregat, dan fungsi tersebut diperoleh dengan menambahkan nilai investasi (I) sebesar Rp 120 triliun terhadap fungsi konsumsi (C). Sedangkan fungsi C dilukis berdasarkan angka-angka pengeluaran konsumsi yang terdapat dalam Tabel 2. Fungsi pengeluaran agregat tersebut menggambarkan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dua sektor pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Besarnya pengeluaran agregat ditunjukkan pada sumbu tegak, dan nilai pendapatan nasional ditunjukkan pada sumbu datar.

✓ Pendekatan Penawaran Agregat – Pengeluaran Agregat

Garis $Y = AE$ adalah garis yang membentuk sudut 45° dengan sumbu datar. Setiap titik dalam garis ini menunjukkan keadaan di mana pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Berarti garis itu merupakan tempat kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai. Oleh karena itu garis tersebut sangat penting sekali artinya di dalam menentukan pada tingkat mana keseimbangan perekonomian negara akan berlaku. Dalam bagian (a) dari Gambar 19, fungsi $C + I$ memotong garis $Y = AE$ di titik E. Dengan demikian titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai, dan pendapatan nasional adalah Rp 840 triliun.

Gambar 19

Menentukan Pendapatan Nasional pada Keseimbangan



Bahwa titik E menunjukkan keadaan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dapat dibuktikan dengan memisalkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi berbeda dengan yang ditunjukkan oleh titik E. Misalkan pendapatan nasional adalah Rp 600 triliun. Pada tingkat pendapatan nasional ini fungsi $C + I$ berada di atas garis $Y = AE$. Ini berarti pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan pada pengusaha menambah produksi mereka, dan pendapatan nasional menjadi bertambah tinggi. Keadaan seperti itu akan terus berlangsung sehingga pendapatan nasional bernilai Rp 840 triliun.

Pada waktu pendapatan nasional melebihi nilai ini, fungsi $C + I$ berada di bawah garis $Y = AE$, dan keadaan itu berarti bahwa pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut mendorong perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka, dan penurunan dalam kegiatan produksi ini akan menurunkan tingkat pendapatan nasional.

✓ Pendekatan Suntikan-Bocoran

Grafik (b) dalam Gambar 19 menunjukkan fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi para pengusaha. Nilai-nilai investasi dan tabungan ditunjukkan pada sumbu datar. Dengan menggunakan fungsi tabungan dan fungsi investasi juga dapat ditentukan tempat kedudukan dan keseimbangan perekonomian negara. Ia ditentukan oleh titik perpotongan fungsi S dan fungsi I , yaitu pada titik E . Hal itu dapat dibuktikan dengan mudah.

Telah diketahui bahwa (i) pengeluaran agregat sama dengan konsumsi tambah investasi atau $AE = C + I$ dan (ii) pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah tabungan, dan (iii) dalam keseimbangan pendapatan nasional $Y = AE$ atau $C + S = C + I$, atau $S = I$. Di sebelah kiri titik E investasi adalah lebih besar daripada tabungan. Oleh karenanya di sebelah kiri titik E pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional. Keadaan ini akan menggalakkan pada pertambahan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional akan menjadi bertambah besar.

Di sebelah kanan E keadaan yang sebaliknya berlaku, yaitu tabungan lebih besar dari investasi. Ini menyebabkan pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Pertambahan stok barang-barang yang berlaku akan mendorong para pengusaha menurunkan kegiatannya. Pada titik E tabungan sama dengan investasi, maka pengeluaran agregat sama dengan pendapatan

nasional. Kesamaan ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menyebabkan pengusaha, tidak akan menambah atau mengurangi tingkat kegiatan mereka. Dengan demikian tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai pada titik E, yaitu pada keadaan di mana investasi sama dengan tabungan.

✓ Pendekatan Aljabar untuk Menentukan Keseimbangan

Seperti dengan cara grafik dan angka, penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan aljabar juga dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Dengan menggunakan persamaan $Y = C + I$, dan
2. Dengan menggunakan persamaan $S = I$

Fungsi konsumsi rumah tangga adalah $C = 90 + 0,75Y$, sedangkan fungsi investasi adalah $I = 120$. Maka tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah:

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I \\
 Y &= 90 + 0,75Y + 120 \\
 Y - 0,75Y &= 210 \\
 0,25Y &= 210 \\
 Y &= 210 / 0,25 \\
 Y &= 840
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu $S = I$, tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah:

$$\begin{aligned}
 S &= I \\
 -90 + 0,75Y &= 120 \\
 0,25 &= 210 \\
 Y &= 210 / 0,25 \\
 Y &= 840
 \end{aligned}$$

Kedua penghitungan yang dilakukan secara aljabar tersebut menunjukkan pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 840 triliun rupiah, yaitu sama dengan yang diperoleh/ditentukan dalam contoh angka dan secara grafik.

F. Perubahan Keseimbangan dan Multiplier

Dari satu periode ke periode lainnya keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut terutama disebabkan karena perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi, misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat $C + I$ ke atas. Maka keseimbangan pendapatan nasional yang baru akan dicapai dan pendapatan nasional akan bertambah. Pengurangan investasi juga dapat berlaku, dan sekali lagi pengeluaran agregat $C + I$ akan mengalami perubahan. Kali ini ia akan turun ke bawah dan keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada pendapatan nasional yang lebih rendah.

Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu yang terdiri dari tiga atau empat sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dari keseimbangan yang asal dan seterusnya menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Perubahan pajak, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan ekspor dan impor adalah beberapa faktor penting lain yang akan menimbulkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan perekonomian.

Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat terhadap keseimbangan dan terutama terhadap tingkat

pendapatan nasional. Terlebih dahulu dengan menggunakan grafik, akan diterangkan berlakunya proses multiplier. Seterusnya, untuk menunjukkan sampai di mana pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat, dari perubahan sejumlah pengeluaran agregat, suatu contoh angka mengenai multiplier akan diterangkan.

a. Gambaran Mengenai Proses Multiplier

Proses multiplier, seperti telah diterangkan, berlaku sebagai akibat perubahan dalam pembelanjaan agregat. Dalam contoh berikut dimisalkan perubahan itu bersumber dari penambahan investasi sebesar Rp 10 milyar. Uraian di bawah ini menerangkan bagaimana penambahan tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional.

✓ Peristiwa yang Menimbulkan Proses Multiplier

Misalkan para pengusaha meminjam dari bank-bank perdagangan (bank umum) untuk membiayai perluasan yang dilakukan dalam berbagai perusahaan yang mereka miliki. Di samping itu, misalkan usaha memperluas kegiatan perusahaan itu adalah berupa menambah produksi dari tingkat yang dicapai sekarang pada suatu tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut para pengusaha haruslah menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan.

Pembelian barang-barang modal yang baru, penggunaan pekerja-pekerja baru dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Apabila semua uang yang dipinjam dari bank-bank perdagangan digunakan untuk membiayai kegiatan menambah produksi tersebut, tingkat pendapatan nasional akan bertambah sebanyak jumlah pinjaman yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menambah produksi

mereka. Andaikata jumlah pinjaman itu adalah sepuluh milyar rupiah, dan seluruhnya akan dibelanjakan, maka pendapatan nasional akan bertambah sebesar Rp 10 milyar.

Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dalam pendapatan nasional tersebut maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan bertambah pula, dan pertambahan ini akan menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga yang selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan dalam pendapatan nasional.

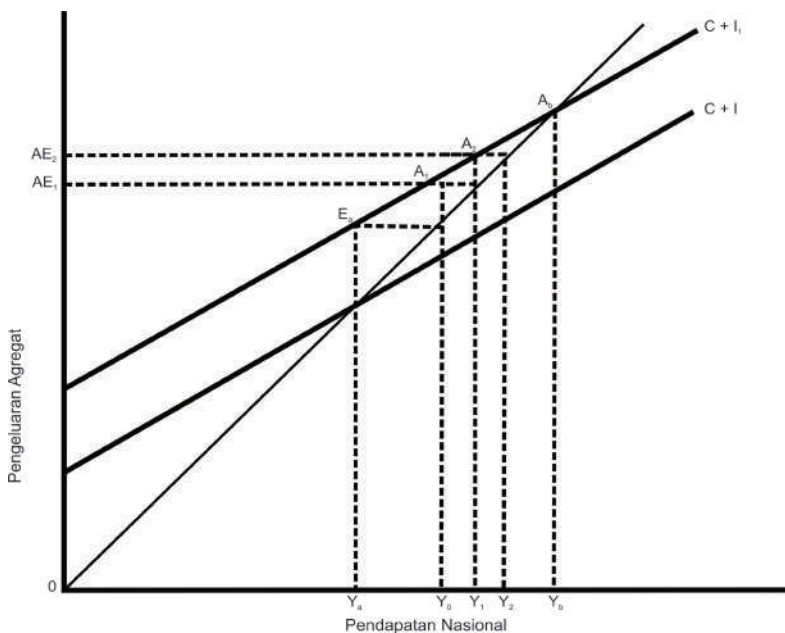
Proses perubahan pendapatan masyarakat, pengeluaran konsumsi dan selanjutnya pendapatan nasional akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi pertambahan pendapatan dalam masyarakat. Apabila keadaan itu tercapai para pengusaha tidak akan menambah lagi produksi mereka dan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru akan tercapai. Tingkat pendapatan nasional baru yang tercapai telah mengalami pertambahan jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional yang sebelumnya. Pertambahan itu adalah beberapa kali lipat besarnya jika dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran agregat yang mula-mula terjadi.

✓ **Proses Multiplier dalam Grafik**

Gambar 20 memperlihatkan bagaimana cara berlakunya proses multiplier yang ditimbulkan oleh pertambahan pengeluaran agregat. Dalam gambaran tersebut dimisalkan pada awalnya pengeluaran agregat adalah pada tingkat seperti yang digambarkan oleh $AE_0 = C + I$. Dengan demikian, tingkat keseimbangan perekonomian negara dicapai di titik E_a dan oleh karenanya pendapatan nasional mencapai Y_a . Seterusnya dimisalkan pula

bahwa keadaan perekonomian akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan para pengusaha memutuskan untuk menambah jumlah investasi sebagai ΔI sehingga tingkat investasi bertambah dari I menjadi I_1 . Pertambahan investasi tersebut menaikkan pengeluaran agregat, yaitu sekarang adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi $AE_1 = C + I_1$.

Gambar 20
Proses Multiplier dalam Gambar



Apabila pengeluaran agregat adalah $AE_1 = C + I_1$, pada pendapatan nasional Y_a akan berlaku kelebihan pengeluaran agregat sebesar ΔI . Dengan demikian, sebagai akibatnya akan berlaku kenaikan pengeluaran agregat, yaitu menjadi $E_a A$. Para pengusaha didorong untuk menambah pendapatan nasional menjadi Y_0 . Pada pendapatan nasional ini, seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, pengeluaran agregat dalam perekonomian

adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A_1 . Dengan demikian pengeluaran agregat pada keadaan itu bernilai E_1 , dan dapat dilihat bahwa $E_1 > Y_0$.

Keadaan seperti itu berarti bahwa dalam perekonomian terdapat kelebihan permintaan dan oleh karenanya para pengusaha mendapat dorongan lagi untuk menaikkan produksi ke Y_1 , karena pada tingkat pendapatan tersebut E_1 adalah sama dengan tingkat pendapatan nasional yang dicapai (Y_1). Tetapi, apabila pendapatan nasional mencapai tingkat tersebut, pengeluaran agregat telah menjadi seperti yang ditunjukkan oleh A_2 , berarti bernilai sebesar E_2 . Dapat dilihat bahwa $E_2 > Y_1$. Pengeluaran agregat yang lebih besar daripada pendapatan nasional tersebut akan menggalakkan para pengusaha untuk lebih menaikkan produksi, dan ini akan menimbulkan kenaikan baru dalam pendapatan nasional, yaitu sekarang akan mencapai Y_2 . Pada tingkat pendapatan nasional ini juga kelebihan permintaan agregat masih terdapat, maka masih terdapat insentif untuk menaikkan produksi.

Keseimbangan perekonomian negara yang baru hanya akan tercipta apabila tidak terdapat lagi kelebihan permintaan dalam masyarakat. Keadaan ini tercapai pada titik E_b dan pada tingkat keseimbangan itu pendapatan nasional Y_b . Dengan demikian, penambahan investasi perusahaan sebesar ΔI akan menaikkan pendapatan nasional dari Y_a menjadi Y_b . Seperti dapat dilihat dalam gambar di atas, $(Y_a Y_b) > (\Delta AE - \Delta I)$ dan ini berarti bahwa nilai penambahan pendapatan nasional lebih besar daripada nilai penambahan pengeluaran agregat yang pada mulanya berlaku. Sampai di mana besarnya penambahan dalam pendapatan nasional yang terjadi sebagai akibat daripada kenaikan dalam pengeluaran agregat diterangkan dalam uraian selanjutnya.

b. Menentukan Besarnya Multiplier

Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan/ pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan/ pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misalnya, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multiplier adalah 4.

Untuk menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier, akan diperhatikan proses multiplier yang timbul sebagai akibat dari suatu kenaikan investasi. Misal, pada suatu masa tertentu dalam perekonomian itu pengusaha menambah jumlah investasi mereka. Seperti telah dibahas dalam uraian sebelum ini, kenaikan investasi itu akan menimbulkan suatu rangkaian pertambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga dan pertambahan pengeluaran konsumsi. Juga telah diterangkan bahwa proses itu akan terus menerus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi kelebihan pengeluaran agregat. Keadaan itu akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru.

✓ Cara Menentukan multiplier

Dalam perekonomian dua sektor, corak dari rangkaian pertambahan pengeluaran, pertambahan pendapatan nasional dan pertambahan konsumsi yang akan berlangsung ditunjukkan dalam tabel di bawah. dalam gambaran itu dimisalkan pada mulanya para pengusaha menambah investasi (ΔI) sebesar Rp 20 triliun dan MPC adalah 0,75.

Tabel 3
Proses Multiplier dalam Angka (dalam triliun rupiah)

Tahap Proses Multiplier	Tambahan Pendapatan Nasional	Tambahan Konsumsi	Tambahan Tabungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	? I = ? Y1 = 20	15	5
2	= 15	11,	3,75
3	= 11,25	8,4375	2,8125
4	= 8,4375	6,3281	2,1094
5	= 6,3281	4,7461	1,5820
Jumlah	80	60	20

Tambahan investasi sebesar Rp 20 triliun pada permulaannya akan menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan rumah tangga sebanyak Rp 20 triliun juga. Seterusnya kenaikan pendapatan rumah tangga tersebut akan menaikkan konsumsi sebesar $(MPC \times \Delta I) = 0,75 (MPS \times \Delta I) = 0,25 (20 \text{ triliun}) = \text{Rp } 5 \text{ triliun}$. Kenaikan kedua, yaitu konsumsi sebanyak Rp 15 triliun tersebut menyebabkan pertambahan pendapatan nasional sebanyak Rp 15 triliun. Seterusnya ini akan menimbulkan kenaikan konsumsi tahap kedua sebanyak $\Delta C = (MPC \times \Delta Y) = 0,75 (\text{Rp } 15 \text{ triliun}) = \text{Rp } 11,25 \text{ triliun}$ dan tabungan sebanyak $\Delta S = (MPS \times \Delta Y) = 0,25 (15 \text{ triliun}) = \text{Rp } 3,75 \text{ triliun}$. (perhatikan data pada multiplier tahap kedua). Proses pertambahan pendapatan konsumsi dan tabungan ini terus berlangsung sehingga tidak wujud lagi pertambahan pendapatan.

✓ **Formula untuk Menentukan Multiplier**

Apabila proses multiplier tersebut terus berjalan, pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah sebanyak Rp 80

triliun, konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak Rp 60 triliun, dan tabungan rumah tangga bertambah sebanyak Rp 20 triliun. Pertambahan pendapatan nasional tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula yang berikut:

$$\Delta Y = 1 - MPC \Delta I, \text{ atau}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \Delta I$$

c. Perubahan Keseimbangan Pendapatan Nasional

Untuk memperlengkap analisis mengenai multiplier, seterusnya dalam bagian ini akan ditunjukkan pengaruh kenaikan investasi yang bernilai Rp 20 triliun terhadap keseimbangan pendapatan nasional yang telah ditunjukkan dalam gambar 19. Pada mulanya fungsi konsumsi adalah $C = 90 + 0,75Y$ dan $I = 120$. Telah ditunjukkan bahwa pengeluaran agregat tersebut mewujudkan pendapatan nasional sebanyak Rp 840 triliun.

Kenaikan investasi sebanyak Rp 20 triliun menyebabkan tingkat investasi yang baru adalah $I_1 = 120 + 20 = 140$. Maka pada tingkat keseimbangan yang baru pendapatan nasional adalah Rp 920 triliun, yaitu seperti yang dibuktikan oleh perhitungan berikut:

$$Y_1 = C + I$$

$$Y_1 = 90 + 0,75Y_1 + 140$$

$$0,25Y_1 = 230$$

$$Y_1 = 920$$

Cara lain untuk menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan yang baru adalah dengan cara menambahkan pertambahan pendapatan nasional (sebagai akibat pertambahan investasi) pada pendapatan nasional asal. Pertambahan pendapatan nasional adalah:

$$\Delta Y = \frac{1}{1-MPC} \Delta I$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-0,75} 20$$

$$\Delta Y = 4 \times 20 = 80$$

Dengan demikian pendapatan nasional yang baru adalah: Y_1
 $= Y + \Delta Y = \text{Rp } 840 \text{ triliun} + \text{Rp } 80 \text{ triliun} = \text{Rp } 920 \text{ triliun}.$



BAB

VII

KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DALAM PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

A. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan

Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut perlu terlebih dahulu dibahas pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut, selanjutnya dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.

1. Aliran Pendapatan dan Pengeluaran

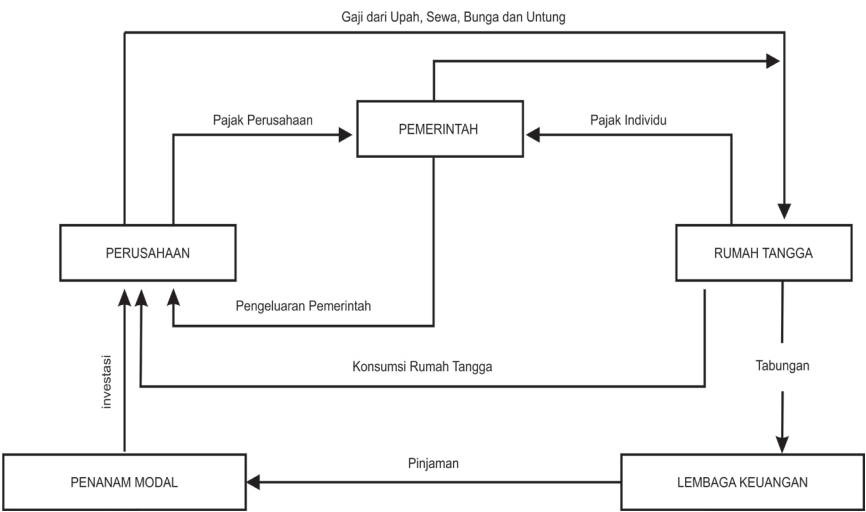
Peran pemerintah dalam perekonomian ini ialah menyediakan barang-barang publik. Penyediaan tersebut menuntut adanya pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan pembelanjaan untuk pembiayaan

pembangunan. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran dalam sirkulasi aliran pendapatan.

Ketiga jenis aliran tersebut adalah *pertama*, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran tersebut merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. *Kedua*, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah terhadap barang dan jasa yang diproduksi pemerintah. *Ketiga*, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

Tiga aliran tersebut dalam perekonomian tertutup dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 21
Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Tiga Sektor



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a) Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan dari faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
- b) Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber; dari pembayaran gaji atau upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji atau upah oleh pemerintah.
- c) Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli barang dan jasa.
- d) Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan: membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T), dalam persamaan yaitu: $Y = C + S + T$.
- e) Dalam gambaran tersebut dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal.
- f) Pengeluaran agregat (AE) telah bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi (C) dan investasi (I), sekarang termasuk juga pengeluaran pemerintah (G), dalam persamaan $AE = C + I + G$.

2. Syarat Keseimbangan

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat, atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak meliputi tiga jenis pembelanjaan, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi perusahaan (I) pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G). Dengan demikian keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah: penawaran agregat = pengeluaran agregat ($Y = AE$), atau: $Y = C + I + G$.

Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga (gaji atau upah, sewa, bunga dan keuntungan) dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional (Y). Pendapatan rumah tangga tersebut kemudian akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu membiayai konsumsi (C), ditabung (S) dan membayar pajak (T). Dengan demikian, dalam perekonomian tiga sektor, akan berlaku persamaan sebagai berikut: $Y = C + S + T$.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam keseimbangan berlaku persamaan $Y = C + I + G$. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku persamaan $Y = C + S + T$. Atas dasar itu, maka dalam keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan $C + I + G = C + S + T$. Dan apabila C dikurangi dari setiap ruang maka persamaannya adalah $I + G = S + T$.

Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah suntikan terhadap sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah

kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan : Suntikan = Bocoran. Sebagai kesimpulan maka dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan, maka akan berlaku keadaan sebagaimana berikut:

a) $Y = C + I + G$, dan

b) $I + G = S = T$

B. Pajak

Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai berbagai jenis administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi serta tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan oleh pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan. Uraian di bawah ini secara ringkas menerangkan struktur pajak yang menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Tetapi, sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai pajak, akan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya, fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi *budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu lagi fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi *budgetair*, yaitu fungsi mengatur (*regulair*). Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, adanya lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

1. Teori Pemungutan Pajak

Dalam kaitannya dengan fungsi *budgetair*, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik obyek

maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara—khususnya Indonesia—didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asa keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

d. Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara

akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Natural and Causes of Wealth of Nations*, Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas:

a. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

1) Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2) Keadilan vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

b. *Certainty*

Pendapatan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

c. *Konvenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

d. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan

dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asa pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang
Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak didasarkan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada yang dipungut.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Stelsel Pemungutan Pajak

Stelsel pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. Saat ini, sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang Wajib Pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan *semi self assessment system* dan *withholding system* (1968-1983). Barulah pada tahun 1984; atas dasar perubahan Undang-Undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*.

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemungutan pajak pada fiskus, sedangkan Wajib Pajak hanya pasif. Dalam *semi self assessment system*, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiskus dan Wajib Pajak. Di Indonesia, *semi self assessment system* diterapkan bersama-sama dengan *withholding system*, yang merupakan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dengan gabungan kedua sistem ini, besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga berdasarkan suatu perkiraan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

5. Perlawanan Pajak

Tulang punggung dari sistem *self assessment system* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak. Karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul perlawanan pajak oleh Wajib Pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif.

Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Dalam hal ini, hambatan tersebut bukan merupakan inisiatif dari Wajib Pajak, tetapi mungkin juga akibat dari kondisi ekonomi. Misalnya, ketidaktahuan Wajib Pajak atas suatu kewajiban perpajakan atau kelesuan perekonomian yang menyebabkan Wajib Pajak mendapat kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi

pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, biasa disebut *tax avoidance*.
2. Perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, biasa disebut sebagai *tax evasion*.

6. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contoh, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

b) Pajak tak Langsung

Pajak tak langsung artinya pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tak langsung karena yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya. Dalam hal ini, penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihal lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memerhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b) Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memerhatikan diri Wajib Pajak. Contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jika jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dikaitkan dengan jenis pajak menurut golongan dan

sifatnya maka hal tersebut tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 :
Pengelompokan Pajak Pusat

	MENURUT GOLONGAN			MENURUT JENIS
	PAJAK LANGSUNG	PAJAK TAK LANGSUNG	PAJAK SUBYEKTIF	PAJAK OBYEKTIF
PPh	√		√	
PPN dan PPnBM		√		√
Bea material	√			√
PBB	√			√
BPHTB		√		√

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Pajak Provinsi

Contoh, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota

Contoh, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang

digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pola persentase, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajak. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 20% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

3. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu, maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. Jika kenaikan persentase pajaknya semakin besar maka disebut “tarif pajak progresif-progresif.” Sedangkan jika kenaikan persentase pajaknya semakin kecil maka disebut “tarif pajak progresif-degresif,” dan jika kenaikan persentase pajaknya tetap maka disebut “tarif pajak progresif tetap.”

8. Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

Dalam perekonomian dua sektor pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposebel. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan deposebel menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional. Dan dalam perekonomian yang menggunakan pajak, hubungan antara pendapatan deposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y_d = Y - T$$

Yaitu: Pendapatan disposebel (Y_d) sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi pajak (T).

Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan tabungan. Adapun pengaruh pajak terhadap pendapatan disposebel, pengeluaran konsumsi dan tabungan, secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan $Y_d = Y - T$
2. Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

C. Penjelasan Hubungan Pajak, Konsumsi dan Tabungan Menggunakan Contoh Angka

Untuk menjelaskan hubungan pajak, konsumsi dan tabungan, penulis akan menggunakan pendekatan dengan contoh angka

dan grafik. Namun, untuk contoh grafik akan diterangkan pada pembahasan selanjutnya, dan untuk pembahasan ini penulis akan menggunakan contoh angka terlebih dahulu.

Contoh Angka: Pajak Tetap

Pada tabel di bawah, ditunjukkan satu contoh yang menunjukkan akibat dari pungutan pajak terhadap konsumsi dan pendapatan. Berbagai tingkat pendapatan nasional (Y) ditunjukkan dalam kolom 1, dan pajak (T dari **taxes**) ditunjukkan dalam kolom 2. Pendapatan disposable (Y_d) ditunjukkan dalam kolom 3. Kolom 4 dan 5 menunjukkan konsumsi rumah tangga (C) — yang dihitung dengan formula $C = a + bY_d$ — dan tabungan rumah tangga (S) — yang dihitung dengan formula $S = a + (1-b) Y_d$. Tabel di bawah terbagi menjadi dua bagian: bagian 1 dimisalkan pajak sebelum dipungut ($T = 0$) dan pada bagian 2 dimisalkan pemerintah memungut pajak sebanyak Rp 40 triliun ($T = 40$).

Angka-angka dalam bagian 1 diperoleh dari memisalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga sebagaimana berikut:

1. $C = 90 + 0,75 Y$, atau
 $C = 90 + 0,75 Y_d$
2. $S = 90 + 0,25 Y$, atau
 $S = 90 + 0,25 Y_d$

Dalam persamaan di atas C sebagai fungsi Y adalah sama dengan C sebagaimana fungsi Y_d . Begitu pula S sebagai fungsi Y adalah sama dengan S sebagai fungsi Y_d . Kesamaan tersebut disebabkan karena pemerintah belum memungut pajak, jadi Y adalah sama dengan Y_d .

Tabel 5
Pengaruh Pajak terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah
Tangga (dalam triliun rupiah)

Y (1)	T (2)	Y_d (3)	C (4)	S (5)
Bagian 1 : $T = 0$				
0	0	0	90	-90
240	0	240	270	-30
480	0	480	450	30
720	0	720	630	90
960	0	960	810	150
1200	0	1200	990	210
1440	0	1440	1070	270
Bagian 2 : $T = 40$				
0	40	-40	60	-100
240	40	200	240	-40
480	40	440	420	20
720	40	680	600	80
960	40	920	780	140
1200	40	1160	960	200
1440	40	1400	1040	260

Berdasarkan pada pemisalan di atas, maka dalam tabel tersebut, pada bagian 1 terdapat keadaan-keadaan sebagaimana berikut:

1. Ketika pendapatan nasional adalah nol ($Y = 0$) konsumsi rumah tangga sebanyak Rp 90 triliun.
2. Dimisalkan pendapatan nasional (lihat kolom 1) selalu mengalami kenaikan sebanyak Rp 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi Rp 240 triliun, kemudian menjadi Rp 480 triliun dan seterusnya. Maka $\Delta Y = \Delta Y_d = 240$

3. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan dalam formula.

- 1) $\Delta C = MPC \times \Delta Y_d$, dan

- 2) $\Delta S = MPS \times \Delta Y_d$

Dengan demikian, apabila $\Delta Y_d = 240$ maka $\Delta C = 0,75 \times 240 = 180$. Sesuai dengan perhitungan ini, dalam bagian 1 tabel di atas rumah tangga selalu naik sebanyak Rp 180 triliun. Perubahan tabungan (ΔS) adalah : $\Delta S = 0,25 \times 240 = 60$. Berarti tabungan rumah tangga selalu berubah Rp 60 triliun. Perubahan tabungan ini dapat juga dihitung dengan persamaan $\Delta S = \Delta Y_d - \Delta C$, dan perhitungannya akan menghasilkan nilai yang sama.

Pada bagian 2 ditunjukkan bagaimana pajak yang dipungut memengaruhi konsumsi dan tabungan. Ciri-ciri perubahan pendapatan disposebel, konsumsi dan tabungan diterangkan dalam uraian berikut:

1. Sebagai akibat pajak Y tidak sama lagi dengan Y_d . Hubungan antara kedua variabel tersebut menjadi $Y = Y_d - T$. Angka Y_d di bagian 2 dihitung dengan menggunakan persamaan tersebut.
2. Persamaan $C = a + bY_d$ menggambarkan sikap rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Ia tetap sama dalam semua keadaan, yaitu apakah ada pajak atau tidak ada pajak, perilaku rumah tangga dalam berbelanja ditentukan oleh persamaan tersebut. Maka, dalam menentukan nilai C dalam kolom 2 digunakan persamaan: $C = 90 + 0,75 Y_d$. Seterusnya nilai tabungan dihitung dengan menggunakan formula $S = Y_d - C$.

Untuk melihat akibat pajak terhadap konsumsi dan tabungan, maka perlu dibandingkan antara Bagian 1 dan 2. Di mana akibat yang ditimbulkan memiliki kesamaan di berbagai tingkat pendapatan nasional, dan sebagai contoh kita akan meninjau lebih jauh keadaan dua tingkat pendapatan nasional, yaitu ketika pendapatan sebesar 0 dan Rp 1200 triliun.

1. Data pada Bagian 1 menunjukkan pada $Y = 0$ didapat $C = 90$ dan $S = 90$, sedangkan data pada Bagian 2 menunjukkan pada $Y = 0$ didapat $C = 60$ dan $S = 100$. Perbandingan kedua data menunjukkan sesudah ada pajak, konsumsi berkurang sebanyak $\Delta C = 90 - 60 = 30$, dan tabungan berkurang sebanyak $\Delta S = -100 (-) - 90 = 10$.
2. Data pada Bagian 1 menunjukkan bahwa pada $Y = 1200$ didapat $C = 990$ dan $S = 210$, sedangkan data pada Bagian 2 menunjukkan bahwa pada $Y = 1200$ didapat $C = 900$ dan $S = 200$. Perbandingan kedua data menunjukkan perubahan konsumsi dan tabungan yang terjadi adalah sama sifatnya seperti yang terdapat dalam kesimpulan (i), yaitu sebagai akibat dari pajak yang dipungut, konsumsi berubah sebanyak $C = 900 - 660 = 30$, sedangkan tabungan berubah sebanyak $S = 210 - 200 = 10$.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa pajak sebanyak Rp 40 triliun akan mengurangi konsumsi sebanyak Rp 30 triliun dan tabungan sebanyak Rp 10 triliun. Mengapa hubungan seperti itu terwujud? Penjelasan berikut akan menjelaskan sebab-sebabnya.

Setiap pungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan dispersebel. Pajak sebanyak T menyebabkan pendapatan dispersebel turun sebanyak T , maka:

$$\Delta Y_d = - T$$

Turunnya pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposebel. Maka:

$$\Delta Y_d = -T = \Delta C + \Delta S$$

Di samping tergantung pada perubahan disposebel, penurunan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS, dan perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\Delta C = -MPC \times \Delta Y_d \text{ atau } \Delta C = -MPC \times T$$

$$\Delta S = -MPS \times \Delta Y_d \text{ atau } \Delta S = -MPS \times T$$

Pada contoh di atas, pajak $T = 40$, $S = 0,75$ dan $MPS = 0,25$. Maka pengurangan konsumsi dan tabungan rumah tangga yang terjadi adalah:

1. $\Delta C = 0,75 \times 40 = 30$
2. $\Delta S = 0,25 \times 40 = 10$

Perhitungan tersebut membuktikan pajak sebanyak Rp 40 triliun mengurangi konsumsi sebanyak Rp 30 triliun dan tabungan sebanyak Rp 10 triliun. Secara umum hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$T = \Delta Y_d = (MPC \times T) + (MPS \times T)$$

Contoh Angka: Pajak Proporsional

Gambaran secara angka mengenai pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga ditunjukkan dalam tabel 6. Data dalam tabel tersebut menggambarkan pemisalan di bawah ini (angka dalam triliun)

1. Fungsi konsumsi adalah $C = 90 + 0,75 Y_d$ (berlaku untuk kasus sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak). Berdasarkan pada pemisalan ini, apabila $Y_d = 0$ maka $C = 90$ dan perubahan konsumsi serta tabungan dalam berbagai tingkat pendapatan nasional adalah $\Delta C = 0,75 \times T$ dan $\Delta S = 0,25 \times T$.
2. Pajak proporsional yang dipungut pemerintah adalah sebanyak 20 persen dari pendapatan nasional ($T = 0,2Y$)
3. Dari setiap tingkat pendapatan nasional ke tingkat pendapatan nasional lainnya besar pertambahannya adalah sebanyak 240. Di Bagian 1, kenaikan ini akan menyebabkan kenaikan pendapatan disposebel sebanyak 240 juta juga, tetapi dalam Bagian 2, disebabkan oleh $T = 0,2Y$, maka pertambahan pendapatan disposebel adalah $\Delta Y_d = \Delta Y = (1 - 0,2) Y = 0,8Y$. Maka $\Delta Y_d = 0,8 (240) = 192$. Dapat dilihat bahwa di Bagian 2, Y_d bertambah sebanyak 192 apabila Y bertambah sebanyak 240. Data konsumsi dan tabungan di kedua bagian dihitung dengan menggunakan persamaan $\Delta C = 90 + 0,75Y_d$ dan $\Delta S = -90 + 0,25Y_d$.

Tabel 6

Pengaruh Pajak Proporsional Terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam triliun rupiah)

Y (1)	T (2)	Yd (3)	C (4)	S (5)
Bagian 1: $T = 0$				
0	0	0	90	-90
240	0	240	270	-30
480	0	480	450	30

720	0	720	630	9
960	0	960	810	150
1200	0	1200	990	210
1440	0	1440	1070	270
Bagian 2 : $T = 20\%$ dari Y				
0	0	0	90	-90
240	48	192	234	-42
480	96	384	378	6
720	144	576	522	54
960	192	768	666	102
1200	240	960	810	150
1440	288	1152	954	198

Sama halnya dengan analisis yang dibuat sebelum ini, pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan dapat ditunjukkan dengan membandingkan keadaan di Bagian 1 (sebelum ada pajak) dan Bagian 2 (sebelum pajak proporsional diperkenalkan). Tiga keadaan akan diperhatikan pada waktu pendapatan nasional adalah 0, Rp 480 triliun, dan Rp 960 triliun.

1. Pada $Y = 0$ tidak ada pajak yang dipungut ($T = 0, 20Y = 0$). Maka keadaan di Bagian 1 adalah sama dengan di Bagian 2.
2. Sebelum ada pajak, apabila $Y = 480$ maka $Y_d = 480$ dan C dan S masing-masing adalah $C = 450$ dan $S = 30$. Sesudah ada pajak $Y = 480$ pajak adalah $\Delta T = 0,2Y = 96$. Maka pendapatan disposebel telah berkurang sebanyak $\Delta Y_d = 96$, dan hanya berjumlah $Y_d = 384$, penurunan ini menyebabkan konsumsi berkurang dari 450 (sebelum pajak) menjadi 378, yaitu pengurangan sebanyak $\Delta C = 0,75 \times 96 = 72$. Pengurangan tabungan adalah sebanyak

$\Delta S = 0,25 \times 96 = 24$, yaitu dari 30 sebelum pajak menjadi 60 sesudah pajak.

3. Dengan cara yang sama seperti dalam nomor 2, didapati bahwa pada $Y = 960$, pajak dan perubahan pendapatan disposable adalah $T = \Delta Y_d = 0,2 (960) = 192$. Sebagai akibatnya konsumsi turun sebanyak $\Delta C = 0,75 \times 192 = 144$ (dari 810 menjadi 666) dan tabungan sebanyak $\Delta S = 0,25 \times 192 = 48$ (dari 150 menjadi 102).

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa walau apapun bentuk sistem pajak, yaitu pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:

1. $\Delta C = MPC \times T$
2. $\Delta S = MPS \times T$

D. Penjelasan Tentang Pajak, Konsumsi dan Tabungan Menggunakan Analisis Aljabar dan Grafik

Untuk memudahkan dalam menjelaskan dan menggambarkan tentang pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, terlebih dahulu penulis akan menggunakan analisis aljabar dalam penjelasan.

1. Pendekatan Aljabar

Dalam contoh angka yang dibuat dalam Tabel 5 dan 6, dimisalkan $C = 90 + 0,75Y$. Contoh dalam Tabel 5 memisalkan pajak tetap sebanyak Rp 40 triliun dan $S = -90 + 0,25Y$ dan dalam Tabel 6 dimisalkan pajak adalah sebesar 20 persen dari pendapatan nasional ($T = 0,2Y$). Berdasarkan pada pemisalan ini fungsi konsumsi dan tabungan sesudah pajak dapat ditentukan.

- a. **Pengaruh Pajak Tetap.** Terlebih dahulu akan dibuat analisis yang bersifat umum mengenai pengaruh pajak terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Misalkan, fungsi konsumsi asal adalah $C = a + bY$, dan pajak adalah T (pajak tetap). Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak $\Delta C = bT$. Dengan demikian fungsi konsumsi sesudah pajak (C_1) adalah:

$$C_1 = -bT + a + bY$$

Fungsi tabungan asal adalah $\Delta S = -a + (1 - b)Y$. Pajak sebanyak T menurunkan tabungan sebanyak $\Delta S = -(1-b)Y$. Dengan demikian fungsi tabungan sesudah pajak (S_1) adalah:

$$S_1 = -(1-b)T - a + (1-b)Y$$

Dengan menggunakan persamaan-persamaan di atas, di bawah ini ditentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak untuk contoh dalam Tabel 5.

- 1) Fungsi konsumsi

$$C_1 = -bT + a + bY$$

$$C_1 = -0,75(40) + 90 + 0,75Y$$

$$C_1 = 60 + 0,75Y$$

- 2) Fungsi tabungan

$$S_1 = -(1-b)T - a + (1-b)Y$$

$$S_1 = -(1-0,75)40 - 90 + 0,2Y$$

$$S_1 = -10 - 90 + 0,2Y$$

$$S_1 = -100 + 0,2Y$$

- b. **Pengaruh pajak proporsional.** Pajak proporsional sebanyak tY menurunkan konsumsi sebanyak $\Delta C = btY$.

Apabila fungsi konsumsi asal adalah $C = a + bY$ maka fungsi konsumsi yang baru (C_1) adalah:

$$C_1 = a + bY - btY$$

$$C_1 = a + b(1-t)Y$$

Misalkan fungsi tabungan asal adalah $S = -a + (1-b)Y$ dan pajak adalah tY . Pajak tersebut akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak $\Delta S = (1-b)tY$ maka fungsi tabungan yang baru (S_1) adalah:

$$S_1 = -a + (1-b)Y - (1-b)tY$$

$$S_1 = a + \{(1-b) - (1-b)t\}Y$$

$$S_1 = -a + (1-b)(1-t)Y$$

Dengan menggunakan persamaan-persamaan yang baru diterangkan di atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak untuk tabel 6 dapat ditentukan:

1) Fungsi konsumsi

$$C_1 = a + b(1-t)Y$$

$$C_1 = 90 + 0,75(1-0,20)Y$$

$$C_1 = 90 + 0,6Y$$

2) Fungsi tabungan

$$S_1 = -a + (1-b)(1-t)Y$$

$$S_1 = -90 + (1-0,75)(1-0,20)Y$$

$$S_1 = -90 + 0,2Y$$

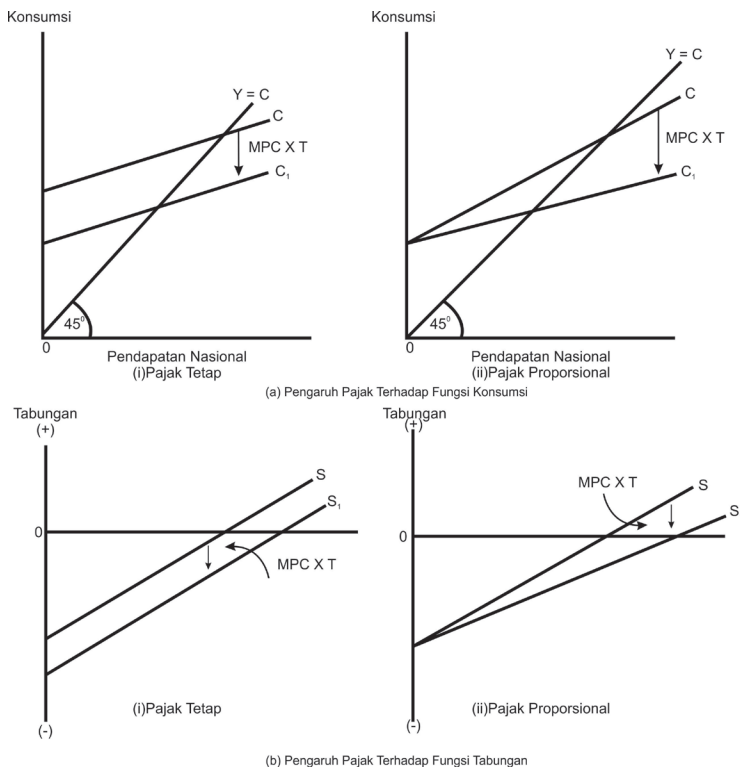
2. Pendekatan Grafik

Secara grafik dengan jelas boleh ditunjukkan akibat dari pungutan pajak terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dua pasangan grafik dibuat untuk menunjukkan akibat pajak terhadap fungsi konsumsi dan tabungan. Gambar 22 menunjukkan

gambaran umum mengenai akibat pajak terhadap fungsi konsumsi dan fungsi tabungan berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 5 dan Tabel 6.

Gambar 22:

Pengaruh Pajak Terhadap Fungsi Konsumsi dan Tabungan



Gambar 22 terbagi menjadi dua bagian. Grafik (a) menunjukkan akibat pajak tetap dan pajak proporsional terhadap fungsi konsumsi. Sebelum pajak, fungsi konsumsi adalah $C = a + bY$. Pajak tetap mengurangi konsumsi sebanyak $\Delta C = -bT$ dan menyebabkan fungsi konsumsi berpindah kepada $C_1 = -bT + a + bY$. Pajak proporsional akan mengurangi konsumsi sebanyak ΔC

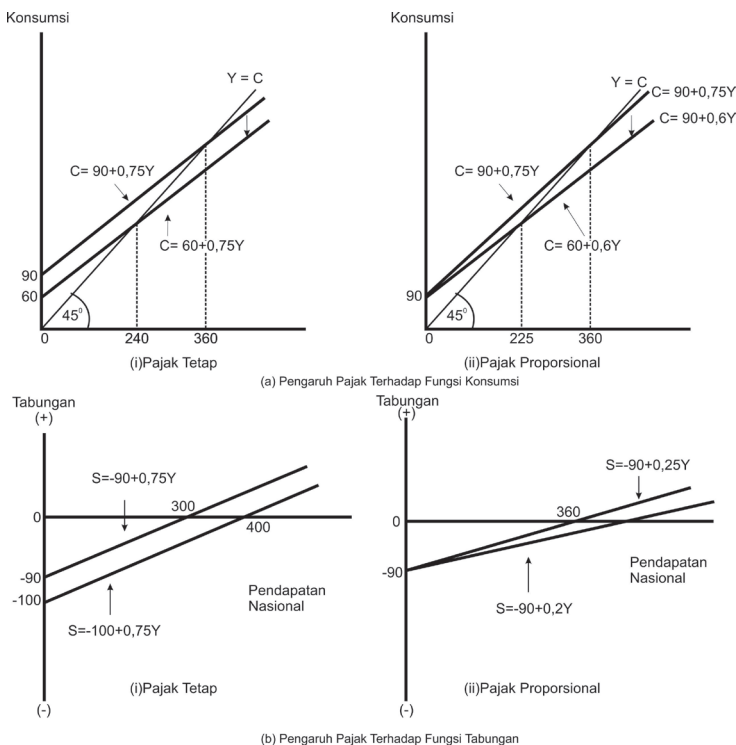
$= btY$. Dengan demikian fungsi konsumsi (C_1) berubah menjadi $C_1 = a + b(1-t)Y$.

Akibat pajak tetap dan proporsional ditunjukkan dalam grafik (b). Pajak tetap menyebabkan fungsi tabungan asal, yaitu: $S = -a + (1-b)Y$ berubah menjadi $S_1 = -(1-b)T - a + (1-b)Y$. Pajak proporsional menyebabkan fungsi tabungan berubah dari $S = -a + (1-b)Y$ menjadi $S_1 = -a + (1-b)(1-t)Y$.

Gambar 23 juga terbagi menjadi dua bagian. Grafik (a) menggambarkan akibat pajak tetap dan pajak proporsional terhadap fungsi konsumsi. Grafik (b) menggambarkan akibat pajak tetap dan proporsional terhadap fungsi tabungan.

Gambar 23:

Pengaruh Pajak Terhadap Fungsi Konsumsi dan Tabungan



E. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi pembangunan, seperti membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan, membiayai angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi negara.

1. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang terpenting di antaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan.

- a. Proyeksi jumlah pajak yang diterima merupakan faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah terlebih dahulu harus membuat proyeksi jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin besar jumlah pajak yang akan dikumpulkan, maka semakin banyak pula pembelanjaan yang akan dilakukan pemerintah.
- b. Faktor paling penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Hal ini karena pemerintah menempati

posisi paling penting dalam perekonomian suatu negara. Kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Di antara tujuan-tujuan pemerintah dibidang ekonomi ialah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, sering kali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur-irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak uang, dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.

- c. Pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kesetabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

2. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Dari uraian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peran yang penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah pada periode-periode tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke periode yang lain tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Pada saat mengalami kemunduran ekonomi misalnya, pendapatan pajak berkurang. Tetapi, untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku.

Gambar 24:
Fungsi Pengeluaran Pemerintah



Berdasarkan atas berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi pembelanjaan pemerintah sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar dan dengan demikian besarnya tidak tergantung pada pendapatan nasional. Ini berarti, seperti dengan sifat pengeluaran untuk investasi, pembelanjaan pemerintah adalah pembelanjaan otonomi.

Perubahan-perubahan perbelanjaan pemerintah digambarkan dalam bentuk perpindahan fungsi pengeluaran pemerintah ke atas atau ke bawah. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah sebanyak G rupiah. Maka dalam grafik, fungsi pengeluaran pemerintah seperti ditunjukkan oleh fungsi G . Pada periode berikutnya, misalkan terjadi banyak pengangguran dan untuk mengatasinya pemerintah melakukan pembelanjaan yang sangat banyak, yaitu sebanyak G_1 . Langkah ini memindahkan fungsi G ke atas. Sebaliknya, apabila ekonomi menghadapi inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi perbelanjaan pemerintah dari G menjadi G_2 .

F. Keseimbangan dalam Perekonomian Tiga Sektor

Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor dibedakan dalam dua keadaan. *Pertama*, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. *Kedua*, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Untuk setiap keadaan, tiga pendekatan penentuan keseimbangan pendapatan nasional akan diterangkan; dengan menggunakan contoh angka, grafik dan dengan analisis secara aljabar.

1. Pajak Tetap dan Keseimbangan Pendapatan

Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan pemisalan-pemisalan berikut: (a) Jumlah pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan adalah seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan fungsi konsumsi adalah $C = 60 + 0,75Y$ (fungsi konsumsi sesudah pajak) dan fungsi tabungan adalah $S = -100 + 0,25Y$. Pajak adalah $T = 40$. (b) Investasi sektor perusahaan adalah $I = 120$ (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah adalah $G = 60$ (triliun rupiah). Dengan pemisalan di atas, dapat ditunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.

a. Keseimbangan Secara Angka

Data yang ditunjukkan dalam Tabel 7, kolom 1, 2, 3, dan 4 adalah data pendapatan nasional, pajak, konsumsi dan tabungan. Selanjutnya kolom 5, dan 6 berturut-turut menunjukkan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Kolom 7 menunjukkan pengeluaran agregat (AE) dalam perekonomian tiga sektor, dan nilainya dihitung dengan formula : $AE = C + I + G$.

Data dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa apabila pendapatan nasional lebih kecil dari Rp 960 triliun, berlaku keadaan di mana $AE > Y$, yaitu pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Ini jelas terlihat membandingkan kolom 1 dan 7. Kelebihan pembelanjaan agregat berlaku dan ini mendorong dilakukannya ekspansi dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional **Lebih Besar** dari Rp 960 Triliun, $AE < Y$. Berarti lebih banyak produksi nasional jika dibandingkan dengan pembelanjaan

dalam perekonomian. Kenaikan stok barang berlaku dan akan mendorong terjadinya kontraksi (penurunan) dalam kegiatan ekonomi. Ini berarti, keseimbangan pedapatan nasional akan dicapai pada pendapatan nasional sebanyak Rp 960 triliun, yaitu dalam keadaan di mana pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat.

Tabel 7
Pajak Tetap dan Keseimbangan Pendapata
(dalam triliun rupiah)

Y (1)	T (2)	C (3)	S (4)	I (5)	G (6)	AE = C + I + G (7)	Keadaan Ekonomi (8)
0	40	60	-100	120	60	240	Ekspansi
240	40	240	-40	120	60	420	
480	40	420	20	120	60	600	
720	40	600	80	120	60	720	
960	40	780	140	120	60	960	keseimbangan
1.200	40	960	200	120	60	1.040	Kontraksi
1.440	40	1.040	260	120	60	1.220	

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila penurunan agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat ($Y = C + I + G$) maka bocoran sama dengan suntikan ($S + T = I + G$). Data tabel di atas juga menunjukkan keseimbangan bocoran suntikan tersebut. Bocoran ($S + T$) adalah $140 + 40 = 180$ (triliun rupiah) dan suntikan ($I + G$) adalah $120 + 60 = 180$ (triliun rupiah).

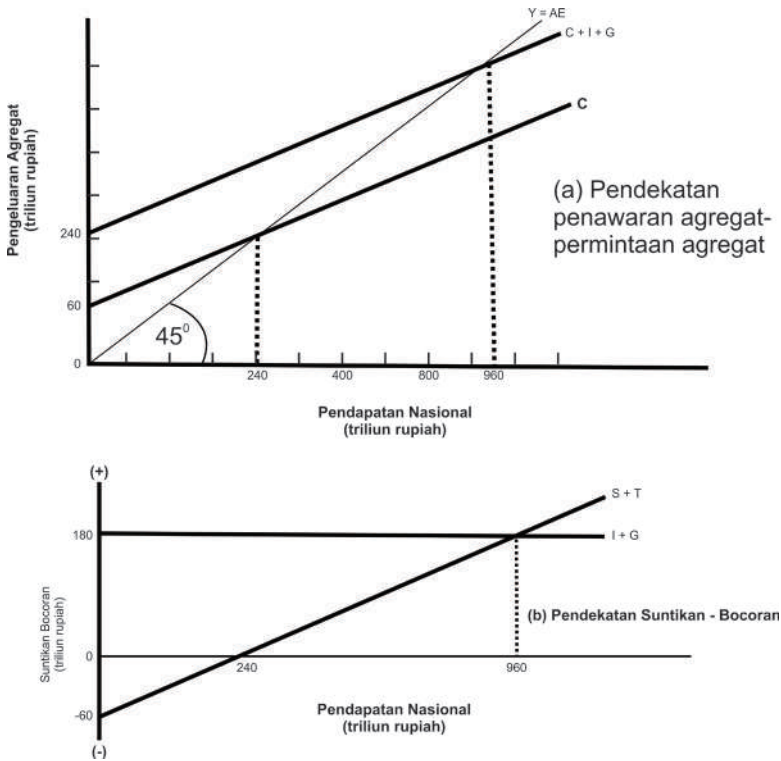
b. Keseimbangan Secara Grafik

Gambaran secara grafik dapat dibedakan dengan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan penawaran agregat – pengeluaran agregat ($Y = AE$). *Kedua*, pendekatan suntikan – kebocoran ($J = W$).

Dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat – pengeluaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat $C = I + G$ memotong garis 45 derajat (garis $Y = AE$). Titik perpotongan kedua garis tersebut menggambarkan keseimbangan perekonomian dimana $Y = C + I + G$. Dalam pendekatan suntikan – bocoran, keseimbangan tercapai pada perpotongan fungsi suntikan ($I + G$) dan fungsi bocoran ($S + T$).

Grafik (a) dalam gambar 25 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat. Berdasarkan data dalam tabel 7 fungsi konsumsi adalah $C = 60 + 0,75Y$ dan fungsi pembelanjaan agregat adalah $AE = 240 + 0,75Y$. Fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat (yaitu dimana $Y = C$) pada $Y = 240$ dan fungsi pembelanjaan agregat AE memotong garis 45 derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan ($Y = 960$). Gambar 25b menunjukkan keseimbangan mengikuti pendekatan suntikan-bocoran. Fungsi suntikan adalah $I + G = 120 + 60 = 180$, dan fungsi bocoran adalah $S + T = (-100 + 0,25Y) + 40 = -60 + 0,25Y$. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada $Y = 240$ dan memotong fungsi suntikan pada pendapatan negara keseimbangan ($Y = 960$).

Gambar 25:
Pajak Tetap dan Keseimbangan Secara Grafik



c. Keseimbangan Secara Aljabar

Dalam pendekatan penawaran agregat – permintaan agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila $Y = C + I + G$. Dalam contoh angka telah dimisalkan dan diterangkan bahwa:

$$C = 60 + 0,75Y \text{ dan } S = -100 + 0,25Y$$

$$I = 120$$

$$G = 60$$

Dengan demikian pendapatan nasional pada keseimbangan adalah (dalam triliun rupiah).

$$\begin{aligned}
 Y &= C + I + G \\
 Y &= 60 + 0,75Y + 120 + 60 \\
 0,25Y &= 240 \\
 Y &= 960
 \end{aligned}$$

Pendapatan nasional pada keseimbangan dapat juga dihitung dengan menggunakan pendekatan suntikan – bocoran, yaitu:

$$\begin{aligned}
 I + G &= S + T \\
 120 + 60 &= -100 + 0,25 + 40 \\
 0,25Y &= 240 \\
 Y &= 960
 \end{aligned}$$

2. Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan

Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional digunakan pemisalan-pemisalan berikut. *Pertama*, persentase (kadar) pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, di mana fungsi konsumsi adalah $C = 90 + 0,60Y$ dan fungsi tabungan adalah $S = -90 + 0,20Y$. Fungsi pajak adalah $T = 0,20Y$. *Kedua*, investasi perusahaan, yaitu $I = 150$ (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah $G = 240$ (triliun rupiah).

Berdasarkan pemisalan di atas, dalam uraian berikut ini diterangkan keseimbangan pendapatan nasional secara angka, grafik dan aljabar.

a. Keseimbangan Secara Angka

Keseimbangan ini ditunjukkan dalam tabel 8 bagian 2. Data dalam kolom 1, 2, 3 dan 4. Investasi perusahaan dan

pengeluaran pemerintah berturut-turun ditunjukkan dalam kolom 5, dan 6. Pembelanjaan agregat ($AE = C + I + G$) ditunjukkan dalam kolom 7.

Apabila dibandingkan data dalam kolom 1 yang menunjukkan data pendapatan nasional dengan data dalam kolom 7, yaitu data pengeluaran agregat, didapati bahwa apabila pendapatan nasional kurang dari $Y = 1200$ (triliun rupiah) maka pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional ($AE > Y$) dan ini akan menyebabkan ekspansi dalam ekonomi. Apabila $Y > 1200$ (misalnya pada $Y = 1440$ triliun rupiah) pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional. Stock barang dalam perekonomian bertambah dan kontraksi dalam kegiatan ekonomi berlaku. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila $Y = 1200$ (triliun rupiah) karena pada tingkat ini pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional ini juga suntikan sama dengan bocoran, yaitu $I + G = 150 + 240 = 390$ dan $S + T = 150 + 240 = 390$.

Tabel 8
Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan
(dalam triliun rupiah)

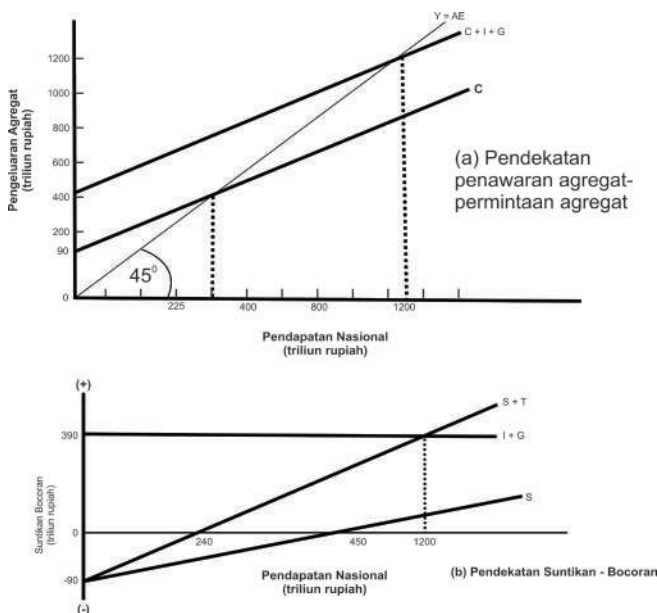
Y (1)	T (2)	C (3)	S (4)	I (5)	G (6)	AE = C + I + G (7)	Keadaan Ekonomi (8)
0	0	90	-100	150	240	480	Ekspansi
240	48	234	-40	150	240	624	
480	96	278	20	150	240	768	
720	144	522	80	150	240	912	
960	192	666		150	240	1.056	keseimbangan
1.200	240	810	150	150	240	1.200	Kontraksi
1.440	288	954	198	150	240	1.344	

b. Keseimbangan Secara Grafik

Grafik (a) menunjukkan keseimbangan mengikut penawaran agregat-permintaan agregat. Fungsi konsumsi adalah $C = 90 + 0.60Y$ dan fungsi perbelanjaan agregat adalah $AE = 480 + 0.60Y$. Fungsi konsumsi memotong garis 45-derajat pada $Y = 225$ (yaitu pada ketika $Y = C$) dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45-derajat apabila pendapatan nasional mencapai keseimbangan ($Y = 1200$).

Gambar 26 menunjukkan keseimbangan mengikuti pendekatan suntikan-bocoran. Fungsi suntikan adalah $I + G = 150 + 240 = 390$ dan fungsi bocoran $S + T = -190 + 0.20Y + 0.20Y = -90 + 0.40Y$. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada $Y = 225$ (yaitu pada pendapatan nasional di mana $C = Y$) dan memotong fungsi suntikan pada $Y = 1200$, yaitu pendapatan nasional yang dicapai pada tingkat keseimbangan.

Gambar 26
Pajak Proporsional dan Keseimbangan
Pendapatan Nasional



c. Keseimbangan Secara Aljabar

Persamaan konsumsi dan tabungan adalah:

$$C = 90 + 0,60Y$$

$$S = -90 + 0,20Y$$

Sedangkan $I = 150$ dan $G = 240$. Menurut pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat keseimbangan dicapai pada $Y = C + I + G$. Dengan demikian pendapatan nasional adalah (dalam triliun rupiah):

$$Y = 90 + 0,60Y + 150 + 240$$

$$0,40Y = 480$$

$$Y = 1200$$

Keseimbangan menurut pendekatan suntikan-bocoran dicapai apabila $I + G = S + T$, dengan demikian pendapatan nasional adalah (dalam triliun rupiah):

$$I + G = S + T$$

$$150 + 240 = -90 + 0,20Y + 0,20Y$$

$$0,40Y = 480$$

$$Y = 1200$$

G. Multiplier dalam Perekonomian Tiga Sektor

Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional yang lebih besar dari perubahan pembelanjaan agregat sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya proses multiplier. Untuk melihat mengenai proses multiplier dalam perekonomian tiga sektor, dua analisis akan dibuat, yaitu: *analisis dengan menggunakan contoh angka dan dengan analisis secara aljabar*.

1. Multiplier dengan Angka

Dalam contoh angka ini digambarkan dua keadaan, yaitu dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak tetap dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Dalam kedua keadaan tersebut dimisalkan sektor perusahaan memutuskan untuk menambah investasi sebanyak Rp 20 triliun. Dalam perekonomian tersebut kecondongan konsumsi marginal pendapatan disposebel (MPC) adalah 0,75 dan pajak proporsional adalah $T = 0.20Y$. Proses multiplier dalam perekonomian dengan sistem pajak tetap, dan di Bagian 2 digambarkan proses multiplier yang akan berlaku dalam perekonomian dengan sistem pajak proporsional.

Tabel 9

Multiplier dalam Ekonomi Tiga Sektor (dalam triliun rupiah)

Tahap Proses Multiplier	Pertambahan Pendapatan Nasional (ΔY)	Pertambahan Pajak (ΔT)	Pertambahan Pendapatan Disposebel (ΔY_d)	Pertambahan Konsumsi (ΔC)	Pertambahan Tabungan (ΔS)
Bagian 1 : Sistem Pajak Tetap					
I	$\Delta I - \Delta Y_1 = 20$	0	20	15	5
II	$\Delta Y_2 = 15$	0	25	11,25	3,75
III	$\Delta Y_3 = 11,25$	0	11	8,4375	2,8125
Dst
Jumlah Total	$\Delta Y = 80$	$\Delta T = 0$	$\Delta Y_d = 80$	$\Delta C = 60$	$\Delta S = 20$
Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional					
I	$\Delta I - \Delta Y_1 = 20$	4	16	12	4
II	$\Delta Y_2 = 12$	3,2	12,8	9,6	3,2
III	$\Delta Y_3 = 9,6$	1,92	7,68	5,76	1,92
Dst
Jumlah Total	$\Delta Y = 50$	$\Delta T = 10$	$\Delta Y_d = 40$	$\Delta C = 30$	$\Delta S = 10$

Contoh angka dalam Bagian I menunjukkan tambahan investasi sebanyak $\Delta I = 20$ pada mulanya (pada tahap pertama proses multiplier) dan menambah pendapatan nasional sebanyak $\Delta Y_1 = 20$. Kenaikan ini tidak menambah pajak ($\Delta T = 0$). Maka pendapatan disposebel bertambah sebanyak $\Delta Y_1 = \Delta I$ juga. Tambahan pendapatan ini menyebabkan konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak $\Delta S = 0,75(20) = 15$ dan tabungan sebanyak $\Delta S = 0,25(20) = 5$. Pertambahan konsumsi rumah tangga sebanyak $\Delta C = 15$ akan menambah pendapatan nasional sebanyak $\Delta Y_1 = \Delta C = 15$.

Pertambahan tersebut akan menimbulkan tahap *kedua* proses multiplier. Pada akhir proses multiplier tersebut pendapatan nasional bertambah sebanyak Rp 80 triliun, konsumsi sebanyak Rp 60 triliun dan tabungan sebanyak Rp 20 triliun. Dalam contoh ditunjukkan bahwa pendapatan nasional bertambah 4 kali lipat dari pertambahan investasi.

Contoh angka dalam Bagian 2 menggambarkan bagaimana pajak proporsional akan memengaruhi proses multiplier. Pada tahap I dari proses multiplier, pertambahan investasi sebanyak $\Delta I = 20$ akan menyebabkan pertambahan pendapatan nasional yang sama besarnya, yaitu $\Delta I = \Delta Y_1 = 20$. Pertambahan pendapatan nasional ini menyebabkan pajak bertambah sebanyak $\Delta T = 0,20(20) = 4$, dan oleh sebab itu pendapatan disposebel akan bertambah sebanyak $\Delta Y_d = 20 - 4 = 16$. Kenaikan pendapatan disposebel ini akan menambah konsumsi rumah tangga sebanyak $\Delta C = 0,75(16) = 12$ dan tabungan sebanyak $\Delta S = 0,25(16) = 4$.

Kenaikan konsumsi sebanyak $\Delta C = 12$ akan menaikkan pendapatan nasional lagi, yaitu sebanyak $\Delta C = \Delta Y_1 = 12$, dan ini akan menciptakan tahap kedua dari proses multiplier. Apabila proses multiplier itu terus berjalan, pada akhirnya pendapatan

nasional terus bertambah sebanyak 50 triliun, sedangkan pajak, konsumsi dan tabungan berturut-turut bertambah sebanyak 10 triliun, Rp 30 triliun dan Rp 10 triliun. Contoh ini menunjukkan dalam perekonomian dengan sistem pajak proporsional pendapatan nasional bertambah hanya 21/2 kali lipat dari pertambahan investasi yang sebelumnya.

Dari kedua contoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa multiplier lebih besar dalam sistem pajak tetap atau jika dibandingkan dengan sistem pajak proporsional.

2. Menghitung Nilai Multiplier

Uraian mengenai proses multiplier dengan menggunakan contoh angka dapat menerangkan bagaimana proses tersebut terwujud, tetapi tidak menerangkan secara jelas bagaimana menentukan besarnya nilai multiplier. Perhitungan nilai multiplier dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan aljabar. Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan perbelanjaan agregat bukan saja diakibatkan oleh perubahan dalam investasi, tetapi juga oleh pajak dan pengeluaran pemerintah. Besarnya nilai multiplier dari perubahan berbagai faktor tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Tiga jenis multiplier akan ditentukan besarnya, yaitu multiplier investasi, multiplier pengeluaran pemerintah dan multiplier perubahan pajak.

Perhitungan nilai multiplier yang akan diterangkan menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut:

- (i) Fungsi konsumsi adalah $C = a + Y_d$
- (ii) Dua sistem pajak akan digunakan. Dalam contoh yang pajaknya adalah pajak tetap, yaitu $T = T_x$, sedangkan dalam contoh kedua pajak proporsional, yaitu $T = tY$.
- (iii) Fungsi investasi yang asal adalah I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G

a. Multiplier Investasi

Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi bertambah dari I menjadi I_1 dan besar pertambahannya adalah ΔI .

- 1) **Sistem pajak tetap.** Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional yang sah adalah:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = a + bY_d + I + G$$

$$Y = a + b(Y - T_x) + I + G$$

$$Y - bY = a - bT_x + I + G$$

$$Y = \frac{1}{1-b}(a - bT_x + I + G)$$

Pertambahan investasi sebanyak ΔI (dari I menjadi I_1) menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi Y_1 , dan nilainya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Y_1 = C + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = a + bY_d + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = a + b(Y_1 - T_x) + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = a + bY_1 - bT_x + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 - bY_1 = a - bT_x + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = \frac{1}{1-b}(a - bT_x + I + G)$$

Perhitungan di atas menunjukkan pertambahan investasi sebesar ΔI akan menambah pendapatan nasional dari

$$Y = \frac{1}{1-b}(a - bT_x + I + G)$$

Menjadi:

$$Y_1 = \frac{1}{1-b} (a - bT_x + I + \Delta I + G)$$

Dengan demikian proses multiplier menambah pendapatan nasional sebesar seperti yang dinyatakan persamaan berikut:

$$\Delta Y = Y_1 - Y = \frac{1}{1-b} \Delta I$$

- 2) **Sistem pajak proporsional.** Sebelum ada kenaikan investasi tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian adalah

$$Y = a + bY_d + I + G$$

$$Y = a + b(1-t)Y + I + G$$

$$Y = a + bY - btY + I + G$$

$$Y - bY + btY = a + I + G$$

$$Y(1 - b + bt) = a + I + G$$

$$Y = \frac{1}{1-b+bt} (a + I + G)$$

Pertambahan investasi sebanyak ΔI (dari I menjadi I_1) menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi Y_1 dan nilainya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Y_1 = a + bY_d + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = a + bY_1 - btY_1 + I + \Delta I + G$$

$$Y_1(a - b + bt) = a + I + \Delta I + G$$

$$Y = \frac{1}{1-b+bt} (a + I + \Delta I + G)$$

Dari perhitungan di atas, nyatalah bahwa pertambahan investasi sebanyak ΔI akan menaikkan pendapatan nasional dari

$$Y = \frac{1}{1-b+bt} (a + I + G)$$

Menjadi:

$$Y_1 = \frac{1}{1 - b + bt} (a + I + \Delta I + G)$$

Yaitu suatu kenaikan pendapatan nasional (ΔY) sebanyak:

$$\Delta Y = Y_1 - Y = \frac{1}{1 - b + bt} \Delta I$$

Dengan demikian pertambahan pendapatan nasional (ΔY) yang akan terwujud dalam perekonomian 1 ga sektor dengan sistem pajak proporsional adalah $\frac{1}{1 - b + bt}$ kali lipat dari pertambahan investasi (ΔI) yang berlaku.

Contoh Menghitung Multiplier Investasi

Dalam contoh yang digambarkan dalam Tabel 9 dimisalkan:

- (i) $MPC = b = 0,75$
- (ii) Pajak proporsional adalah $T = 0,20Y$
- (iii) Pertambahan investasi adalah Rp 20 triliun.

Dengan menggunakan formula-formula yang telah diterangkan sekarang dapat ditentukan nilai multiplier investasi, yaitu banyaknya pertambahan pendapatan nasional sebagai akibat pertambahan investasi yang dimisalkan di atas.

- ✓ Multiplier dalam sistem pajak tetap. Kenaikan investasi sebanyak Rp 20 triliun akan menambah pendapatan nasional sebanyak (dalam triliun rupiah)

$$\begin{aligned} \Delta Y &= \frac{1}{1 - b} \Delta I \\ \Delta Y &= 20) \frac{1}{1 - 0.75} \\ \Delta Y &= 4(20) = 80 \end{aligned}$$

Sesuai dengan perhitungan dalam tabel 9 penghitungan tersebut juga menunjukkan multiplier adalah 4.

- ✓ Dalam sistem pajak proporsional. Kenaikan investasi sebanyak Rp 20 triliun akan menambah kenaikan pendapatan nasional sebanyak (triliun rupiah)

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - b + bt} \Delta I$$

$$\Delta Y = 20) \frac{1}{1 - 0.75 + 0.75(0.20)}$$

$$Y = 20) \frac{1}{1 - 0.75 + 0.15}$$

$$\Delta Y = 2,5 (20) = 50$$

Sesuai dengan penghitungan dalam Tabel 9, penghitungan tersebut juga menunjukkan bahwa multiplier adalah 2,5.

b. Multiplier Pengeluaran Pemerintah

Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, penambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan penambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier penambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini maka nilai multiplier dari perubahan investai adalah sama dengan nilai multiplier dari perubahan pengeluaran pemerintah.

- 1) Sistem pajak tetap. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah $\frac{1}{1 - b}$ dan kenaikan

pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung dengan persamaan:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - b} \Delta G$$

- 2) Sistem pajak proporsional. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah $\frac{1}{1 - b + bt}$ dan kenaikan pendapatan nasional adalah ΔY dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - b + bt} \Delta G$$

c. Multiplier Pajak

Perubahan pajak menyebabkan efek berbeda dari yang diakibatkan oleh perubahan investasi dan pembelanjaan pemerintah. Perubahan pajak tidak secara langsung mengakibatkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Terlebih dahulu ia akan memengaruhi pendapatan disposebel. Selanjutnya pendapatan disposebel akan memengaruhi konsumsi rumah tangga. Baru pada tingkat ini berlaku perubahan dalam pengeluaran agregat yang seterusnya akan mewujudkan proses multiplier dan perubahan pendapatan nasional.

Apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan sebesar ΔT_x maka pendapatan disposebel akan turun sebesar $\Delta Y_d = -\Delta T_x$. Selanjutnya konsumsi (dan pengeluaran agregat) akan turun sebanyak:

$$\Delta C = \Delta AE = MPC \times \Delta T_x$$

Karena $MPC < 1$, maka $MPC \times \Delta T_x$ adalah lebih kecil ΔT . Dengan demikian, dari persamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai multiplier pajak adalah lebih kecil

dari multiplier yang diakibatkan oleh perubahan investasi atau pengeluaran pemerintah. Uraian di bawah ini akan menerangkan nilai multiplier dari perubahan pajak.

- 1) Sistem pajak tetap. Dalam perekonomian yang bersistem pajak tetap, seperti telah ditunjukkan dalam uraian mengenai multiplier investasi, pendapatan nasional yang asal dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{1-b} (a - bT_x + I + G)$$

Apabila pajak diturunkan sebanyak ΔT maka konsumsi dan perbelanjaan agregat akan bertambah sebanyak:

$$\Delta C = \Delta AE = b\Delta T$$

Dengan demikian pendapatan nasional yang baru dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$Y = \frac{1}{1-b} (a - bT + b\Delta T_x + I + G)$$

Apabila pendapatan nasional yang baru (Y_1) dikurangi dengan pendapatan nasional yang asal (Y), tambahan pendapatan nasional yang wujud ($\Delta Y = Y_1 - Y$) adalah:

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b} b\Delta T_x$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-b} \Delta T_x$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menambah pendapatan nasional (ΔY) sebanyak $\frac{1}{1-b}$ dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan.

- 2) Sistem pajak proporsional. Sekali lagi dimisalkan bahwa dalam perekonomian pajak yang dipungut dikurangi

sebanyak ΔT . Maka fungsi konsumsi dan pengeluaran agregat akan mengalami pertambahan sebanyak:

$$\Delta C = \Delta AE = b\Delta T_x$$

Sebelum dilakukan pengurangan pajak, pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor adalah (lihat uraian mengenai multiplier investasi):

$$Y = \frac{1}{1 - b + bt} (a + I + G)$$

Pengurangan pajak sebesar ΔT_x menaikkan konsumsi sebanyak $b\Delta T$ dan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional Y_1 yang nilainya dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$Y_1 = \frac{1}{1 - b + bt} (a + bT_x + I + G)$$

Dengan demikian pertambahan dalam pendapatan nasional ($\Delta Y = Y_1 - Y$) yang dapat ditentukan dengan menggunakan formula:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - b + bt} (b\Delta T_x)$$

Atau:

$$\Delta Y = \frac{b}{1 - b + bt} (\Delta T_x)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menaikkan pendapatan nasional sebanyak $\frac{b}{1 - b + bt}$ dikali dengan pengurangan pajak yang berlaku.



BAB

VIII

KESEIMBANGAN DI PASAR BARANG

Keseimbangan pasar barang menunjukkan bagaimana terciptanya suku bunga dengan pendapatan nasional. Keseimbangan ini sedikit berbeda dengan analisis keseimbangan pendapatan nasional, di mana fungsi investasinya bersifat endogen. Investasi dipengaruhi oleh suku bunga.

$$I = f(i)$$

Bentuk persamaan investasi adalah linier sebagai berikut:

$$I = I_0 - ki$$

Dimana:

b = Investasi minimum (*autonomous investment*)

i = Suku bunga

k = Koefisien tingkat bunga

A. Kurva IS untuk Model Dua Sektor

Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan kondisi di pasar barang. Kurva ini menunjukkan titik-titik keseimbangan

antara berbagai tingkat bunga (i) dengan berbagai pendapatan nasional (Y). Keseimbangan pasar barang pada model dua sektor menggambarkan keseimbangan sektor rumah tangga dengan swasta. Dalam membentuk keseimbangan pasar barang dapat dilakukan dengan cara: (1) mencari keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran, dan (2) keseimbangan kebocoran dan injeksi.

✓ Keseimbangan pendapatan dan pengeluaran : $Y = C + I$

✓ Keseimbangan kebocoran-injeksi : $S = I$

Contoh:

Diketahui fungsi konsumsi masyarakat adalah $C = 40 + 0,8Y_d$ dan fungsi investasi adalah $I = 55 - 200_i$. Tentukan persamaan kurva IS dan bagaimana kurva IS dalam empat kuadran?

Jawab:

Persamaan kurva IS

(i) Pendekatan pendapatan = pengeluaran

$$Y = C + I$$

$$Y = 40 + 0,8Y + 55 - 200_i$$

$$Y - 0,8Y = 95 - 200_i$$

$$0,2Y = 95 - 200_i$$

$$Y = 475 - 1000_i$$

(ii) Pendekatan kebocoran – injeksi

$$S = I$$

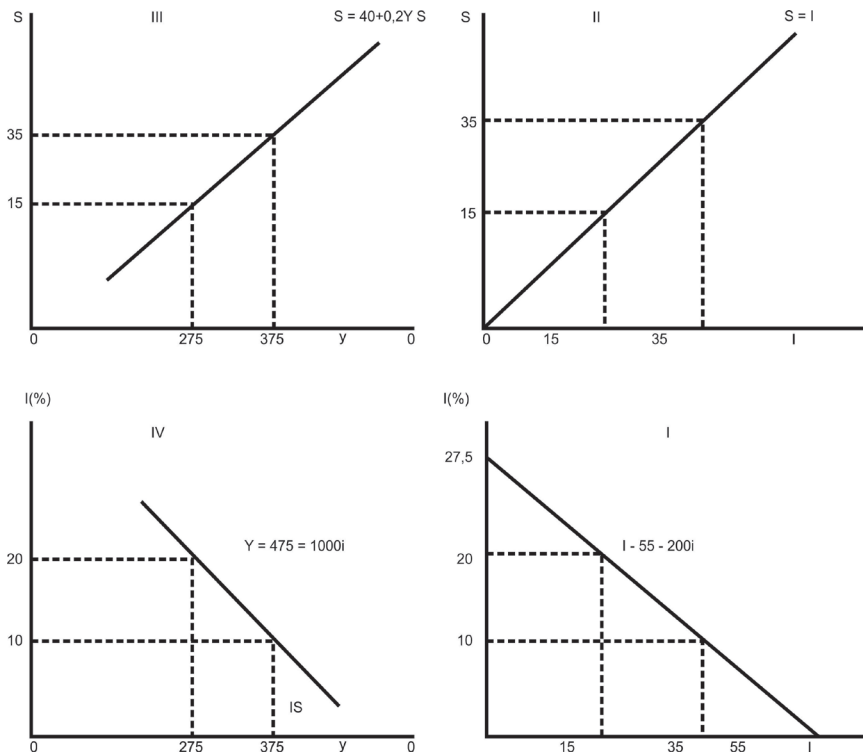
$$-40 + 0,2Y = 55 - 200_i$$

$$0,2Y = 95 - 200_i$$

$$Y = 475 - 1000_i$$

Jadi persamaan kurva IS adalah $Y = 475 - 1000_i$

Gambar 27
Proses Terbentuknya Kurva IS Dua Model



B. Kurva IS untuk Model Tiga Sektor

Dalam kurva IS untuk model 3 sektor terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, swasta dan pemerintah. Contoh: Pada suatu negara terdapat fungsi konsumsi $C = 100 + 0,75Y_d$. Fungsi investasi dan fungsi pajak negara itu masing-masing adalah $I = 125 - 600_i$ dan $T_x = 20 + 0,2Y$. Apabila pengeluaran pemerintah adalah 50 ($G = 50$). Hitunglah persamaan kurva IS dan gambarkan kurvanya.

Jawab:

(1) Pendekatan pendapatan = pengeluaran

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,75(Y - 20 - 0,2Y) + 125 - 600_i + 50$$

$$Y = 275 + 0,75Y - 15 - 0,15Y$$

$$Y - 0,6Y = 260 - 600_i$$

$$0,4Y = 260 - 600_i$$

$$Y = 650 - 1500_i$$

(2) Pendekatan kebocoran = injeksi

$$S + T = I + G$$

$$C = 100 + 0,75(Y - 20 - 0,2Y)$$

$$C = 100 + 0,75Y - 15 - 0,15Y$$

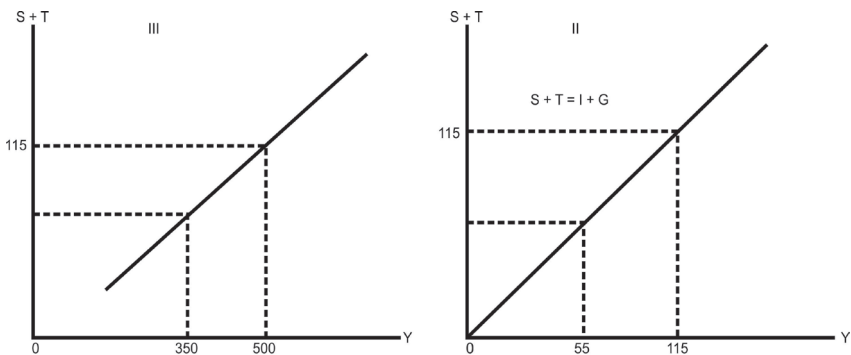
$$C = 85 + 0,6Y$$

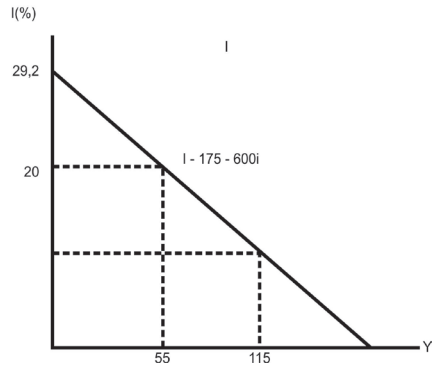
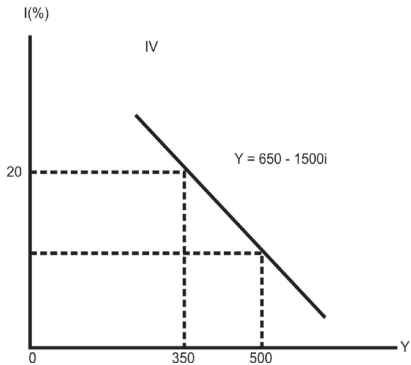
$$-85 + 0,4Y = 125 - 600_i + 50$$

$$0,4Y = 260 - 600_i$$

$$Y = 650 - 1500_i$$

Gambar 28
Proses Terbentuknya Kurva IS Tiga Model





C. Kurva IS untuk Model Empat Sektor

Pada sistem perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka, terdapat 4 (empat) pelaku ekonomi. Contoh: Masyarakat di suatu negara memiliki fungsi konsumsi adalah $C = 99 + 0,8Y_d$. Besarnya pajak dan subsidi negara adalah 10 dan 5. Dengan fungsi impor adalah $I = 70 - 1000i$. Apabila pengeluaran pemerintah $G = 50$, ekspor sebesar $X = 200$ dan impor $M = 100$, hitunglah kurva IS-Nya.

Jawab:

(1) Pendekatan pendapatan = pengeluaran

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 99 + 0,8(Y - 10 - 5) + 70 - 1000i + 50 + 200 - 100$$

$$Y = 319 + 0,8Y - 4 - 1000i$$

$$Y - 0,8Y = 315 - 1000i$$

$$Y = 1.575 - 5000i$$

(2) Pendekatan kebocoran = injeksi

$$S + T = I + G$$

$$C = 99 + 0,8(Y - 10 + 5)$$

$$C = 99 + 0,8Y - 4$$

$$C = 95 + 0,8Y$$

$$-95 + 0,2Y = 70 - 600_i = 50 = 200$$

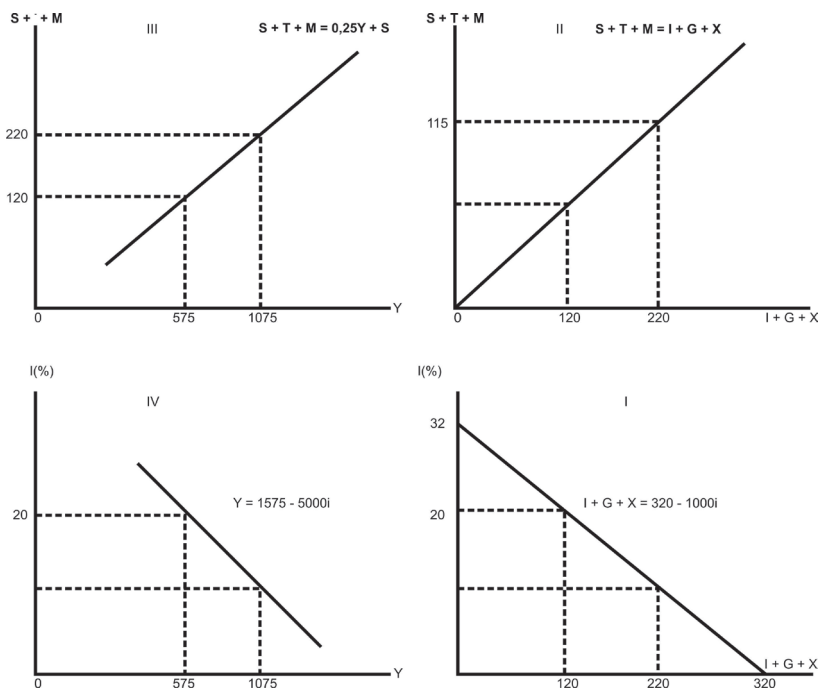
$$0,2Y = 315 - 600_i$$

$$Y = 1.575 - 5000_i$$

Gambar kurva IS adalah:

Gambar 29

Proses Terbentuknya Kurva IS Empat Model

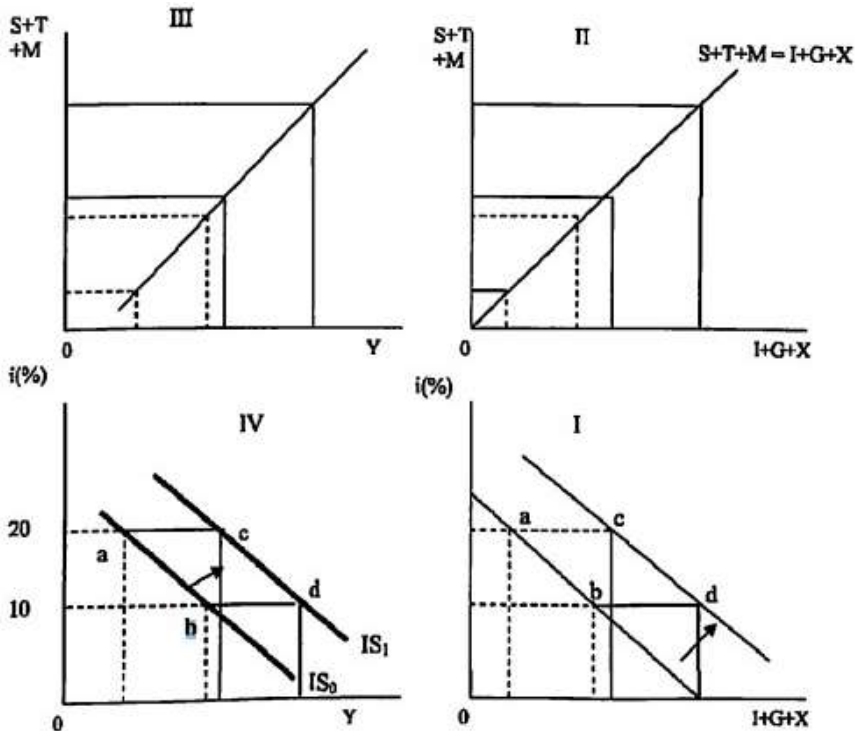


D. Pergeseran Kurva IS

Kurva IS dapat bergeser ke kanan ataupun ke kiri akibat adanya pengaruh variabel injeksi maupun variabel kebocoran. Apabila investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bertambah, maka

kurva IS akan bergeser ke kanan. Sementara itu, apabila variabel-variabel tersebut berkurang, maka kurva IS akan begeser ke kiri.

Gambar 30
Pergeseran Kurva IS



Adanya pertambahan pada pengeluaran pemerintah menyebabkan kurva IS bergeser dari IS_0 ke IS_1 . Apabila variabel kebocoran (pajak, tabungan dan impor) berkurang, maka kurva IS juga akan bergeser ke kanan dan akan bergeser ke kiri apabila variabel kebocoran bertambah.



BAB IX

KESEIMBANGAN DI PASAR UANG

Keseimbangan pasar uang tercapai ketika keseimbangan antara permintaan uang dengan penawaran uang ($M_d = M_s$). Dari keseimbangan tersebut akan terbentuk kurva LM yang mencerminkan titik-titik keseimbangan bunga dengan pendapatan nasional di pasar uang. Sebelum membahas mengenai keseimbangan di pasar uang, maka terlebih dahulu akan diuraikan terkait dengan teori-teori permintaan uang, antara lain teori permintaan uang sebelum Keynes. Teori permintaan uang menurut Keynes, dan teori setelah Keynes (*post Keynes*).

Teori permintaan sebelum Keynes sering juga disebut sebagai teori permintaan uang klasik. Dikatakan klasik karena landasan pemikiran mengenai perekonomian dalam teori tersebut menggunakan asumsi klasik, yaitu perekonomian selalu berada dalam keadaan seimbang.

A. Teori Klasik Tentang Permintaan Uang

1. Teori Irving Fisher

Irving Fisher melihat fungsi uang sebagai alat pertukaran. Menurutnya, apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli

maka terjadi pertukaran antara uang dengan barang/jasa, sehingga nilai uang akan sama dengan nilai barang/jasa tersebut. Keadaan ini digambarkan oleh Fisher dalam sebuah persamaan: $MV = PT$.

Dimana:

M = Jumlah uang yang beredar

V = Velositas atau perputaran uang

P = Harga barang/ Jasa

T = Banyaknya transaksi

Jumlah uang beredar (M) ditentukan oleh otoritas moneter (bank sentral). Velositas uang dipengaruhi oleh budaya, institusi dan teknologi. Misalnya, bagi masyarakat di negara sedang berkembang, penggunaan uang dalam transaksi akan lebih besar dibanding di negara yang sudah maju, di mana mereka lebih sering menggunakan kartu kredit dan debit dalam bertransaksi. Penggunaan kartu kredit dan debit dapat menyebabkan velositas uang menjadi kecil, namun menurut Fisher, velositas uang dalam jangka pendek bersifat tetap. karena tidak mudah untuk merubah kebiasaan (budaya) dan teknologi dalam waktu yang cepat. Transaksi perdagangan juga dalam jangka pendek bersifat tetap. Karena itu, menurut Fisher apabila jumlah uang beredar bertambah banyak, maka secara langsung akan menyebabkan harga-harga barang menjadi naik (mahal). Fisher kemudian memodifikasi persamaan menjadi:

$$P = \frac{MV}{T}$$

Karena nilai V dan T konstan, maka harga akan berbanding lurus terhadap M (jumlah uang beredar). Bila uang beredar naik 2 kali, maka harga-harga barang secara umum juga naik 2 kali.

Dari persamaan tersebut, Fisher juga membuat fungsi permintaan uang sebagai berikut:

$$M_d = \frac{1}{V} PT$$

Permintaan uang berbanding lurus dengan jumlah transaksi dan berbanding terbalik dengan velositas uang.

2. Teori Cambridge

Menurut paham ini, uang berfungsi sebagai penyimpan kekayaan. Marshall dan Pigou berpendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk memegang uang tunai adalah tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan suku bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga, akan tetapi dalam jangka pendek semua faktor-faktor itu konstan. Menurut Cambridge, dalam jangka pendek permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan.

$$M_d = kY$$

Dimana:

$$k = \frac{1}{V}$$

Y = Pendapatan

B. Pandangan Keyens Tentang Permintaan Uang

Menurut Keynes, permintaan uang terdiri dari tiga motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi.

1. Motif Transaksi

Orang memegang uang untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari disebut sebagai permintaan uang untuk motif transaksi. Berapa besarnya uang yang dipegang tergantung pada pola pembayaran pendapatan dan jumlah penghasilan. Bila seseorang

digaji dalam harian, maka ia akan memegang uang lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang menerima gaji bulanan.

Menurut Keynes, orang rata-rata akan memegang uangnya sebesar $\frac{Y}{2}$. Apabila ia menerima gaji Rp 300.000 per bulan, maka ia akan rata-rata memegang uangnya sebesar Rp 150.000. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa besar-kecilnya seseorang memegang uang (permintaan uang) untuk motif transaksi tergantung dari pendapatannya $Md_t = f(Y)$.

2 Motif Berjaga-Jaga

Seseorang akan memegang uang tunai untuk berjaga-jaga karena adanya ketidakpastian yang dapat dialaminya. Misalnya, seseorang akan menyediakan uang untuk berjaga-jaga dalam mengantisipasi bila ia mengalami kecelakaan ataupun sakit sehingga dapat pergi ke dokter dan membeli obat.

Menurut Keynes, jumlah uang yang dipegang untuk berjaga-jaga tergantung dari tingkat penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka akan semakin besar pula uang yang dipegangnya untuk tujuan berjaga-jaga. Dengan demikian permintaan uang untuk tujuan transaksi (Md_t) dan berjaga-jaga (Md_p) sama-sama dipengaruhi oleh pendapatan.

$$ml = Md_t + Md_p$$

$$ml = f(Y)$$

3. Motif Spekulasi

Uang yang kita pegang secara tunai memiliki biaya (*cost*) yang disebut sebagai *opurtunity cost*. Biaya dari memegang uang tunai adalah bunga. Demikian pula apabila uang tunai itu digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Kita juga akan memperoleh pendapatan berupa bunga ataupun

deviden dari saham yang dibeli. Selain itu, pendapatan juga dapat diperoleh dari kenaikan harga saham.

Dalam permintaan uang untuk tujuan spekulasi, kita memegang uang untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jikalau nantinya ada surat berharga yang kita rasakan sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dari kepemilikan surat berharga tersebut. Fungsi permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah sebagai berikut:

$$m_2 = g(i)$$

Dimana:

m_2 = Permintaan uang untuk spekulasi

i = Suku bunga

Hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan suku bunga adalah negatif. Artinya setiap kenaikan suku bunga, maka permintaan uang untuk spekulasi akan berkurang, demikian sebaliknya apabila suku bunga turun, maka permintaan uang untuk spekulasi akan naik. Adanya hubungan yang terbalik antara suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi adalah karena adanya hubungan yang terbalik antara nilai surat berharga dengan suku bunga.

$$N = R_i$$

Dimana:

N = Harga/ nilai surat berharga

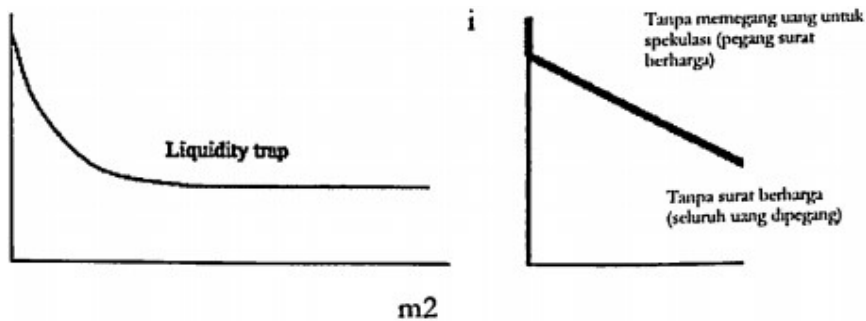
R = Pendapatan dari surat berharga

i = Suku bunga dari surat berharga

Apabila suku bunga (i) naik maka harga surat berharga (N) akan turun. Karena itu, orang-orang akan tertarik untuk

membeli surat berharga (obligasi) saat itu disebabkan harganya yang murah. Sedangkan apabila suku bunga turun, maka harga surat berharga akan mahal sehingga orang-orang tidak berminat untuk membelinya. Jika digambarkan dalam grafik, maka kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah sebagai berikut:

Gambar 31
Permintaan Uang untuk Spekulasi



Liquidity trap adalah daerah dimana suku bunga begitu rendah, sehingga harga surat berharga sangat tinggi. Pada daerah liquidity trap ini dipercaya suku bunga tidak akan turun lagi dari keadaan itu, karenanya harga surat berharga adalah yang tertinggi. Orang-orang tidak ada yang mau membeli surat berharga dan tidak ada bedanya antara memegang uang tunai dengan membeli surat berharga. Karena itu, orang akan lebih senang untuk memegang uang tunai. Pada keadaan ini, orang-orang yang memperkirakan akan adanya kenaikan suku bunga di masa yang akan datang, jadi lebih baik menunggu untuk membeli surat berharga di masa yang akan datang.

Dari penjelasan tentang motif permintaan uang di atas, dapat dijelaskan bahwa permintaan uang merupakan penjumlahan antara permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga (m_1) dengan permintaan uang untuk spekulasi (m_2) atau $M_d = m_1 + m_2$.

C. Penawaran Uang

Penawaran uang sering juga disebut jumlah uang yang beredar. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar baik itu di tangan masyarakat maupun di perbankan. Definisi uang beredar di masyarakat terdiri atas beberapa bagian:

1. Uang inti (*Base Money*)

Uang inti adalah uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau bank sentral suatu negara. Uang ini terdiri atas uang kartal (C) dan reserve (R). Uang kartal adalah uang yang dipegang oleh masyarakat yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Sementara reserve adalah cadangan uang yang terdapat di bank.

$$B = C + R$$

2. Uang Dekat (*Narrow Money* = M_1)

Uang dekat (M_1) terdiri dari uang kartal ditambah dengan demand deposit (rekening giro) atau $M_1 = C + DD$. Demand deposit terbentuk dari cadangan bank (R). Jadi dengan adanya cadangan bank (R), bank dapat menciptakan uang giral berupa rekening koran (giro). M_1 merupakan uang yang paling likuid, sebab proses untuk menjadi uang kontan (*cash*) sangat cepat.

3. Uang Luas (*Broad Money* = M_2)

Uang terdiri dari uang narrow (M_1) dan uang kuasi (*quasi money*) : $M_2 = M_1 + QM$. Uang kuasi terdiri dari *time deposit* (deposit berjangka) dan *saving deposit* (tabungan). Uang luas ini tingkat likuiditasnya lebih rendah dibandingkan uang M_1 , karena untuk merubahnya menjadi uang kontak membutuhkan waktu yang lebih lama. Uang dekat dapat digunakan secara langsung untuk bertransaksi, sedangkan uang luas tidak dapat. Tabungan

baru dapat dirubah menjadi uang kotan setelah kita melakukan penarikan uang tunai di bank atau ATM.

Jumlah uang luas (M_2) lebih besar dibandingkan jumlah uang M_1 dan *Base Money*, sehingga *broad money* ini menjadi barometer yang lebih baik untuk melihat seberapa besar jumlah uang beredar di suatu negara.

D. Pembentukan Kurva LM

Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika *money demand* (permintaan uang) sama dengan *money supply* (penawaran uang).

Dimana:

M_s = Penawaran uang

M_d = Permintaan uang

Dari keseimbangan tersebut, kita dapat menggambarkan bentuk kurva LM.

Contoh:

Otoritas moneter suatu negara telah mengedarkan uang sejumlah 500 triliun. Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga (m_1) masyarakatnya ialah $m_1 = 0,2Y$ dan fungsi permintaan uang untuk spekulasi adalah $m_2 = 428 - 400_i$. Turunkan persamaan Kurva LM dan gambarkan kurvanya.

Jawab:

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang.

$$M_d = M_s$$

$$M_d = m_1 + m_2$$

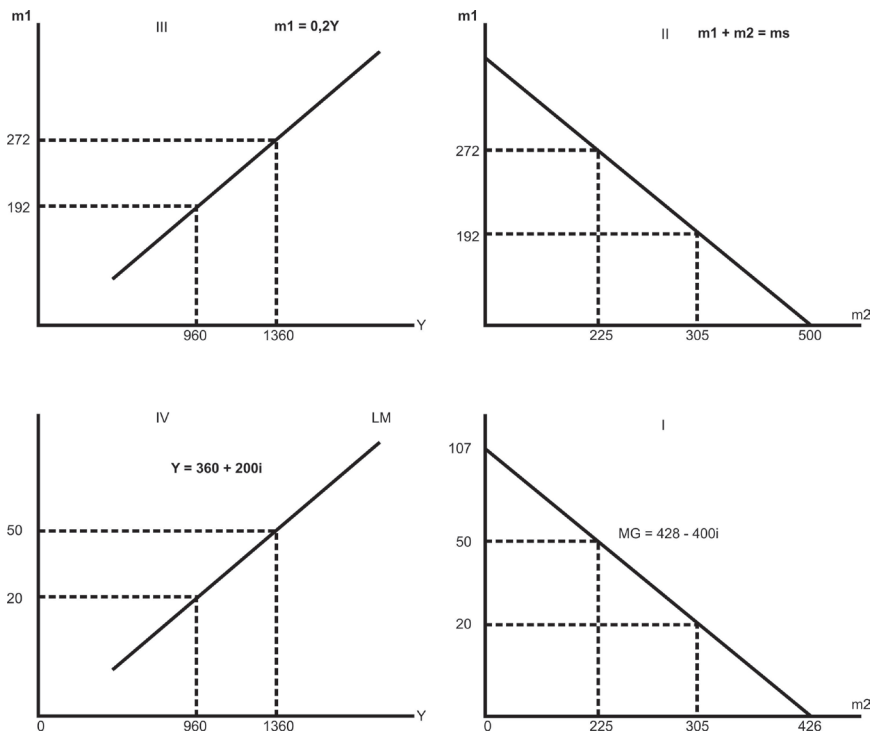
$$500 = 0,2Y + 428 - 400_i$$

$$0,2Y = 72 + 400_i$$

$$Y = 360 + 2000_i \text{ (persamaan kurva LM)}$$

Secara grafis penurunan kurva LM dari keseimbangan permintaan uang dan penawaran uang adalah sebagai berikut:

Gambar 32
Kurva LM (i)



Kurva LM memiliki kemiringan yang positif. Artinya semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara maka semakin tinggi pula suku bunga.

Contoh:

Bila diketahui

$$M_s = 200$$

$$M_1 = 0,25Y$$

$$M_2 = 50 - 200_i$$

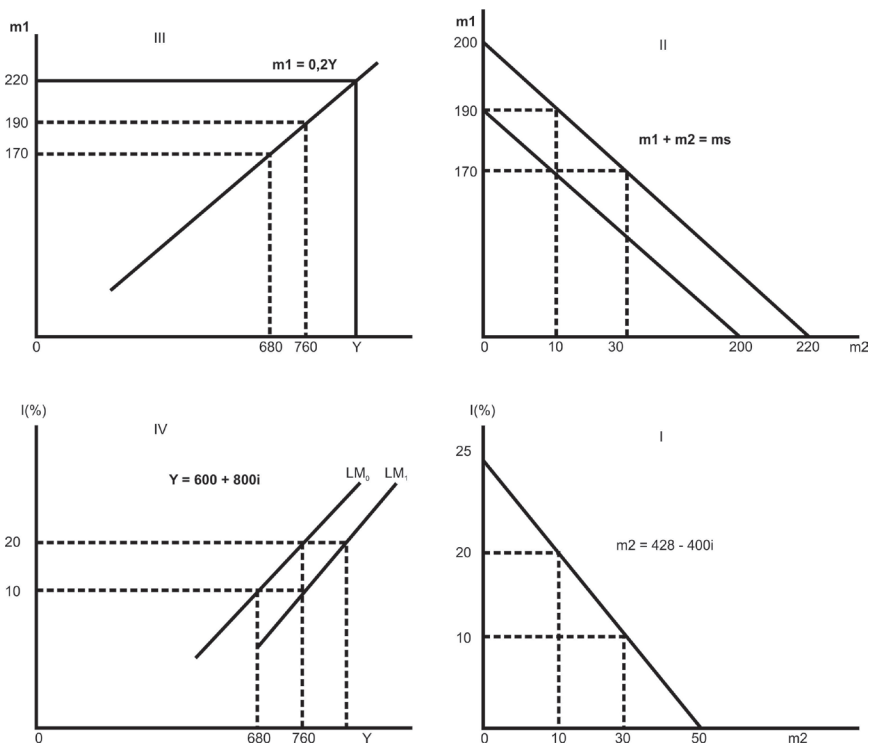
Ditanya: berapa keseimbangan pasar uang (kurva LM)?

Jawab:

$$\begin{aligned} M_s &= M_d \\ 200 &= 0,25Y + 50 - 200_i \\ 0,25Y &= 150 + 200_i \\ Y &= 600 + 800_i \end{aligned}$$

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik 4 kuadran diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 33:
Kurva LM (ii)



E. Pergeseran Kurva LM

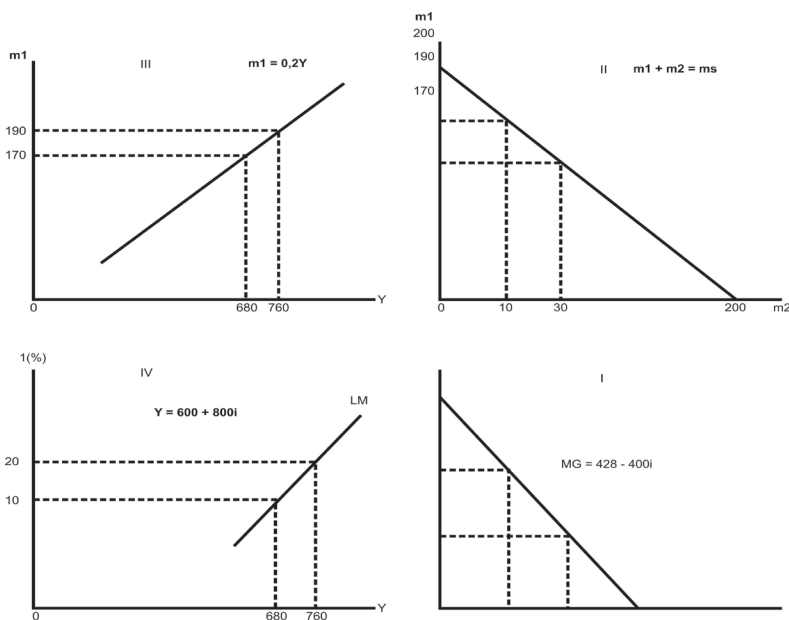
Jika permintaan uang dan jumlah uang yang beredar berubah, maka akan terjadi pergeseran pada kurva LM. Kurva LM akan bergeser ke kanan bila terjadi kenaikan jumlah uang beredar atau pengurangan permintaan uang. Kurva LM akan bergeser ke kiri bila terjadi pengurangan jumlah uang beredar atau kenaikan permintaan akan uang. Pergeseran kurva LM akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar sama dengan multipler uang $\frac{1}{k}$ dikalikan dengan perubahan jumlah uang beredar (M_s). k adalah koefisien dari permintaan uang untuk bertransaksi.

Contoh:

Misalkan persamaan kurva LM adalah $Y = 600 + 800i$, seperti gambar di atas. Terjadi kenaikan jumlah uang beredar dari 200 menjadi 220. Brapa persamaan kurva LM yang baru?

Gambar 34:

Pergeseran Kurva LM



Jawab:

$$M_s = M_d$$

$$200 + 20 = 0,25Y + 50 - 200_i$$

$$220 = 0,25Y + 50 - 200_i$$

$$0,25Y = 170 + 200_i$$

$$Y = 680 - 800_i$$

Adanya tambahan uang beredar 20 dan $k = 0,25$ menyebabkan pergeseran kurva LM (ΔLM) menjadi $\frac{1}{0,25} \times \Delta M_s = 4 \times 20 = 80$.
Persamaan kurva LM yang baru: $Y = (600 + \Delta LM) + 800_i$.

$$Y = (600 + 80) + 800_i$$

$$Y = 680 + 800_i$$

Gambar di atas menunjukkan bagaimana proses pergeseran kurva LM ketika adanya perubahan pada jumlah uang beredar. Kurva LM bergeser ke kanan ketika terjadi pertambahan jumlah uang beredar.



BAB X

KESEIMBANGAN UMUM PASAR BARANG DAN PASAR UANG

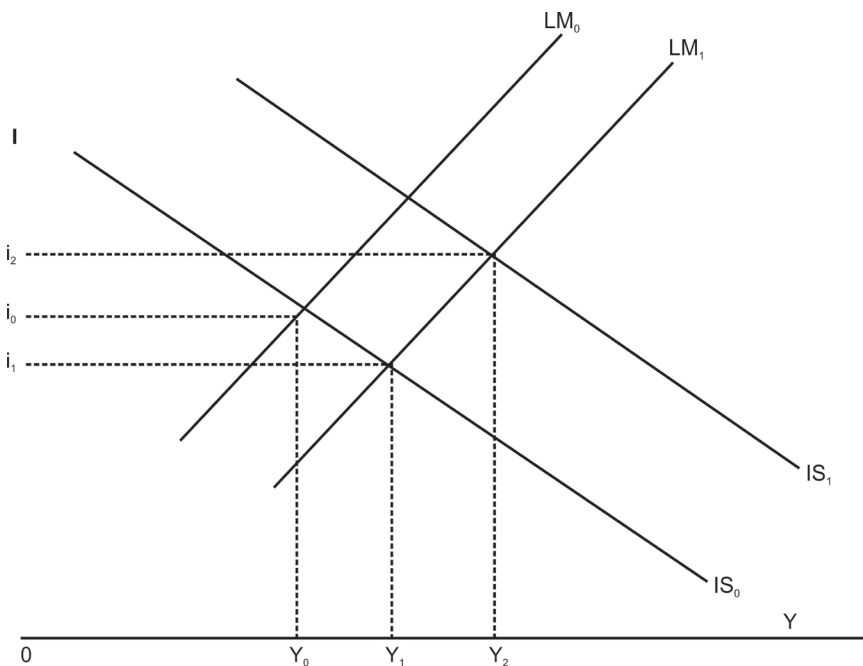
Dalam bab ini akan dijelaskan model keseimbangan dalam pasar barang dan pasar uang atau lebih populer dikenal dengan analisa IS-LM. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kurva IS menunjukkan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa, dan kurva LM menunjukkan keseimbangan untuk keseimbangan uang riil. Kurva IS dan LM bersama-sama menentukan tingkat bunga dan pendapatan keseimbangan dalam jangka pendek yang terjadi pada kedua pasar tersebut.

Pertemuan antara perpotongan kurva IS dan LM dinamakan keseimbangan umum (*general equilibrium*). Keseimbangan umum terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dari keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Dalam keadaan keseimbangan umum ini besarnya pendapatan nasional adalah Y^* dan tingkat bunga i^* yang mencerminkan nilai pendapatan dan tingkat bunga keseimbangan, baik yang berlaku di dalam pasar barang maupun pasar uang.

A. Keseimbangan Umum IS-LM

Kurva IS adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor riil atau pasar barang. Sementara kurva itu kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor keuangan atau pasar uang. Slope (kemiringan) dari kurva IS adalah negatif, sedangkan slope (kemiringan) dari kurva LM adalah positif. Kedua kurva ini akan berpotongan pada satu titik.

Gambar 35:
Keseimbangan IS-LM



Pada awalnya, keseimbangan terjadi pada saat kurva IS_0 , dan kurva LM_0 saling berpotongan. Keseimbangan ini menghasilkan tingkat bunga keseimbangan (i_0) dengan pendapatan nasional keseimbangan (Y_0). Adanya *easy money policy*, menyebabkan

jumlah uang beredar bertambah. Bertambahnya uang beredar menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan dan LM_0 ke LM_1 . Sebagai akibatnya, keseimbangan baru terbentuk. Dikeseimbangan yang baru tersebut, pendapatan nasional keseimbangannya menjadi Y_1 dan suku bunga keseimbangan menjadi i_1 .

Adanya penambahan jumlah uang beredar menyebabkan suku bunga di pasar menjadi turun. Turunnya suku bunga menyebabkan investasi bertambah dan akibatnya kurva IS bergeser ke kanan menuju IS_1 . Pergeseran kurva IS menyebabkan keseimbangan berubah kembali menjadi i_1 dan Y_1 . Banyaknya permintaan dana untuk investasi menyebabkan suku bunga menjadi semakin mahal dan naik.

B. Perhitungan Keseimbangan IS-LM

Secara matematik keseimbangan kurva IS-LM dapat dilakukan sebagai berikut:

Contoh:

Diketahui, $C = 100 + 0,75Y$; $I = 60 - 200_i$; $M_s = 500$; dan $M_d = 0,2Y + 428 - 400_i$.

Ditanyakan: keseimbangan umum IS-LM:

Jawab:

$$Y = C + I$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200_i$$

$$Y - 0,75Y = 160 - 200_i$$

$$0,25Y = 160 - 200_i$$

$$Y = 640 - 800_i \dots\dots\dots \text{Keseimbangan di pasar barang}$$

$$M_s = M_d$$

$$500 = 0,2Y + 428 - 400_i$$

$$0,2Y = 72 + 400_i$$

$$Y = 360 - 2000_i \dots\dots\dots \text{Keseimbangan di pasar uang}$$

Keseimbangan di pasar umum

$$IS = LM$$

$$640 - 800_i = 360 + 2000_i$$

$$2800_i = 280$$

$$i = 0,1 \text{ atau } 10\%$$

$$Y = 640 - 800_i$$

$$Y = 640 - 800 (0,1)$$

$$Y = 560$$

Dengan demikian pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10 persen dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560.

C. Pergeseran Kurva IS

Apabila pemerintah meningkatkan pengeluarannya (G) sebesar 20, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Maka keseimbangan yang baru adalah:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200_i + 20$$

$$Y - 0,75Y = 180 - 200_i$$

$$0,25Y = 180 - 200_i$$

$$Y = 720 - 800_i \dots\dots\dots \text{Keseimbangan di pasar barang}$$

Apabila kurva LM tetap, maka keseimbangan umum menjadi:

$$IS = LM$$

$$720 - 800i = 360 + 2000i$$

$$2800i = 360$$

$$i = 0,129 \text{ atau } 12,9\%$$

$$Y = 720 - 800i$$

$$Y = 720 - 800(0,129)$$

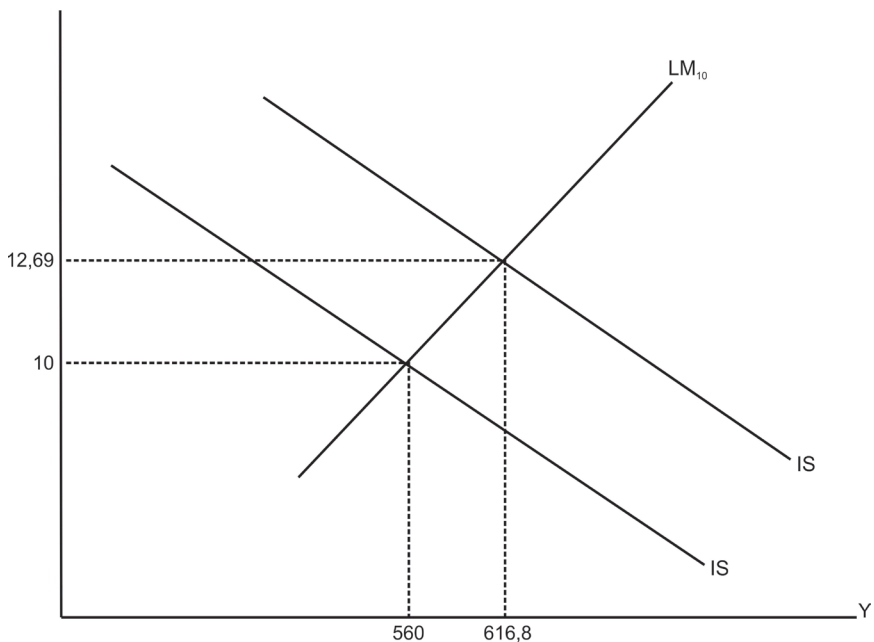
$$Y = 720 - 103,2$$

$$Y = 616,8$$

Naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 20, menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik menjadi 12,9 persen dan pendapatan nasional keseimbangan naik menjadi 616,8.

Gambar 36

Pergeseran Kurva IS terhadap Keseimbangan IS-LM

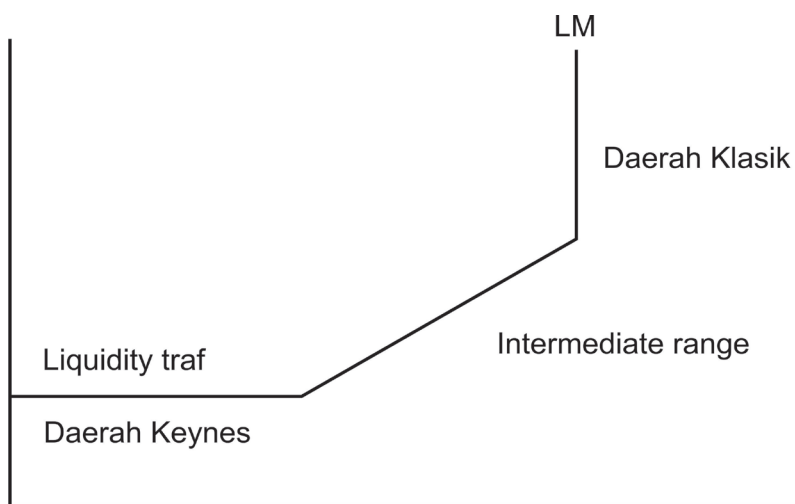


D. Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

Dalam melihat efektivitas kebijakan kita membandingkan pada tiga daerah, yaitu daerah klasik, intermediate range, dan daerah Keynes. Jika digambarkan, maka bentuk kurva LM menjadi seperti berikut:

Gambar 37

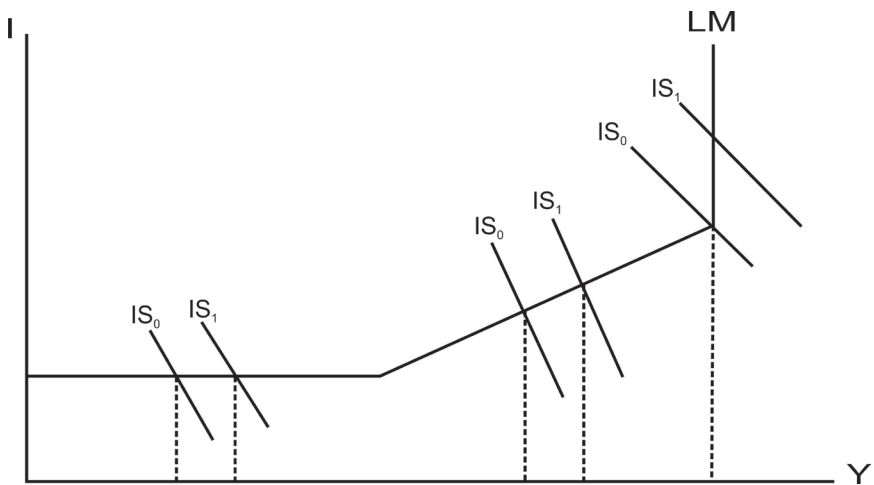
Kurva LM



Daerah *liquidity traf* merupakan daerah yang idenya pertama kali dikemukakan oleh Keynes. Keynes menganggap ada satu daerah pada kurva LM yang memiliki tingkat bunga yang sangat rendah dan tidak mungkin turun lagi. Daerah inilah yang disebut daerah *liquidity traf*. Sementara itu daerah klasik memiliki kurva LM yang tegak lurus. Hal ini dikarenakan pemahaman kaum klasik bahwa dalam teori permintaan uang, permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Menurut paham ini, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Karena tidak ada

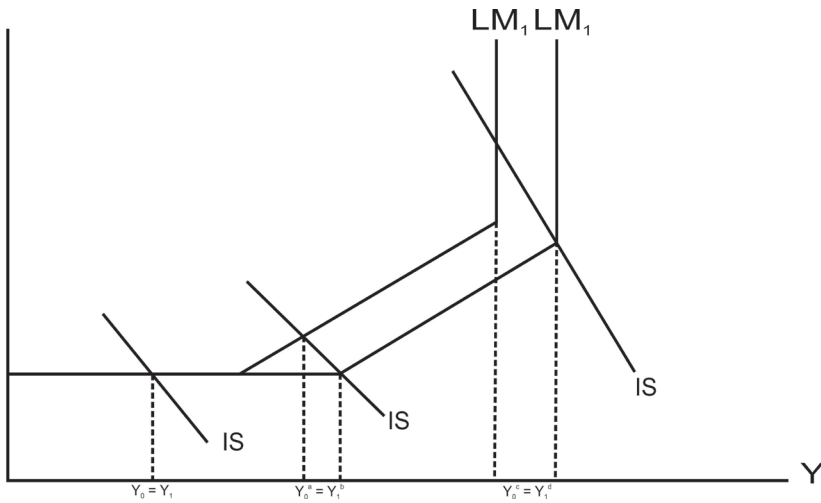
hubungannya dengan suku bunga, maka kurva LM bentuknya tegak lurus. Daerah *intermediate range* adalah daerah yang menunjukkan kurva LM dipengaruhi oleh suku bunga. Untuk melihat keefektifan kebijakan ekonomi dapat kita lihat pada gambar berikut:

Gambar 38
Efektivitas Kebijakan Fiskal



Gambar di atas menunjukkan apabila kurva IS bergeser ke kanan berarti kebijakan fiskal ekspansif. Jika kita perhatikan masing-masing daerah, kebijakan fiskal sangat efektif pada daerah Keynesian dan efektif pada daerah *intermediate range*. Hal ini terlihat dari besarnya perubahan keseimbangan pendapatan nasional di daerah Keynesian. Sementara itu, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif pada daerah klasik. Ketika ada kebijakan fiskal, keseimbangan pendapatan nasional tidak berubah.

Gambar 39:
Efektivitas Kebijakan Moneter



Kebijakan moneter yang ekspansif ditandai dengan bergesernya kurva LM dari LM_0 ke LM_1 . Apabila dibandingkan pada ketiga daerah maka kebijakan moneter sangat efektif di daerah klasik dan efektif pada daerah *intermediate*. Sementara itu, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif pada daerah Keynesian.



Daftar Pustaka

- Ackley, Gardner. 1998. *Macroeconomics: Theory and Policy*. McMillan Publishing Co.
- Andrew B, Abel, Bernake. 2004. *Macroeconomies*. New York: Addison Wesley Publishing Company.
- Budiono. 1985. *Teori Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- . 1998. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: PBF.
- Dioulio, Eugene, A. 2001. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Dornbusch, Rudiger. 2000. *Open Economy Macroeconomic*. New York: Basic Books.
- and Fisher. 2008. *Macroeconomic*. New York: McGrawHill International.
- Mangkusubroto, Guritno dan Algifari. 1992. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YPKN.

- McEachern, William A. Diterjemahkan oleh Sigit Triandaru. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba.
- Nanga, Muana. 2009. *Makroekonomi: Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, Paul, A. Dan Nordhaus, William, D. 1990. *Ekonomi, Jilid I*. Diterjemahkan oleh Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga.
- Satradipoera, Komaruddin. 1991. *Uang: di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit Bumi Asara.
- Schumpeter, J.A. 1954. *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Skousen, Mark. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro Teori-teori Kepedihan Sosial di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Ekonomi*. Alih Bahasa Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, D. Eko. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Malang: UMM Press.



Indeks

A

Abdullah 6, 8, 9
Adam Smith 2, 5, 6, 33, 34,
48, 197
Albert L. Mayers 6
Alfred Marshall 2
Amerika Serikat 16, 38, 79
APBN 28, 74, 75, 76, 95, 200
Aristoteles 1
Asas Daya Beli 196
ASEAN 38, 51
Atje Partadiredja 41

B

bank sentral 25, 26, 27, 61, 66,
100, 165, 250, 255
Boediono 76, 77
BULOG 54
BUMDesa 57

C

Cateris Paribus 10
ceilling price 54
checks and balances 66
Chief Financial Officer 66
Chief Operational Officer 66

D

defisit v, 22, 75, 76, 94
Defisit Anggaran 73
Discount Policy 27
Douglass C. North 3

E

efisiensi 1, 15, 42, 52, 162
ekonomi ii, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 24,
25, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 66, 68, 69,
71, 75, 76, 77, 78, 82, 83,
95, 98, 103, 104, 105, 107,
110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 128, 130,
142, 148, 149, 150, 154,
155, 156, 158, 162, 163,
164, 168, 171, 172, 173,
176, 177, 179, 180, 193,
194, 198, 201, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 228,
243, 245, 267

ekonomi campuran 38, 39, 41
ekonomi makro v, 14, 15, 24,
25, 55, 56, 66, 76, 95, 148,
149, 154

eksternalitas 52, 53, 55, 80, 83
Elinor Ostrom 2
ex ante 9

F
financial assets 143
Fisiokrat 2
Fransois Quesnay 1
Friedrich Engels 3
full employment 16
full of uncertainty 23

G

Gary Becker 5
GBHN 1993 42
general equilibrium 261
Gilarso 17, 32
good governance 63, 65
good governance principles 63
Gregory Grossman 33
Gross National Product 78, 84,
103, 105, 110
Gunawan Adisaputri 147

H

Homo Economicus 6
Hongkong 38
human power 4
human resources 4

I

income determinatio v
Indonesia ix, 23, 27, 28, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 49,
51, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 72, 74,
75, 76, 97, 115, 116, 156,
195, 200, 201, 202
inflasi v, vi, 15, 24, 26, 27, 36,
55, 60, 69, 75, 137, 164,
165, 220, 221, 222

investasi 14, 23, 25, 29, 32, 58,
68, 77, 78, 89, 106, 110,
137, 142, 143, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184,
185, 186, 191, 192, 222,
223, 227, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243,
246, 263

invisible hand 2, 3, 48

K

Karl Marx 2, 3

Kebijakan Cadangan 27

Kebijakan Fiskal xii, 28, 266,
267

Kebijakan Kredit Ketat 27

keuangan negara 1, 44, 63,
64, 65

Keynes v, 2, 3, 17, 128, 130,
140, 158, 162, 168, 169,
170, 249, 251, 252, 266

Koefisien Gini 117, 118, 119,
120, 121

konjungtur v, 20, 36, 135

konsumsi 14, 17, 31, 32, 48,
52, 93, 110, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 155, 166,
171, 172, 173, 174, 175,
177, 178, 181, 184, 185,
186, 191, 192, 194, 196,
206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 223, 225,
227, 229, 230, 231, 232,
233, 238, 239, 240, 242,
243, 245

L

liberalisme ekonomi 6

Lipsey 6

M

Malaysia 38

Mangkoesoebroto 78, 79, 80,
81, 82, 83, 86, 153

market failure 51, 52, 53

McEachern 33, 270

Merkantilisme 2

metode ekonomi 4

money supply 256

monopoli 18, 35, 42, 51, 52,
53, 55

Motif ekonomi 11

N

negara hukum 44
neraca v, 22, 25, 156
neraca pembayaran v, 22, 25,
156
Net Present Value 155, 156
Nordhaus 7, 270

O

official assessment system 200
Oliver E. Williamson 2
Open Market Operation 27
otoritas moneter 25, 250, 255
overheating 75

P

pajak 1, 24, 28, 53, 55, 74, 75,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98,
99, 106, 107, 159, 160, 172,
179, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207,
209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223,
227, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239,
240, 243, 245, 247

Pajak Penghasilan 91, 202,
203, 205

Pajak Pertambahan Nilai 202,
203

Pancasila 42, 43, 44, 45

pasar 1, 3, 14, 17, 18, 27, 34,
35, 36, 41, 47, 48, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 57, 63, 77,
78, 80, 89, 92, 93, 95, 143,
144, 148, 156, 163, 164,
166, 167, 168, 241, 242,
249, 256, 258, 261, 262,
263, 264

PDB x, 70, 79, 83, 86, 103, 104,
105, 106, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116

Pemerintah x, xi, 41, 47, 48,
50, 53, 54, 55, 66, 71, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 85, 94,
97, 99, 100, 101, 102, 164,
191, 219, 221, 237

Penawaran uang 255, 256

pendapatan nasional 14, 24,
77, 79, 80, 103, 104, 105,
106, 107, 109, 110, 116,
118, 131, 137, 138, 142,
148, 149, 150, 153, 154,
155, 168, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 189, 192,

206, 207, 208, 210, 212,
213, 214, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 249, 257,
261, 262, 263, 264, 265,
267

Pengangguran 15, 19, 20, 21,
58, 59, 60

Pengangguran Friksional 19

Pengangguran Konjungtur 20

Pengangguran Struktural 20

Pengeluaran agregat 183, 191,
192

permintaan uang 164, 169,
170, 249, 251, 252, 253,
254, 256, 257, 259, 266

PNBP 86, 87, 94, 95, 96, 97,
99, 100, 101, 102

politik 8, 48, 51, 68, 69, 219,
220

price level stability 24

Produk Domestik Bruto x , 70,
79, 103, 104, 109, 112, 115

R

rate of return 153, 154, 159

real asset 143

replaement investment 145

S

Samuelson 7, 159, 160, 161,
270

SDA 59, 95

SDM 57, 59

Selandia Baru 38

self assessment system 200, 201

semi self assessment system
200, 201

Singapura 38

sistem ekonomi Pancasila 43,
44

Skolastik 2

Subsidi 55

surplus 22, 73, 74, 75

Surplus Anggaran 73

T

tax avoidance 202

tax evasion 202

tenaga kerja 1, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 29, 37, 57, 58,
88, 89, 91, 105, 109, 118,
180

teori klasik 17, 166

Thailand 38

Thomas Aquinas 1

Thorstein Veblen 3

tindakan ekonomi 10, 11

U

under investment 144, 146

Univestitas Gadjah Mada 41

Utang 60, 61

UUD 45 42, 49

V

value free 8

value judgment 8

W

Wajib Pajak 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 205

withholding system 200

X

Xenophone 5

Y

Yunani Kuno 2

Yunita Anggraini 147



Tentang Penulis

Dr. Sabri, S.E., M.M. Lahir pada tanggal 04 mei 1969 di Palopo Sulawesi Selatan, putra ke tujuh dari tiga belas bersaudara pasangan almarhum Bapak Malle dan almarhumah Ibu Hadera, berasal dari Bone, Sulawesi Selatan.

Mengawali pendidikan formalnya di MIN Cimpu Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1981), kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN Suli Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1984) dan SMA PGRI Palopo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan (lulus tahun 1987). Masuk kuliah strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang Sulawesi Selatan (lulus tahun 1994). Strata dua (S2) pada Pascasarjana Magister Manajemen Konsentrasi MSDM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Sumatra Barat (lulus tahun 2009). Kemudian melanjutkan pendidikan program Doktor (S3) pada tahun 2014 di PPs Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Program studi Ilmu Manajemen Konsentrasi manajemen sumber daya manusia (MSDM) selesai September 2017.

Pengalaman organisasi yang pernah dan sedang diikuti, antara lain: pada tahun 1987-1994 aktif di himpunan mahasiswa Islam (HMI) Komisariat HMI Universitas 45 Ujung Pandang, pada tahun 1988-1989 dan 1989-1990 sebagai anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang. Pengurus APTISI Sebagai Koordinator bidang pendidikan Provinsi Kepri Periode 2014-2019.

Adapun Pengalaman Kerja yang pernah dilakukan adalah sejak tahun 2006 sampai sekarang sebagai dosen tetap pada kampus STIE Ibnu Sina Batam 2008-2016 sebagai Kaprodi Manajemen (2 Periode) pada STIE Ibnu Sina Batam dan jabatan terakhir sebagai pembantu ketua satu Bidang Akademik Periode 2016-2020.